

LAPORAN AKHIR

KAJIAN GRAND DESAIN PENATAAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN CIANJUR



INSTITUT PEMBANGUNAN JAWA BARAT
– UNIVERSITAS PADJADJARAN



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN CIANJUR

2021

LEMBAR KERJA
KAJIAN GRAND DESAIN PENATAAN WILAYAH
KECAMATAN DI KABUPATEN CIANJUR

Disusun oleh

Ketua Tim :

Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos, MA, Ph.D.

Anggota Tim Ahli :

- Dr. Dedi Sukarno, S.IP., M.Si
- Dr. Muhammad Fedriyansyah, S.Sos., M.Si
- Adhadian Akbar, SE., MBA

Tenaga Administrasi:

- Irfan Winaldi, S.A.P

Surveyor :

- Enjang Mutaqin, S.A.P
- Annora Febrilla Nilamsari, S.A.P.
- Annisa Firdaus, S.A.P
- Putri Permata Oktaviani, S.A.P.

RINGKASAN

Dalam menjalankan misi ke 3 melalui pemerataan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, kemudian misi ke 5 yaitu menjamin terciptanya pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju era governance 3.0 di Kabupaten Cianjur, Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Cianjur melakukan penyusunan kajian terkait penataan wilayah kecamatan yang didasarkan pada UU No 23 tahun 2014 dan PP No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Analisis data yang digunakan dalam kajian ini akan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) berdasarkan pengumpulan data primer dan sekunder dan konsep penyesuaian kecamatan, maka berdasarkan metode tersebut, disimpulkan bahwa beberapa kecamatan di Kabupaten Cianjur direkomendasikan untuk dibuat kecamatan baru, khususnya kecamatan yang mencakup Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka.

Kata Kunci : Kecamatan; Penataan Kecamatan; *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

DAFTAR ISI

RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.3 Dasar Hukum.....	4
1.4 Sasaran dan Output Kegiatan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Otonomi Daerah	6
2.2 Kecamatan	8
2.3 Gambaran Umum.....	9
BAB III METODE	17
3.1 Metode Penelitian	17
3.2 Pengumpulan Data	17
3.3 Analisis Data	18
3.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	22
BAB IV ANALISIS NORMATIF GRAND DESAIN PENATAAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN CIANJUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018.....	23
4.1 Hasil Pengolahan Data Menurut PP No. 17 Tahun 2018	23
4.2 Skor AHP Keseluruhan berdasarkan Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan	44
4.3 Rekomendasi Pembentukan Kecamatan Baru Berdasarkan Penataan Kecamatan di Kabupaten Cianjur	47
4.4 Kemampuan Keuangan Daerah	81
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Simpulan	84

5.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan, yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi merupakan pengalihan tanggung jawab, kewenangan, sumber-sumber daya (manusia, dana, dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintah daerah inilah yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hasil dari berubahnya sistem sentralisasi ke desentralisasi, hal ini memiliki makna bahwa daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri.

Tujuan dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah ini ialah agar pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan dan melakukan kontrol masyarakat dengan lebih baik. Desentralisasi dan otonomi daerah dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Desentralisasi kewenangan tersebut akan berakhir dengan semakin meningkatnya peran serta masyarakat dan berubahnya peran pemerintah dari provider menjadi fasilitator. Dalam ajaran rumah tangga formal prakarsa atau inisiatif daerah sangat menentukan apakah suatu urusan merupakan kewenangan daerah atau bukan. Hal ini bermaksud bahwa sesuatu yang bukan kewenangan pusat akan otomatis menjadi kewenangan daerah jika diurus oleh daerah sedangkan jika tidak diurus pusat dapat mengambil kembali urusan tersebut dan masuk menjadi urusan pusat. Hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Pemberian kewenangan tersebut diikuti dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Provinsi Jawa Barat melakukan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian dari integral pembangunan nasional yang telah diamanatkan dalam pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Provinsi Jawa Barat memiliki strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2018 – 2023 yang telah dirumuskan dengan pendekatan holistik-tematik dan integrative yang mengadopsi kebijakan penataan ruang yang terkait dengan pengembangan wilayah, pengembangan struktur ruang, dan pola ruang. Provinsi Jawa Barat pun memiliki prioritas pembangunan daerah untuk ketercapaian visi dan misi, dimana salah satu di antaranya ialah mengenai inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Pada tahun 2020, wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 wilayah kabupaten dan 9 kota. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan daerah paling luas kedua di Jawa Barat yaitu sebesar 3.840,16 km atau sekitar 10,85% dari Provinsi Jawa Barat. Namun, dengan luasnya wilayah Kabupaten Cianjur, tidak membuat masyarakat Cianjur memiliki kesejahteraan yang baik, justru tingkat kesejahteraan yang dimiliki oleh Kabupaten Cianjur sangat rendah.

Berdasarkan IPM pada RPJMD Jawa Barat dijelaskan bagaimana penduduk mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pada tahun 2019 IPM Jawa Barat sebesar 72,03, meningkat sebesar 0,73 poin dari tahun sebelumnya. IPM tertinggi dicapai oleh Kota

Bandung dengan IPM sebesar 81,62, sedangkan capaian terendah diduduki oleh Cianjur dengan IPM sebesar 65,38. Hampir seluruh kabupaten di Jawa Barat masuk sebagai kategori pembangunan sedang dan tinggi. Sedangkan pada kategori kota masuk pada kategori tinggi dan sangat tinggi. IPM itu sendiri dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Dalam suatu daerah yang luas, akan terasa lebih sulit jangkauan pemerintah kepada masyarakat dalam hal memberikan pelayanan publik, sehingga perlu dilakukan penataan menjadi beberapa daerah sehingga rentang kendali menjadi semakin dekat dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat semakin terjangkau. Penataan kecamatan dapat dilihat sebagai upaya pengembangan organisasi untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat agar pemerintah memberikan pelayanan yang optimal, setidaknya dilakukan untuk hal mendasar, seperti pendidikan dan kesehatan.

Kabupaten Cianjur memiliki arah kebijakan dan strategi di bidang penataan ruang dan wilayah. Pengembangan penataan ruang diarahkan pada pemantapan efisiensi dan efektivitas pengembangan wilayah yang terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah pembangunan (WP) meliputi WP Utara, WP Tengah dan WP Selatan. Penataan ruang ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan pemantapan pengembangan sistem perkotaan dan sistem pedesaan, pusat pelayanan yang melayani kegiatan berskala kecamatan dan beberapa desa, serta pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan antar desa. Pada pusat pelayanan yang melayani kegiatan berskala kecamatan dan beberapa desa, pemantapan pengembangan diarahkan pada fungsi pusat produksi, permukiman industri perkebunan dan pertanian serta mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana dengan skala pelayanan beberapa kecamatan pada hirarki yang lebih rendah dari pusat kegiatan lokal.

Untuk melakukan penataan kecamatan, Widanarto (2017) menyebutkan bahwa dimensi utama yang menjelaskan efektif tidaknya penataan kecamatan adalah pengawasan, komunikasi, dan koordinasi yang kesemuanya turut menentukan terhadap tingkat pelayanan masyarakat. Kemudian disampaikan dalam El Fitri (2013) bahwa kriteria persyaratan pelaksanaan pemekaran kecamatan yaitu meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa bawahan serta terdapat kriteria lain untuk melengkapi penilaian pemekaran kecamatan yaitu kondisi geografis, potensi wilayah, kantor, personil, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, fasilitas perindustrian, fasilitas koramil yang masing-masing kriteria memiliki penilaian untuk memenuhi kriteria skor untuk pemekaran kecamatan.

Kajian ini akan mengulas mengenai grand desain penataan wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur untuk mengukur dan mengevaluasi potensi daerah yang memungkinkan untuk dilakukannya penataan kecamatan (pembentukan, penggabungan dan penyesuaian) sebagai acuan dalam menentukan pilihan terbaik bagi pengembangan dan penataan kecamatan di Kabupaten Cianjur.

1.2 Maksud dan Tujuan

Kajian ini dimaksudkan untuk membuat grand desain penataan wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 dan PP 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

1.4 Sasaran dan Output Kegiatan

Kegiatan Kajian grand desain Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Cianjur dilakukan dengan sasaran terhadap Pemerintah di Kabupaten Cianjur, diantaranya wilayah Kecamatan di Kabupaten Cianjur, BAPPEDA, DPMD, BPKAD, BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Lembaga lain yang sesuai dengan konsep penataan kecamatan.

Adapun output kegiatan ini ialah dokumen kajian grand desain Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Cianjur dalam bentuk rekomendasi kecamatan mengenai penataan kecamatan baik Pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian kecamatan agar pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah di tiap kecamatan dilaksanakan secara optimal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *outus* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-undang. Mardiasmo memberikan pendapat bahwa dalam era otonomi daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan potensi. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan pengelolaan daerah dan diharapkan semakin meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Philip Mahwood menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah ialah hal dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan, berusaha mempertahankan kepentingan masing-masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Kemudian menurut Benyamin Hoesein otonomi daerah merupakan pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar pemerintahan pusat.

Kemudian dalam perspektif lain menurut Kaho, otonomi secara sederhana sebagai sebuah bentuk "*selfrule*" atau "*selfgovernment*". Kaho mengartikan otonom adalah memiliki peraturan sendiri atau memiliki hak/kekuasaan/wewenang untuk membuat peraturan sendiri yang meliputi pengaturan atau perundang-undangan sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah ialah daerah memiliki kewenangannya sendiri untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri di luar kewenangan pemerintahan pusat.

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki prinsip-prinsip dalam penyelenggaraannya, yaitu:

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat, dan daerah serta antardaerah.
5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan oleh karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk meletakkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

8. Pelaksanaan azas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. (Dewirahmadanirwati, 2018)

2.2 Kecamatan

Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Untuk memainkan peran sebagai organisasi perangkat daerah, salah satu strategi mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan berdasarkan grand desain penataan wilayah kecamatan.

2.2.1. Penataan Kecamatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Penataan kecamatan meliputi:

1. Pembentukan kecamatan

Pembentukan kecamatan dilakukan melalui:

- a. Pemekaran satu kecamatan menjadi dua kecamatan atau lebih
- b. Penggabungan bagian kecamatan dari kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/kota menjadi kecamatan baru.

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi:

- a. Jumlah penduduk minimal
- b. Luas wilayah minimal

- c. Usia minimal kecamatan
- d. Jumlah minimal desa/kelurahan yang menjadi cakupan

Kemudian mengenai persyaratan teknis pembentukan kecamatan meliputi:

- a. Kemampuan keuangan daerah, yaitu rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50%
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan, yaitu paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya
- c. Persyaratan teknis lainnya, meliputi batas wilayah, nama kecamatan yang akan dibentuk, lokasi calon ibu kota kecamatan, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah

2. Penggabungan kecamatan

Penggabungan kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan dua kecamatan atau lebih yang bersanding dalam satu daerah kabupaten/kota. Penggabungan kecamatan dapat dilakukan apabila terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan, terdapat kepentingan strategis nasional, dan tercapainya kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/kelurahan yang akan bergabung.

3. Penyesuaian kecamatan

Penyesuaian kecamatan berupa:

- a. Perubahan batas wilayah kecamatan
- b. Perubahan nama kecamatan
- c. Pemindahan ibu kota kecamatan
- d. Perubahan nama ibu kota kecamatan

2.3 Gambaran Umum

2.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur

Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan dan 360 Desa/Kelurahan. Secara astronomis, Kabupaten Cianjur terletak

antara 1060 42' – 1070 25' Bujur Timur dan 60 21' – 70 25' Lintang Selatan dengan ketinggian 7-2.962 mdpl. Berdasarkan posisi geografinya, Kabupaten Cianjur memiliki batas-batas:

- a. Utara: Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta
- b. Selatan: Samudra Hindia
- c. Barat: Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor
- d. Timur: Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat dan Kab.Garut.

Secara geografis, kabupaten Cianjur dibedakan dalam tiga Wilayah Pembangunan yakni Wilayah Utara (meliputi 16 Kecamatan: Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Ciranjang, Bojongpicung, Mande, Cikalongkulon, Cugenang, Sukaresmi, Cipanas, Pacet dan Haurwangi). Wilayah Tengah (meliputi 9 Kecamatan: Sukanagara, Takokak, Campaka, Campakamulya, Tanggeung, Pagelaran, Leles, Cijati dan Kadupandak) dan Wilayah Selatan (meliputi 7 Kecamatan: Cibinong, Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu dan Pasirkuda)

Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Luas (km)
Agrabinta	Mekarsari	192,65
Leles	Pusakasari	114,32
Sindangbarang	Saganten	159,08
Cidaun	Kertajadi	295,51
Naringgul	Wangunjaya	281,32
Cibinong	Sukajadi	235,48
Cikadu	Cikadu	188,66
Tanggeung	Tanggeung	59,8
Pasirkuda	Kalibaru	115,15
Kadupandak	Kadupandak	104,41
Cijati	Cijati	49,02
Takokak	Pasawahan	142,16
Sukanagara	Sukanagara	174,05

Kecamatan	Ibu kota Kecamatan	Luas (km)
Pagelaran	Pagelaran	199,44
Campaka	Cidadap	143,75
Campaka Mulya	Campakamulya	74,27
Cibeber	Cihaur	124,73
Warungkondang	Jambudipa	45,16
Gekbrong	Gekbrong	50,77
Cilaku	Sukasari	52,53
Sukaluyu	Sukamulya	48,02
Bojongpicung	Bojongpicung	88,34
Haurwangi	Kertasari	46,18
Ciranjang	Cibiuk	34,81
Mande	Mulyasari	98,79
Karangtengah	Hegarmanah	48,53
Cianjur	Pamoyanan	26,15
Cugenang	Mangunkerta	76,15
Pacet	Cipendawa	41,66
Cipanas	Cipanas	67,28
Sukaresmi	Cikanyere	92,15
Cikalongkulon	Sukagalih	144,02
Cianjur	Cianjur	3614,35

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

1. Topografi

Sebagian besar wilayah Cianjur merupakan pegunungan, kecuali pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Lahan-lahan pertanian tanaman pangan dan hortikulturam peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Dari Luas Wilayah Kabupaten Cianjur, pemanfaatannya meliputi: 83.034 Ha (23,71%) berupa hutan produktif dan konservasi; 58,101 Ha(16,59%) berupa pertanian lahan basah; 97,227 Ha (27,76 %) Berupa lahan pertanian kering dan

tegalan; 57,735 Ha (16,49 %) berupa tanah perkebunan; 3.500 Ha (0,10 %) berupa tanah dan pengembalan/pekarangan; 1.239 Ha (0,035 %) berupa tambak/kolam; 25.261 Ha (7,20 %) berupa pemukiman/pekarangan; dan 22.483 Ha (6,42 %) berupa pegunungan lain-lain.

2. Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur sebanyak 2.477.560 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.271.458 jiwa dan perempuan sebanyak 1.206.102 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019-2020 sebesar 1,29%.

3. Hidrologi dan Klimatologi

Kabupaten Cianjur umumnya beriklim tropis dengan temperature normal Sebagaimana daerah beriklim tropis maka di wilayah Cianjur utara tumbuh tanaman sayuran, teh dan tanaman hias. Di wilayah Cianjur Tengah tumbuh dengan baik tanaman padi, kelapa dan buah-buahan. Sedangkan di wilayah Cianjur selatan tumbuh tanaman palawija, perkebunan teh, karet, aren, coklat, kelapa serta tanaman buah-buahan. Potensi lain di wilayah Cianjur selatan antara lain obyek wisata pantai yang masih alami dan menantang investasi.

4. Bidang Ekonomi

Lapangan pekerjaan penduduk Kabupaten Cianjur berada pada sector pertanian yaitu sekitar 62,99%. Sektor lainnya yang cukup banyak menyerap tenaga kerja ialah sector perdagangan dan jasa yaitu sekitar 14,60% dan pengiriman pembantu 30%. Produk Domestik Regional Bruto pada tahun 2020 adalah 47.523.488,61. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 anjlok menjadi -0,78% karena pandemi Covid-19.

5. Sektor Pertanian

Sektor Pertanian di Kabupaten Cianjur:

a) Jamur

Produksi jamur tahun 2020 sebanyak 87.070 ton dengan luas panen 167.500 hektar

b) Wortel

Produksi wortel pada tahun 2020 sebesar 63.173,7 ton dengan luas panen 3.206 hektar

c) Ketimun

Produksi ketimun mencapai 14.358 ton dengan luas panen sekitar 612 hektar

d) Cabai Besar

Produksi sebesar 28.194,8 ton dan luas panen 1.758 hektar

e) Kubis

Produksi kubis mencapai 14.018,5 ton dengan luas panen sekitar 922 ton

6. Sarana Kesehatan, Pengangkutan, dan Perdagangan

a) Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan di Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 meliputi rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas, puskesmas pembantu, dan apotek sebagai berikut:

Kecamatan	Sarana Kesehatan					
	Rumah sakit	Rumah sakit bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Agrabinta	0	0	0	1	1	2
Leles	0	0	0	1	2	2
Sindangbarang	0	0	0	1	3	2
Cidaun	0	0	1	2	3	1
Naringgul	0	0	0	1	4	2
Cibinong	0	0	0	2	6	2
Cikadu	0	0	0	2	2	1
Tanggeung	0	0	0	1	4	1

Kecamatan	Sarana Kesehatan					
	Rumah sakit	Rumah sakit bersalin	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
Pasirkuda	0	0	0	1	2	1
Kadupandak	0	0	1	1	3	2
Cijati	0	0	5	2	1	1
Takokak	0	0	0	1	4	0
Sukanagara	0	0	1	1	4	4
Pagelaran	1	0	1	2	2	3
Campaka	0	0	2	1	3	2
Campakamulya	0	0	0	1	3	0
Cibeber	0	0	1	2	6	5
Warungkondang	0	0	3	1	2	3
Gekbrong	0	0	1	1	1	1
Cilaku	0	0	3	1	6	3
Sukaluyu	0	0	0	1	4	3
Bojongpicung	0	0	1	2	5	3
Haurwangi	0	0	0	1	3	3
Ciranjang	0	0	3	1	4	3
Mande	0	0	1	2	3	2
Karangtengah	1	0	7	2	7	7
Cianjur	1	0	5	3	4	8
Cugenang	0	0	0	2	3	4
Pacet	0	0	3	2	4	3
Cipanas	1	0	5	1	2	3
Sukaresmi	0	0	4	2	3	3
Cikalongkulon	0	0	1	2	4	3
Total	4	0	49	47	108	83

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

b) Sarana perdagangan

Jenis sarana perdagangan	2020
Pasar	24
Toko	58
Kios	-
Warung	-
Jumlah	82

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

c) Sarana pengangkutan

Panjang jalan di Kabupaten Cianjur menurut kondisi jalan pada tahun 2020

Baik	589,73 km
Sedang	243,79 km
Rusak	187,85 km
Rusak Berat	280,33 km

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

7. Daftar Bupati

Adapun Bupati dari masa ke masa ialah sebagai berikut:

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Adjat Sudrajat Sudirahardja	1978 – 1983
2.	Arifin Yoesoef	1983 - 1988
3.	Eddi Soekardi	1988 – 1996
4.	Harkat Handiamihardja	1966 – 2001
5.	Wasidi Swastomo	2001 – 2006
6.	Tjetjep Muchtar Soleh	2006 – 2016
7.	Irvan Rivano Muchtar	2016 – 2018
8.	Herman Suherman (PLT)	2018 – 2020
9.	Dudi Sudrajat Abdirachim	2020 – 2021
10.	Herman Suherman	2021 – 2026

Hingga saat ini, Bupati Cianjur terus menjalankan fungsi dan perannya sebagai kepala daerah untuk dapat meningkatkan pembangunan daerah ke depannya, pengembangan kualitas sumber daya manusia, pengembangan berbagai sektor dan bidang guna memajukan kesejahteraan masyarakat Cianjur.

BAB III

METODE

3.1 Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yaitu sebuah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relative, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Peralatan utama *Analytical Hierarchy Process* (AHP) ialah memiliki sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya yaitu persepsi manusia. (Parhusip, 2019)

Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970. Metode AHP merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan memperhatikan faktor-faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. Metode ini merupakan metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hirarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel sektor perekonomian secara relatif, dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Skala penentuan sub sektor unggulan dalam metode AHP ini dilihat dari Prioritas tertinggi. Metode AHP dalam penelitian ini menggunakan *Microsoft Excel*.

3.2 Pengumpulan Data

2.3.1 Pengumpulan Data

Data dalam mengumpulkan informasi kajian ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Data primer berasal dari wawancara dan observasi langsung. Wawancara dilakukan kepada:

1. Kepala Bidang Litbang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2. Kepala Bidang Kewilayahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder didapatkan dari dokumen yang berasal dari BAPPEDA dan DPMD Kabupaten Cianjur, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi untuk menginterpretasikan data yang diperoleh.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode AHP, sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan
2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama.
3. Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilai seluruhnya
4. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relative atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya
5. Menghitung nilai eigen atau normalisasi dan menguji konsistensinya
6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki
7. Menghitung vector eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan.

3.3 Analisis Data

3.3.1 Menyusun matriks perbandingan berpasangan tiap kriteria

Perbandingan berpasangan dilakukan guna penilaian kriteria dan alternatif. Skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat yang ada pada suatu permasalahan.

Skala Dasar Perbandingan Berpasangan	
Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari pada elemen yang lain
5	elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	satu elemen jelas lebih mutlak penting dari pada elemen lainnya
9	satu elemen mutlak penting dari pada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai- nilai antara dua nilai perbandingan yang berdekatan

Penentuan Kriteria Skala Perbandingan Berpasangan				
	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4
Kriteria 1	K 1.1	K 1.2	K 1.3	K 1.4
Kriteria 2	K 2.1	K 2.2	K 2.3	K 2.4
Kriteria 3	K 3.1	K 3.2	K 3.3	K 3.4
Kriteria 4	K 4.1	K 4.2	K 4.3	K 4.4

Agar dapat menentukan rekomendasi kecamatan yang diinginkan dalam penelitian ini, digunakanlah metode analisis data *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Dalam penelitian ini analisis AHP digunakan untuk mengetahui indikator penataan wilayah kecamatan di Kabupaten Cianjur yang dilihat dari jumlah penduduk, luas kecamatan, kepadatan penduduk dan jumlah desa. Indikator tersebut diambil dari Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator yang dilakukan dalam perhitungan penataan kecamatan berdasarkan PP

nomor 70 tahun 2018. Perhitungan jumlah penduduk dilakukan berdasarkan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan yang berada di dalam satu kabupaten. Data jumlah penduduk diambil dari primer atau dari data sekunder lainnya.

2. Luas Kecamatan

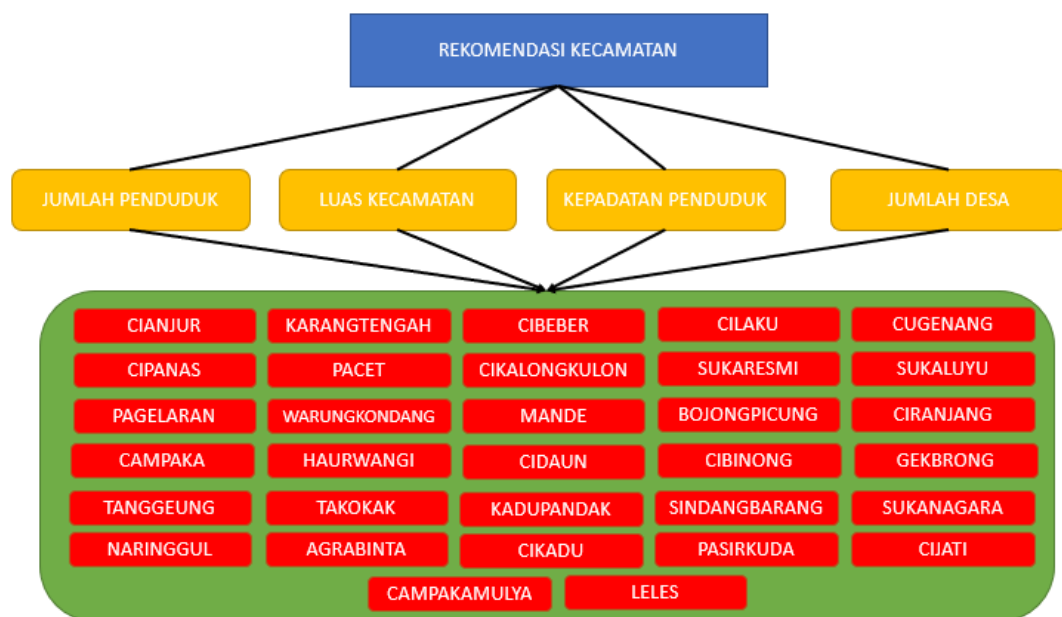
Luas kecamatan merupakan Indikator untuk menentukan perhitungan kecamatan dalam menentukan penataan wilayah kecamatan. Indikator ini merupakan perhitungan luas kecamatan dari tiap- tiap kecamatan.

3. Kepadatan Penduduk

Indikator yang ketiga berdasarkan PP nomor 17 tahun 2018 adalah Kepadatan penduduk. Indikator Kepadatan penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk yang terdapat dalam satu kecamatan terhadap luas kecamatan.

4. Jumlah Desa

Jumlah desa merupakan indikator perhitungan penataan kecamatan. Indikator jumlah desa menghitung jumlah desa dari setiap kecamatan, yang berdasarkan PP 17 tahun 2018 jumlah desa yang dapat dilakukan penataan merupakan kecamatan yang memiliki desa lebih dari 10 desa per kecamatan.



3.3.1 Uji Konsistensi Indeks dan Rasio

Salah satu utama model AHP yang membedakannya dengan model – model pengambilan keputusan yang lainnya adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Dengan model AHP yang memakai persepsi *decision maker* sebagai inputnya maka ketidakkonsistenan mungkin terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten terutama kalau harus membandingkan banyak kriteria.

Berdasarkan kondisi ini maka *decision maker* dapat menyatakan persepsinya tersebut akan konsisten nantinya atau tidak. Pengukuran konsistensi dari suatu matriks itu sendiri didasarkan atas *eigen value maksimum*. Thomas L. Saaty telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matriks berordo n dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$CI = \frac{(\lambda_{\max} - n)}{(n - 1)}$$

Dimana :

CI = Rasio Penyimpangan (deviasi) konsistensi (consistency indeks)

$\lambda_{\max}$ = Nilai eigen terbesar dari matriks berordo n

N = Orde matriks

$$RI = \frac{(1,98 \times (N - 2))}{N}$$

Apabila CI bernilai nol, maka matriks pair wise comparison tersebut konsisten. Batas ketidakkonsistenan (inconsistency) yang telah ditetapkan oleh Thomas L. Saaty ditentukan dengan menggunakan Rasio Konsistensi (CR), yaitu perbandingan indeks konsistensi dengan nilai Random Indeks (RI) yang didapatkan dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory kemudian dikembangkan oleh Wharton School. Nilai ini bergantung pada ordo matriks n . Dengan demikian, Rasio Konsistensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Dimana :

CR = Ratio Konsisten

RI = Indeks Random

Untuk model AHP, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsisten < 0.1. nilai CR < 0.1 merupakan nilai yang tingkat konsistensinya baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian nilai CR merupakan ukuran bagi konsistensi suatu komparasi berpasangan dalam matriks pendapat.

3.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur. Adapun waktu pelaksanaannya dilakukan pada:

BULAN	November				Desember			
MINGGU KE	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan dan Koordinasi								
Pengumpulan data awal								
Tabulasi & pengolahan data awal								
FGD I								
Analisis dan pengolahan data								
Pengumpulan data ke instansi terkait								
FGD II								
Penyusunan Laporan Akhir								
Ekspose Hasil								

BAB IV

ANALISIS NORMATIF GRAND DESAIN PENATAAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN CIANJUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018

4.1 Hasil Pengolahan Data Menurut PP No. 17 Tahun 2018

Adanya sistem desentralisasi menimbulkan banyak perubahan, diantaranya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan suatu kewajiban daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. pemetaan kecamatan merupakan suatu proses rancang bangun penataan kecamatan tingkat daerah yang meliputi penataan kecamatan dan perkiraan jumlah pemekaran kecamatan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Penataan kecamatan ini merupakan arah kebijakan yang dapat disesuaikan dan dituangkan ke dalam arah kebijakan pemerintah daerah. Terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, telah mengatur tentang pemetaan kecamatan yang meliputi pembentukan kecamatan, penggabungan kecamatan dan penyesuaian kecamatan.

Terdapat kriteria persyaratan pelaksanaan dalam pemetaan kecamatan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Kriteria persyaratan pelaksanaan pemekaran kecamatan yaitu meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, dan cakupan wilayah dan usia kecamatan. Serta kriteria lain untuk melengkapi penilaian pemetaan kecamatan yaitu kondisi geografis, potensi wilayah, kantor, personil, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas perdagangan, fasilitas koramil, kemampuan keuangan daerah yang masing-masing kriteria memiliki penilaian untuk memenuhi kriteria pemetaan kecamatan.

Tabel 4.1
Kriteria Persyaratan Dasar Pemetaan Pembentukan
Kecamatan Untuk Provinsi Di Pulau Jawa

No	Indikator	Ketentuan
1.	Jumlah Penduduk / Kepala Keluarga	Minimal setiap desa 6.000 jiwa atau 1200 KK dan minimal setiap kelurahan 8.000 jiwa atau 1600 KK
2.	Luas Wilayah	Minimal 7,5 km ²
3.	Cakupan Wilayah	Minimal 10 desa/ kelurahan untuk kabupaten atau minimal 5 desa/kelurahan untuk kota
4.	Usia Kecamatan	Minimal 5 tahun

Sumber : Lampiran PP Nomor 17 tahun 2018, 2021

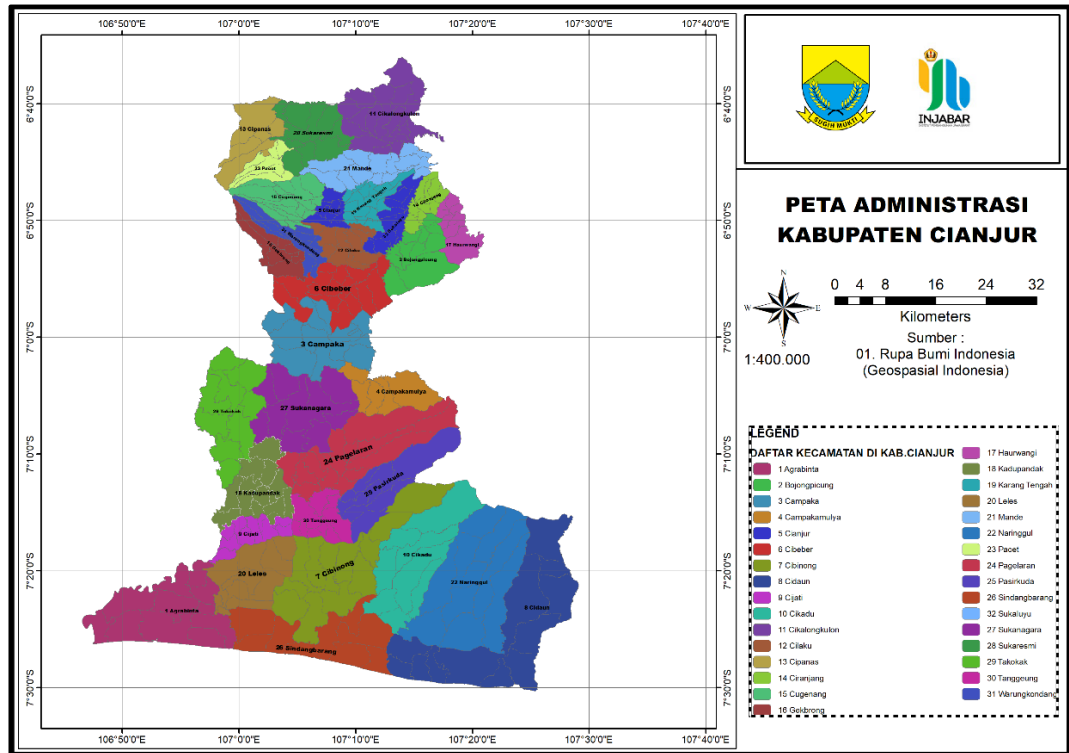
Dari tabel diatas, tampak bahwa persyaratan dasar pemetaan pembentukan kecamatan harus dipenuhi oleh beberapa aspek indikator dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu untuk wilayah di pulau jawa indikator jumlah penduduk minimal setiap desa 6000 jiwa atau 1200 KK dan minimal setiap kelurahan 8000 jiwa atau 1600 KK, luas wilayah satu desa minimal 7,5 km² dengan cakupan wilayah minimal 10 desa/keluahan unruk kabupaten atau minimal 5 desa/kelurahan untuk kota. Dan yang terakhir indikator usia kecamatan yang akan dilakukan pemetaan minimal 5 tahun. Adapun persyaratan lainnya, sebagai persyaratan teknis pemetaan kecamatan adalah kemampuan keuangan daerah yang merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50%, kemudian aspek sarana dan prasarana pemerintah yang terdapat di calon kecamatan baru, paling tidak memiliki lahan untuk kantor pemerintahan dan pendukung pelayan publik lainnya.

Berdasarkan pendapat pemerintah Kabupaten Cianjur menganggap beberapa Kecamatan di Kabupaten Cianjur sudah tidak efektif lagi karena jumlah desa yang begitu banyak dan kepadatan

penduduk yang terbilang padat, juga di dukung dengan luas wilayah yang sangat luas dalam satu kecamatan.

Gambar 4.1

Peta Administratif Kecamatan di Kabupaten Cianjur



Tabel 4.2

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk berdasarkan kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Km ²
1.	Agrabinta	37,520	186.09
2.	Bojongpicung	82,292	916.11
3.	Campaka	67,630	448.57
4.	Campakamulya	23,171	299.24
5.	Cianjur	171,380	6,468.20
6.	Cibeber	129,362	986.22
7.	Cibinong	59,732	243.71
8.	Cidaun	62,209	193.69
9.	Cijati	32,850	638.84

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Km ²
10.	Cikadu	35,242	172.01
11.	Cikalongkulon	104,619	701.06
12.	Cilaku	113,409	2,071.57
13.	Cipanas	110,516	1,572.06
14.	Ciranjang	86,600	2,428.54
15.	Cugenang	113,124	1,430.45
16.	Gekbrong	58,480	1,069.34
17.	Haurwangi	62,430	1,297.21
18.	Kadupandak	50,855	461.92
19.	Karangtengah	158,881	3,188.78
20.	Leles	29,566	248.32
21.	Mande	78,565	775.04
22.	Naringgul	44,517	149.76
23.	Pacet	106,926	2,469.90
24.	Pagelaran	73,146	354.03
25.	Pasirkuda	34,395	281.17
26.	Sindangbarang	55,143	330.77
27.	Sukaluyu	87,368	1,742.43
28.	Sukanagara	55,155	307.16
29.	Sukaresmi	87,503	887.47
30.	Takokak	50,237	339.15
31.	Tanggeung	48,753	785.85
32.	Warungkondang	76,165	1,604.16
Jumlah		2,387,741	1,095.24

Sumber : Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel diatas, Kabupaten Cianjur yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 32 kecamatan, dengan jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Cianjur dengan jumlah 171.380 jiwa dengan tingkat kepadatan 6.468,20/ km², disusul dengan

kecamatan Karang Tengah dengan jumlah penduduk 158.881 jiwa dan tingkat kecamatan 3.188,78 / km². Dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 2,387,741 dan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 1,095.24 /km². Keadaan tersebut menyebabkan Kabupaten Cianjur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga se Provinsi Jawa Barat, setelah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Kemudian dilihat dari aspek kewilayahan, beberapa Kecamatan di Kabupaten Cianjur merupakan Kecamatan yang memiliki cakupan wilayah yang luas.

Tabel 4.3

Luas Wilayah di Kabupaten Cianjur berdasarkan Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Agrabinta	192,653.2
2.	Bojongpicung	88,339.4
3.	Campaka	143,747.6
4.	Campakamulya	74,265.6
5.	Cianjur	26,147.0
6.	Cibeber	124,729.7
7.	Cibinong	235,477.7
8.	Cidaun	295,512.3
9.	Cijati	49,021.5
10.	Cikadu	188,664.4
11.	Cikalongkulon	144,022.5
12.	Cilaku	52,529.6
13.	Cipanas	67,276.5
14.	Ciranjang	34,813.1
15.	Cugenang	76,153.9
16.	Gekbrong	50,768.8
17.	Haurwangi	46,178.3
18.	Kadupandak	104,407.8
19.	Karangtengah	48,525.1
20.	Leles	114,320.3

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah
21.	Mande	98,794.7
22.	Naringgul	281,324.3
23.	Pacet	41,664.5
24.	Pagelaran	199,436.6
25.	Pasirkuda	115,149.5
26.	Sindangbarang	159,075.6
27.	Sukaluyu	48,023.8
28.	Sukanagara	174,049.4
29.	Sukaresmi	92,153.4
30.	Takokak	142,164.7
31.	Tanggeung	59,801.5
32.	Warungkondang	45,157.5

Sumber : Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2021

Tabel 4.3 memperlihatkan luas wilayah tiap kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur, berdasarkan data BPS yang terdapat dalam dokumen Kabupaten Cianjur dalam angka tahun 2021, Cakupan wilayah terluas terdapat di Kecamatan Cidaun dengan luas wilayah 295.512,3 km² untuk wilayah Kabupaten Cianjur bagian Selatan, kemudian untuk wilayah Kabupaten Cianjur bagian Utara terdapat di Kecamatan Cikalongkulon dengan luas cakupan 144.022,5 Km². Luas wilayah dari tiap- tiap kecamatan dapat mempengaruhi terhadap rentang kendali pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga aspek luas wilayah ini merupakan salah satu indikator dalam menghitung penataan kecamatan. Selain dari itu, aspek lain yang menjadi indikator penataan kecamatan adalah jumlah desa. Berikut tabel di bawah ini yang merupakan jumlah desa yang terdapat di tiap- tiap kecamatan di Kabupaten Cianjur.

Tabel 4.4**Jumlah Desa di Kabupaten Cianjur berdasarkan Kecamatan**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Agrabinta	12
2.	Bojongpicung	11
3.	Campaka	11
4.	Campakamulya	5
5.	Cianjur	11
6.	Cibeber	18
7.	Cibinong	12
8.	Cidaun	14
9.	Cijati	10
10.	Cikadu	10
11.	Cikalongkulon	18
12.	Cilaku	10
13.	Cipanas	7
14.	Ciranjang	9
15.	Cugenang	16
16.	Gekbrong	8
17.	Haurwangi	8
18.	Kadupandak	14
19.	Karangtengah	16
20.	Leles	12
21.	Mande	13
22.	Naringgul	11
23.	Pacet	7
24.	Pagelaran	14
25.	Pasirkuda	9
26.	Sindangbarang	11
27.	Sukaluyu	10
28.	Sukanagara	10

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
29.	Sukaresmi	11
30.	Takokak	9
31.	Tanggeung	12
32.	Warungkondang	11
Jumlah		360

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.
Cianjur, 2021

Kabupaten Cianjur memiliki 360 desa yang tersebar di 32 Kecamatan. Jumlah desa paling banyak terdapat di Kecamatan Cibeber dan Cikalongkulon dengan jumlah 18 Desa, dan desa paling sedikit terdapat di Kecamatan Campakamulya dengan jumlah 5 desa. Jumlah desa dalam pemetaan kecamatan menjadi salah satu indikator perhitungan yang mana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018, jumlah minimal desa bagi kecamatan baru adalah 10 desa. Sehingga kecamatan yang memiliki desa lebih dari 10 berpotensi untuk bias dilakukan penataan kembali. Berikut gambar Kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Cianjur.

Dari aspek jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah dan jumlah desa di Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Cianjur, nampaknya Kabupaten Cianjur perlu melakukan beberapa penataan kecamatan yang disesuaikan dengan potensi kecamatan. Penataan kecamatan dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan masyarakat agar lebih merata dan mencapai kepuasan masyarakat, kemudian dapat membatasi dan mendekatkan rentang kendali antar masyarakat dengan kantor kecamatan.

Salah satu indikator yang telah nampak untuk dilakukan penataan kecamatan yaitu kecamatan dengan jumlah desa yang lebih dari 10 desa dan jumlah penduduk tiap desa minimal 6000 jiwa atau 1200 KK dan tiap kelurahan 8000 jiwa atau 1600 KK. Maka dengan adanya ketentuan itu, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki kriteria tersebut, diantaranya dapat disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4.5
Potensi Penataan Wilayah berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Cianjur

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Desa
1.	Cikalongkulon	104,619	18
2.	Cibeber	129,362	18
3.	Cugenang	113,124	16
4.	Karangtengah	158,881	16
5.	Cidaun	62,209	14
6.	Kadupandak	50,855	14
7.	Pagelaran	73,146	14
8.	Mande	78,565	12
9.	Tanggeung	48,753	12
10.	Warungkondang	76,165	11
11.	Campaka	67,630	11
12.	Cianjur	171,380	11
13.	Bojongpicung	82,292	11
14.	Sukaresmi	87,503	11

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.
Cianjur, 2021

Terdapat 14 Kecamatan dari 32 Kecamatan yang berada di kabupaten Cianjur dengan katagori berpotensi untuk dilakukan penataan wilayah. Penentuan 14 kecamatan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria jumlah desa yang memiliki jumlah desa lebih dari 11 desa tiap kecamatan dan jumlah penduduk desa tidak kurang 6.000 jiwa atau jumlah penduduk kelurahan tidak kurang dari 8.000 jiwa. Dari 14 kecamatan diatas, kecamatan paling banyak jumlah desa adalah kecamatan Cikalongkulon dan Cibeber dengan masing- masing jumlah penduduk sebanyak 104,619 jiwa untuk Cikalongkulon, dan sebanyak 129,362 jiwa untuk kecamatan Cibeber.

Setelah diperoleh 14 Kecamatan dengan status berpotensi dilakukan penataan wilayah, kemudian dilakukan analisis menggunakan suatu metodologi AHP (*Analytical Hierarchy Process*). AHP merupakan sebuah metode untuk menentukan sebuah pilihan yang paling tepat dari beberapa alternatif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau kriteria tertentu. Dalam melakukan pemetaan kecamatan, indikator pengukuran yang digunakan adalah jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah dan jumlah desa. Dari ke empat indikator tersebut, dapat ditentukan kriteria skala perbandingan pengukuran dan matrix perbandingan berdasarkan metode AHP. Berikut perhitungan AHP dalam menentukan skala perbandingan tiap- tiap indikator.

Tabel 4.6
Tabel skala perbandingan pengukuran dan
matrix perbandingan berpasangan AHP

	Jumlah Penduduk	Luas Kecamatan	Kepadatan	Jumlah Desa	Skor Pengukuran Perbandingan	Rata- rata
Jumlah Penduduk	1	3	0.333	0.167	0.45	0.11
Luas Kecamatan	0.333	1	0.167	0.143	0.22	0.05
Kepadatan	3	6	1	0.333	1.07	0.27
Jumlah Desa	6	7	3	1	2.27	0.57
Jumlah	10.333	17	4.500	1.643	4	1

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

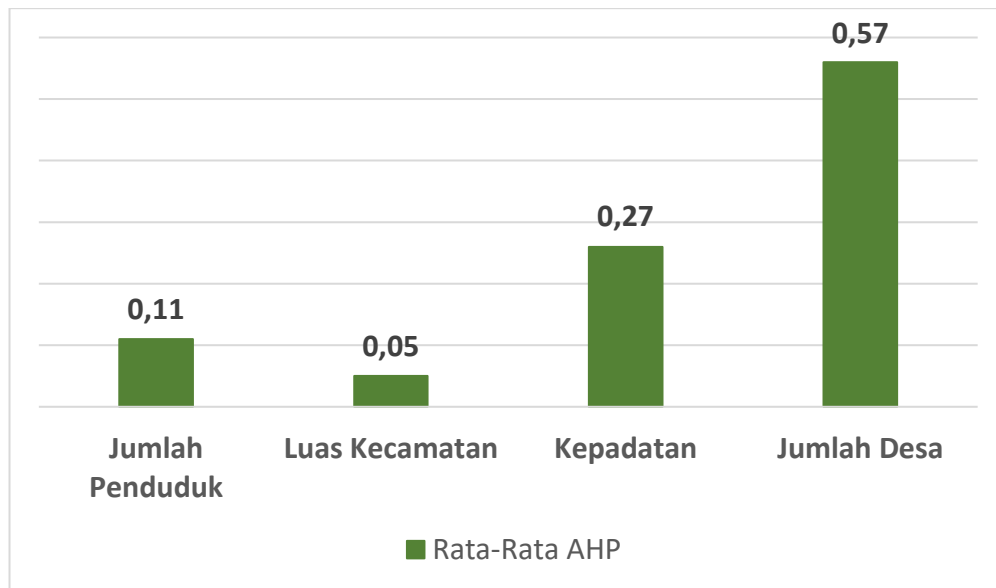
Tabel diatas merupakan perhitungan dalam menentukan indikator yang paling berpengaruh atau berdampak untuk menentukan pemetaan kecamatan diantara empat indikator diatas. Penentuan nilai pada indikator ditentukan berdasarkan subindikator metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Berikut tabel di bawah merupakan ketentuan pemberian skor atau pembobotan perhitungan.

Tabel 4.7
Skala Dasar Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua indikator sama pentingnya
3	Indikator yang satu sedikit lebih penting dari pada Indikator yang lain
5	Indikator yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu indikator jelas lebih mutlak penting dari pada Indikator lainnya
9	Satu Indikator mutlak penting dari pada Indikator lainnya
2,4,6,8	Nilai- nilai antara dua nilai perbandingan yang berdekatan

Setelah menentukan pembobotan berdasarkan tiap- tiap indikator, kemudian dilakukan perengkingan atau urutan prioritas sehingga dari tabel 4.6, maka dapat diperoleh urutan indikator yang paling tinggi dengan memperhatikan nilai rata-rata. Nilai rata- rata yang paling tinggi, merupakan nilai yang memperlihatkan sebuah indikator yang perlu di perhatikan. Berikut Diagram urutan penilaian indikator skala pengukuran dan matrix berpasangan.

Diagram 4.1
Urutan Penilaian Indikator Skala Pengukuran Dan
Matrix Berpasangan



Berdasarkan Diagram diatas, bahwa yang perlu diperhatikan dalam penentuan pemetaan wilayah kecamatan adalah Jumlah desa, kepadatan penduduk, jumlah penduduk dan luas kecamatan. Dari perhitungan AHP, rata – rata indikator jumlah desa memperoleh nilai 0,57, kepadatan 0,27, jumlah penduduk 0,11 dan luas kecamatan 0,05. Sehingga jumlah desa yang berada di tiap- tiap kecamatan merupakan indikator yang paling utama dalam penentuan rekomendasi calon kecamatan baru, kemudian indikator yang kedua lebih penting setelah jumlah desa adalah kepadatan penduduk di wilayah cakupan kecamatan.

4.1.1 Potensi Penataan Kecamatan Berdasarkan Indikator Jumlah Desa

Kemudian untuk menentukan perhitungan kecamatan yang disesuaikan dari tiap- tiap indikator, dapat ditentukan berdasarkan perhitungan (*Analytical Hierarchy Process*). Indikator pertama yang dilakukan adalah indikator jumlah desa dari 14 kecamatan yang berpotensi untuk dapat dilakukan penataan kecamatan baru. Berikut

tabel potensi penataan kecamatan berdasarkan indikator jumlah desa.

Tabel 4.8

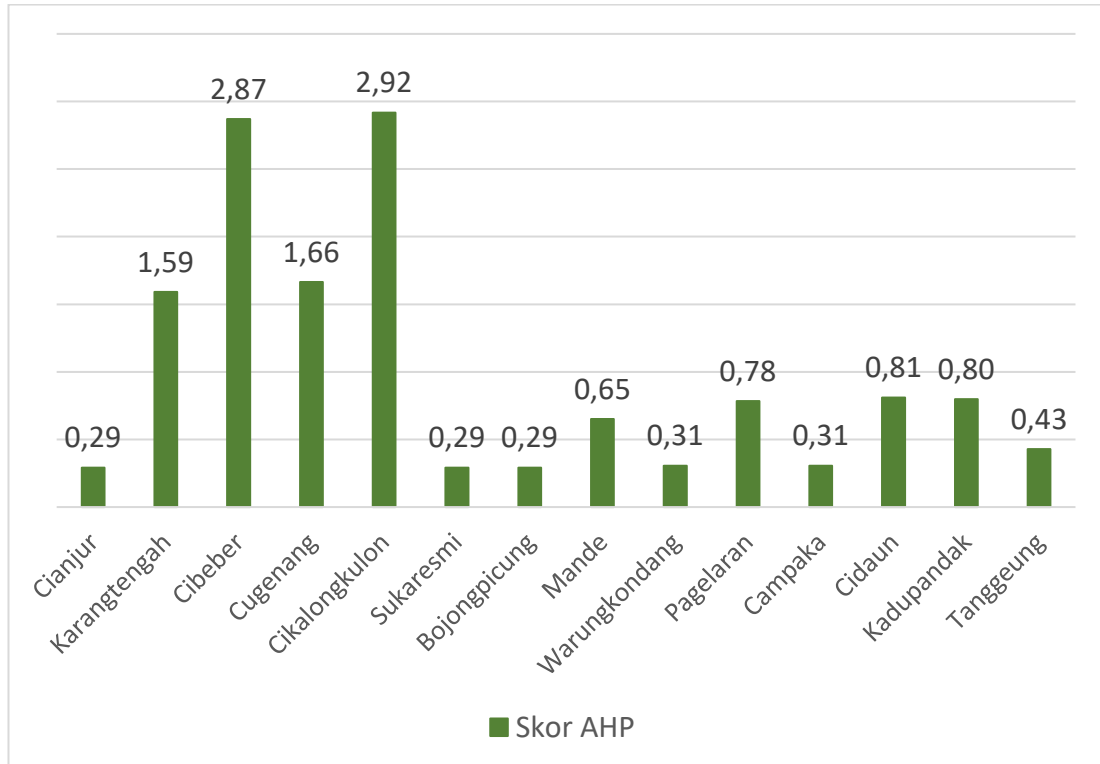
Potensi Penataan Kecamatan Berdasarkan Indikator Jumlah Desa

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Skor Pengukuran Perbandingan	Rata-Rata
1.	Cianjur	11	0.29	0.02
2.	Karangtengah	16	1.59	0.11
3.	Cibeber	18	2.87	0.20
4.	Cugenang	16	1.66	0.12
5.	Cikalongkulon	18	2.92	0.21
6.	Sukaresmi	11	0.29	0.02
7.	Bojongpicung	11	0.29	0.02
8.	Mande	13	0.65	0.05
9.	Warungkondang	11	0.31	0.02
10.	Pagelaran	14	0.78	0.06
11.	Campaka	11	0.31	0.02
12.	Cidaun	14	0.81	0.06
13.	Kadupandak	14	0.80	0.06
14.	Tanggeung	12	0.43	0.03

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Cianjur, 2021

Dari 14 Kecamatan yang berpotensi untuk dilakukannya penataan kecamatan melalui pembentukan kecamatan baru, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki urgensi dilakukannya penataan berdasarkan indikator jumlah desa, dimana desa yang paling banyak jumlahnya diantara 14 kecamatan diatas adalah Kecamatan Cibeber dan Cikalongkulon dengan jumlah desa sebanyak 18 Desa. Adapun tingkat urutan kecamatan yang berpotensi paling tinggi untuk dilakukan penataan melalui pembentukan kecamatan baru, dapat dilihat berdasarkan Diagram di bawah ini.

Diagram 4.2
Skor AHP Potensi Pembentukan Kecamatan Baru Berdasarkan
Jumlah Desa



Dari Diagram diatas, memperlihatkan bahwa berdasarkan indikator jumlah desa, kecamatan yang berpotensi tinggi untuk di lakukan penataan pembentukan kecamatan baru adalah Kecamatan Cikalongkulon dengan skor 2,92 di ikuti oleh Cibeber dengan skor 2,87 dan Kecamatan Cugenang mendapatkan skor 1,66.

Berikut ini urutan dari 1 sampai 14 kecamatan dengan skor AHP berdasarkan indikator jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Cianjur:

1. Kecamatan Cikalongkulon dengan skor 2,29
2. Kecamatan Cibeber dengan skor 2, 87
3. Kecamatan Cugenang dengan skor 1,66
4. Kecamatan Karangtengah dengan skor 1,59
5. Kecamatan Cidaun dengan skor 0,81
6. Kecamatan Kadupandak dengan skor 0,80
7. Kecamatan Pagelaran dengan skor 0,78

8. Kecamatan Mande dengan skor 0,65
9. Kecamatan Tanggeung dengan skor 0,43
10. Kecamatan Warungkondang dengan skor 0,31
11. Kecamatan Campaka dengan skor 0,31
12. Kecamatan Cianjur dengan skor 0,29
13. Kecamatan Sukaresmi dengan skor 0,29
14. Kecamatan Bojongpicung dengan skor 0,29

4.1.2 Potensi Penataan Kecamatan Berdasarkan Indikator Kepadatan Penduduk

Kemudian perhitungan indikator kedua dalam pemetaan pembentukan kecamatan baru adalah kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk yang terdapat dalam satu kecamatan terhadap luas kecamatan. Berikut di bawah ini kepadatan penduduk yang terdapat di 14 kecamatan Kabupaten Cianjur.

Tabel 4.9

Potensi Penataan Kecamatan Berdasarkan Indikator Kepadatan Penduduk

No	Nama Kecamatan	Kepadatan Penduduk	Skor Pengukuran Perbandingan	Rata-Rata
1.	Cianjur	6,468.20	4.75	0.34
2.	Karangtengah	3,188.78	2.31	0.17
3.	Cibeber	986.22	0.74	0.05
4.	Cugenang	1,430.45	1.05	0.08
5.	Cikalongkulon	701.06	0.43	0.03
6.	Sukaresmi	887.47	0.65	0.05
7.	Bojongpicung	916.11	0.71	0.05
8.	Mande	775.04	0.53	0.04
9.	Warungkondang	1,604.16	1.13	0.08
10.	Pagelaran	354.03	0.26	0.02

No	Nama Kecamatan	Kepadatan Penduduk	Skor Pengukuran Perbandingan	Rata-Rata
11.	Campaka	448.57	0.36	0.03
12.	Cidaun	193.69	0.22	0.02
13.	Kadupandak	461.92	0.35	0.02
14.	Tangeung	785.85	0.51	0.04

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.

Cianjur, 2021

Tabel diatas merupakan data 14 kecamatan di Kabupaten Cianjur yang berpotensi mengalami penataan pembentukan kecamatan baru dilihat dari indikator kepadatan penduduk. Tabel tersebut menyajikan kepadatan penduduk, skor hasil pengukuran AHP perbandingan dan rata- rata skor berdasarkan analisis AHP. Kedua skor tersebut merupakan hasil perhitungan, dimana skor yang tinggi merupakan kecamatan yang berpotensi dapat dilakukan penataan dengan cara pembentukan kecamatan baru. Berikut di bawah ini Diagram dari 14 kecamatan yang berpotensi paling tinggi untuk di bentuk kecamatan baru berdasarkan skor AHP.

Diagram 4.2

Skor AHP Potensi Pembentukan Kecamatan Baru Berdasarkan Kepadatan Penduduk

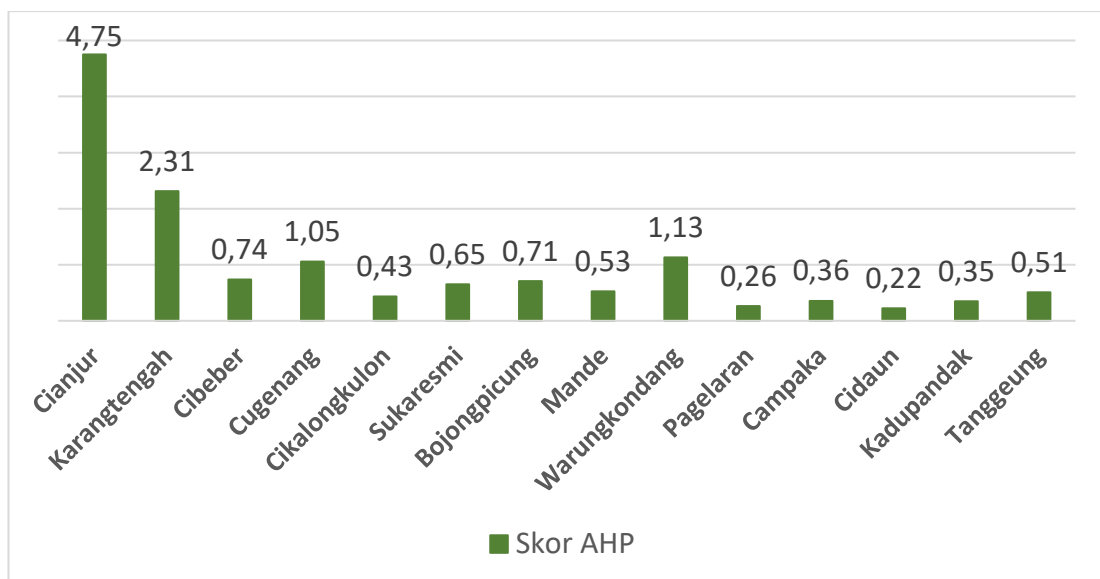


Diagram diatas memperlihatkan hasil pembobotan atau skor urutan berdasarkan indikator kepadatan penduduk di 14 Kecamatan Kabupaten Cianjur. Kecamatan yang memiliki potensi paling tinggi untuk dilakukan penataan adalah kecamatan Cianjur dengan skor AHP 4,75 diikuti kecamatan karangtengah dengan skor 2,31. Berikut ini urutan dari 1 sampai 14 kecamatan dengan skor AHP berdasarkan indikator kepadatan penduduk di Kabupaten Cianjur:

1. Kecamatan Cianjur dengan skor 4,75
2. Kecamatan Karangtengah dengan skor 2,31
3. Kecamatan Warungkondang dengan skor 1,13
4. Kecamatan Cugenang dengan skor 1,05
5. Kecamatan Cibeber dengan skor 0,74
6. Kecamatan Bojongpicung dengan skor 0,71
7. Kecamatan Sukaresmi dengan skor 0,65
8. Kecamatan Mande dengan skor 0,53
9. Kecamatan Tanggeung dengan skor 0,51
10. Kecamatan Cikalongkulon dengan skor 0,43
11. Kecamatan Campaka dengan skor 0,36
12. Kecamatan Kadupandak dengan skor 0,35
13. Kecamatan Pagelaran dengan skor 0,26
14. Kecamatan Cidaun dengan skor 0,22

4.1.3 Potensi Penataan Kecamatan Berdasarkan Indikator Jumlah Penduduk

Indikator ke tiga untuk menentukan perhitungan kecamatan dalam menentukan penataan pembentukan kecamatan baru adalah jumlah penduduk. Indikator ini merupakan perhitungan jumlah penduduk tiap- tiap kecamatan dengan perhitungan skor AHP hasil pengukuran perbandingan dan rata- rata dari jumlah penduduk 14 kecamatan yang telah ditentukan. Berikut di bawah ini tabel 14 kecamatan di cianjur dengan data jumlah penduduk, hasil pengukuran perbandingan AHP dan rata- rata jumlah penduduk dari 14 kecamatan.

Tabel 4.10
Potensi Penataan Kecamatan Berdasarkan Indikator Jumlah Penduduk

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Skor Pengukuran Perbandingan	Rata-Rata
1.	Cianjur	171,380	2.73	0.19
2.	Karangtengah	158,881	2.43	0.17
3.	Cibeber	129,362	1.62	0.12
4.	Cugenang	113,124	1.35	0.10
5.	Cikalongkulon	104,619	1.37	0.10
6.	Sukaesmi	87,503	0.97	0.07
7.	Bojongpicung	82,292	0.73	0.05
8.	Mande	78,565	0.63	0.04
9.	Warungkondang	76,165	0.56	0.04
10.	Pagelaran	73,146	0.49	0.04
11.	Campaka	67,630	0.42	0.03
12.	Cidaun	62,209	0.31	0.02
13.	Kadupandak	50,855	0.23	0.02
14.	Tanggeung	48,753	0.17	0.01

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.
Cianjur, 2021

Tabel diatas merupakan data 14 kecamatan di Kabupaten Cianjur yang berpotensi mengalami penataan pembentukan kecamatan baru dilihat dari indikator jumlah penduduk. Tabel tersebut menyajikan jumlah penduduk, skor AHP hasil pengukuran perbandingan dan rata- rata skor berdasarkan analisis AHP. Kedua skor tersebut merupakan hasil perhitungan, dimana skor yang tinggi merupakan kecamatan yang berpotensi dapat dilakukan penataan dengan cara pembentukan kecamatan baru. Berikut di bawah ini Diagram dari 14 kecamatan yang berpotensi paling tinggi untuk di bentuk kecamatan baru berdasarkan skor AHP.

Diagram 4.3
Skor AHP Potensi Pembentukan Kecamatan Baru Berdasarkan
Jumlah Penduduk

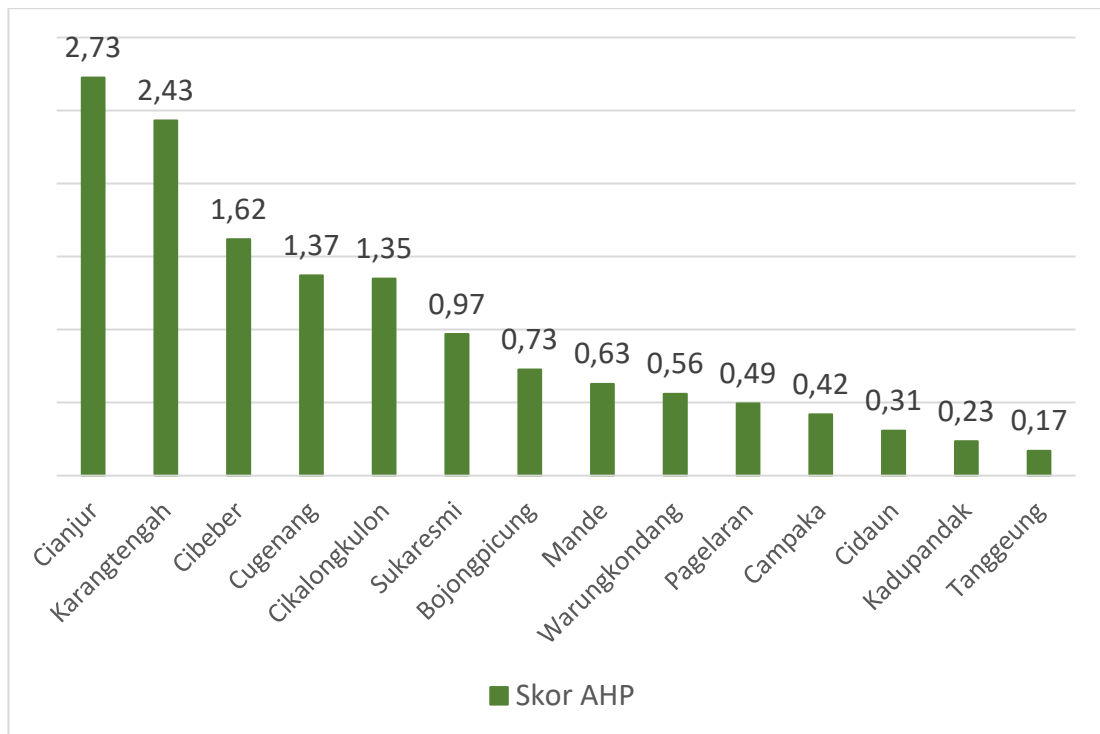


Diagram diatas memperlihatkan hasil pembobotan atau skor urutan berdasarkan indikator jumlah penduduk di 14 Kecamatan Kabupaten Cianjur. Kecamatan yang memiliki potensi paling tinggi untuk dilakukan penataan adalah kecamatan Cianjur dengan skor AHP 2,73 diikuti kecamatan karangtengah dengan skor 2,43. Berikut ini urutan dari 1 sampai 14 kecamatan dengan skor AHP berdasarkan indikator jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur:

1. Kecamatan Cianjur dengan skor 2,73
2. Kecamatan Karangtengah dengan skor 2,43
3. Kecamatan Cibeber dengan skor 1,62
4. Kecamatan Cugenang dengan skor 1,37
5. Kecamatan Cikalongkulon dengan skor 1,35
6. Kecamatan Sukaresmi dengan skor 0,97
7. Kecamatan Bojongpicung dengan skor 0,73
8. Kecamatan Mande dengan skor 0,63
9. Kecamatan Warungkondang dengan skor 0,56
10. Kecamatan Pagelaran dengan skor 0,49

11. Kecamatan Campaka dengan skor 0,42
12. Kecamatan Cidaun dengan skor 0,31
13. Kecamatan Kadupandak dengan skor 0,23
14. Kecamatan Tanggeung dengan skor 0,17

4.1.4 Potensi Penataan Kecamatan Berdasarkan Indikator Luas Kecamatan

Indikator ke empat untuk menentukan perhitungan kecamatan dalam menentukan penataan pembentukan kecamatan baru adalah luas kecamatan. Indikator ini merupakan perhitungan luas kecamatan dari tiap- tiap kecamatan dengan perhitungan skor AHP hasil pengukuran perbandingan dan rata- rata dari jumlah penduduk 14 kecamatan yang telah ditentukan. Berikut di bawah ini tabel 14 kecamatan di Cianjur dengan data luas kecamatan, hasil pengukuran perbandingan AHP dan rata- rata luas kecamatan.

Tabel 4.11
Potensi Penataan Kecamatan Berdasarkan Indikator Luas Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Luas Kecamatan (km²)	Skor Pengukuran Perbandingan	Rata-Rata
1.	Cianjur	26,147.0	0.24	0.02
2.	Karangtengah	48,525.1	0.31	0.02
3.	Cibeber	124,729.7	1.02	0.07
4.	Cugenang	76,153.9	0.48	0.03
5.	Cikalongkulon	144,022.5	1.29	0.09
6.	Sukaresmi	92,153.4	0.63	0.05
7.	Bojongpicung	88,339.4	0.58	0.04
8.	Mande	98,794.7	0.63	0.05
9.	Warungkondang	45,157.5	0.29	0.02
10.	Pagelaran	199,436.6	2.20	0.16
11.	Campaka	143,747.6	1.20	0.09

No	Nama Kecamatan	Luas Kecamatan (km ²)	Skor Pengukuran Perbandingan	Rata-Rata
12.	Cidaun	295,512.3	4.08	0.29
13.	Kadupandak	104,407.8	0.71	0.05
14.	Tanggeung	59,801.5	0.35	0.03

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.

Cianjur, 2021

Tabel diatas merupakan data 14 kecamatan di Kabupaten Cianjur yang berpotensi mengalami penataan pembentukan kecamatan baru dilihat dari indikator luas kecamatan. Tabel tersebut menyajikan luas kecamatan per km², skor AHP hasil pengukuran perbandingan dan rata- rata skor berdasarkan analisis AHP. Kedua skor tersebut merupakan hasil perhitungan dimana skor yang tinggi merupakan kecamatan yang berpotensi dapat dilakukan penataan dengan cara pembentukan kecamatan baru. Berikut di bawah ini Diagram dari 14 kecamatan yang berpotensi paling tinggi untuk di bentuk kecamatan baru berdasarkan skor AHP.

Diagram 4.4

Skor AHP Potensi Pembentukan Kecamatan Baru Berdasarkan Luas Kecamatan

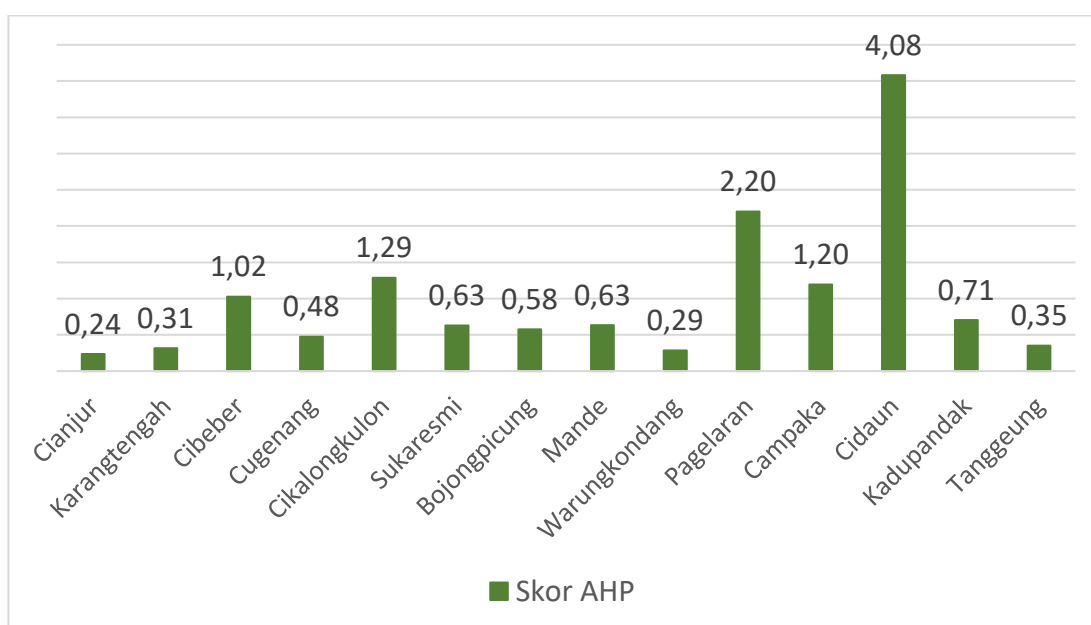


Diagram diatas memperlihatkan hasil pembobotan atau skor urutan berdasarkan indikator luas wilayah di 14 Kecamatan Kabupaten Cianjur. Kecamatan yang memiliki potensi paling tinggi untuk dilakukan penataan adalah kecamatan Cidaun dengan skor 4,08 diikuti kecamatan pagelaran dengan skor 2,20 . Berikut ini urutan dari 1 sampai 14 kecamatan dengan skor AHP berdasarkan indikator jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur:

1. Kecamatan Cidaun dengan skor 4,08
2. Kecamatan Pagelaran dengan skor 2,20
3. Kecamatan Cikalongkulon dengan skor 1,29
4. Kecamatan Campaka dengan skor 1,20
5. Kecamatan Cibeber dengan skor 1,02
6. Kecamatan Kadupandak dengan skor 0.71
7. Kecamatan Mande dengan skor 0,63
8. Kecamatan Sukaresmi dengan skor 0,63
9. Kecamatan Bojongpicung dengan skor 0,58
10. Kecamatan Cugenang dengan skor 0,48
11. Kecamatan Tanggeung dengan skor 0,35
12. Kecamatan Karangtengah dengan skor 0,31
13. Kecamatan Warungkondang dengan skor 0,29
14. Kecamatan Cianjur dengan skor 0,24

4.2 Skor AHP Keseluruhan berdasarkan Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan

Setelah dihitung masing- masing indikator dan telah diketahui skor perhitungan AHP, kemudian ditentukan skor secara keseluruhan berdasarkan empat indikator yang telah ditentukan. Ke empat indikator seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan dihitung untuk 14 kecamatan yang telah masuk kepada kriteria pemetaan kecamatan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan.

Berikut tabel yang menyajikan data dari masing- masing indikator dan skor perhitungan AHP.

Tabel 4.12

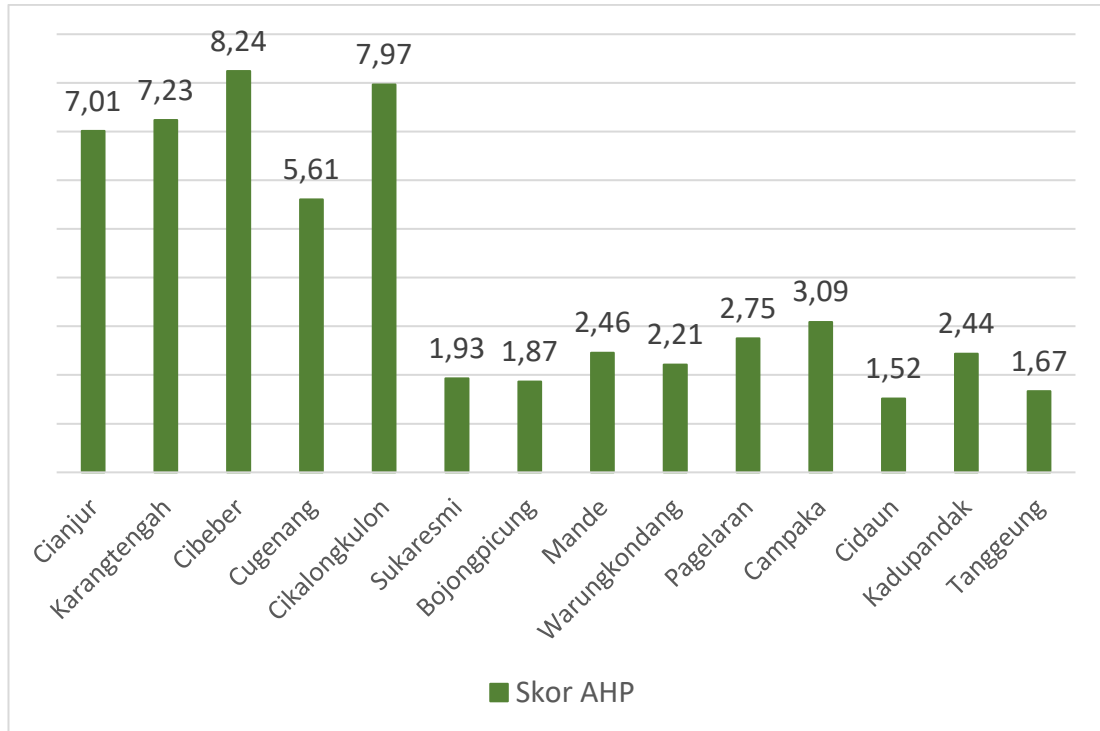
Skor Perbandingan Pengukuran AHP dari Setiap Indikator

No	Nama Kecamatan	Skor Jumlah Desa	Skor Kepadatan	Skor Jumlah Penduduk	Skor Luas Wilayah	Rata-Rata
1.	Cianjur	0.29	4.75	2.73	0.24	7.01
2.	Karangtengah	1.59	2.31	2.43	0.31	7.23
3.	Cibeber	2.87	0.74	1.62	1.02	8.24
4.	Cugenang	1.66	1.05	1.35	0.48	5.61
5.	Cikalongkulon	2.92	0.43	1.37	1.29	7.97
6.	Sukaesmi	0.29	0.65	0.97	0.63	1.93
7.	Bojongpicung	0.29	0.71	0.73	0.58	1.87
8.	Mande	0.65	0.53	0.63	0.63	2.46
9.	Warungkondang	0.31	1.13	0.56	0.29	2.21
10.	Pagelaran	0.78	0.26	0.49	2.20	2.75
11.	Campaka	0.31	0.36	0.42	1.20	3.09
12.	Cidaun	0.81	0.22	0.31	4.08	1.52
13.	Kadupandak	0.80	0.35	0.23	0.71	2.44
14.	Tanggeung	0.43	0.51	0.17	0.35	1.67

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

Tabel diatas menyajikan skor dari setiap indikator penataan pembentukan kecamatan baru dari setiap kecamatan yang berpotensi dapat dilakukan pembentukan kecamatan baru. Berdasarkan skor AHP yang telah di dapat, kemudian di rata- rata kan maka kecamatan yang masuk rekomendasi dilakukan pemekaran paling tinggi adalah kecamatan cibeber dengan skor rata- rata 8,24 dan kecamatan Cikalongkulon dengan skor 7,97. Adapun urutan kecamatan sesuai dengan skor rata- rata dapat dilihat berdasarkan diagram di bawah ini.

Diagram 4.5
Skor AHP Potensi Pembentukan Kecamatan
Baru Berdasarkan Indikator Jumlah Desa,
Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan
Luas Wilayah



Sumber : Diolah oleh peneliti, 2021

Diagram diatas merupakan gambaran kecamatan yang memiliki potensi paling tinggi direkomendasikan sebagai kecamatan yang layak untuk dilakukan penataan kecamatan dalam bentuk pembentukan kecamatan baru. Terlihat dalam diagram diatas bahwa kecamatan dengan rekomendasi paling tinggi untuk dilakukan penataan adalah kecamatan Cibeber dengan skor paling tinggi mencapai 8,24. Disusul oleh Kecamatan Cikalongkulon dengan skor 7,97. Berikut urutan dari 1 sampai 14 kecamatan dengan skor AHP berdasarkan rata-rata semua indikator di Kabupaten Cianjur:

1. Kecamatan Cibeber dengan skor 8,24
2. Kecamatan Cikalongkulon dengan skor 7,97
3. Kecamatan Karangtengah dengan skor 7,23
4. Kecamatan Cianjur dengan skor 7,01
5. Kecamatan Cugenang dengan skor 5,61

6. Kecamatan Campaka dengan skor 3,09
7. Kecamatan Pagelaran dengan skor 2,75
8. Kecamatan Mande dengan skor 2,46
9. Kecamatan Kadupandak dengan skor 2,44
10. Kecamatan Warungkondang dengan skor 2,21
11. Kecamatan Sukaresmi dengan skor 1,93
12. Kecamatan Bojongpicung dengan skor 1,87
13. Kecamatan Tanggeung dengan skor 1,67
14. Kecamatan Cidaun dengan skor 1,52

4.3 Rekomendasi Pembentukan Kecamatan Baru Berdasarkan Penataan Kecamatan di Kabupaten Cianjur

Konsep penyesuaian kecamatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam peraturan tersebut penyesuaian kecamatan merupakan bagian dari sebuah konsep penataan kecamatan. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa penataan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pembentukan Kecamatan, Penggabungan Kecamatan dan Penyesuaian Kecamatan. Pengertian penyesuaian kecamatan merupakan kegiatan perubahan wilayah kecamatan, perubahan nama kecamatan, perubahan nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota kecamatan dan perubahan nama ibu kota kecamatan.

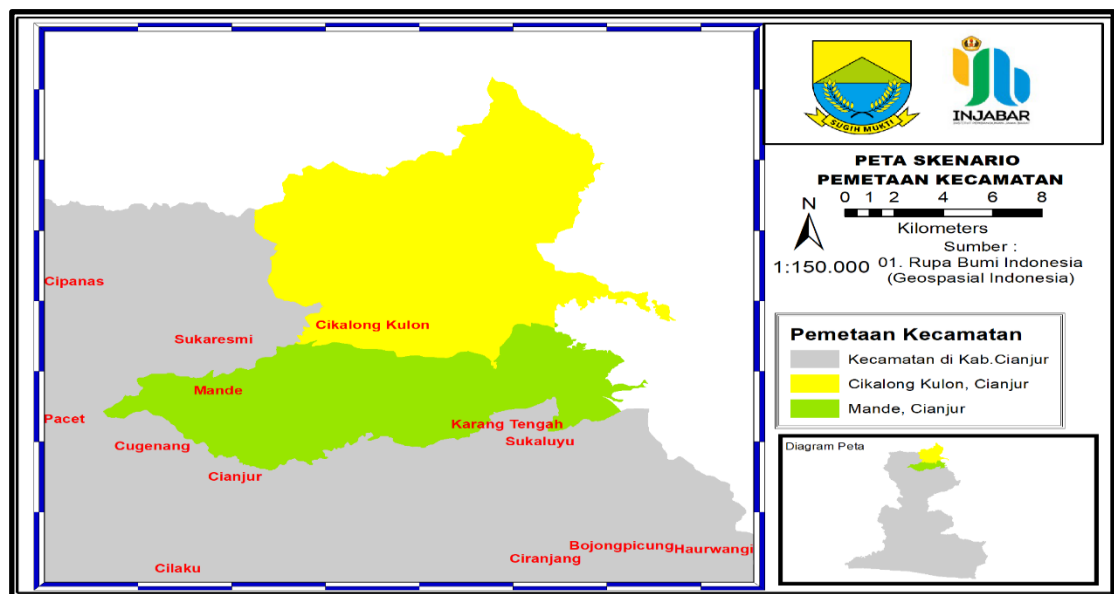
Berdasarkan konsep penataan kecamatan, sebagaimana meliputi Pembentukan Kecamatan, Penggabungan Kecamatan dan Penyesuaian Kecamatan, maka terdapat beberapa skenario yang berpotensi dan termasuk direkomendasikan untuk pembentukan kecamatan baru di Kabupaten Cianjur. Kecamatan- kecamatan yang masuk ke dalam rekomendasi merupakan kecamatan yang telah di hitung dan dianalisis berdasarkan perhitungan AHP (*Analytical Hierarchy Proses*). Berikut adalah rekomendasi penataan kecamatan di Kabupaten Cianjur.

4.3.1 Skenario 1 Rekomendasi Kecamatan (Cikalongkulon-Mande)

Berdasarkan hasil analisis AHP (*Analytical Hierarchy Proses*) kemudian di sesuaikan dengan konsep penyesuaian kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka didapat kecamatan yang berpotensi melakukan pembentukan kecamatan baru diantara kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande. Hasil analisis perhitungan AHP, Kecamatan Cikalongkulon mendapatkan skor 7,97 menempati urutan ke dua dari kecamatan di kabupaten Cianjur yang masuk rekomendasi dilakukan penataan, kemudian kecamatan Mande mendapatkan skor 2,46 menempati posisi ke delapan dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur. Penentuan selanjutnya berdasarkan konsep Penyesuaian Kecamatan, Cikalongkulon dan Mande merupakan kecamatan yang berdampingan dan memenuhi indikator dari penataan kecamatan. Sehingga kecamatan tersebut dapat direkomendasikan dalam penataan kecamatan. Berikut peta kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande.

Gambar 4.2

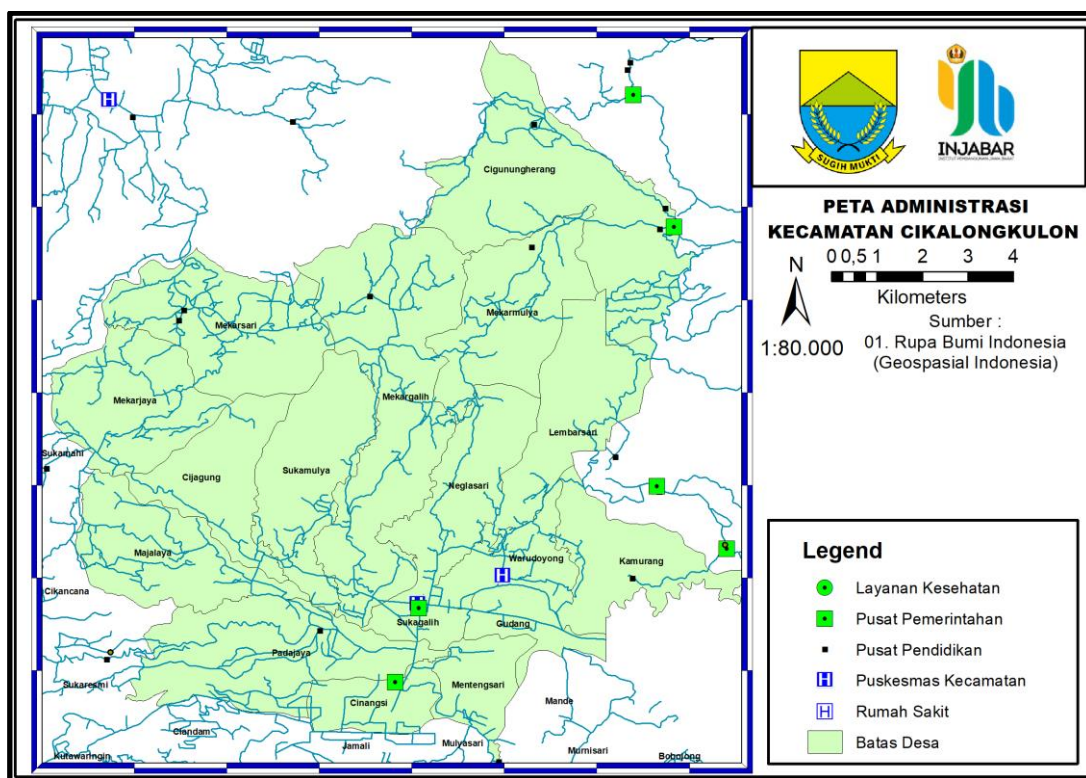
**Peta Penataan Kecamatan Cikalongkulon
dan Kecamatan Mande**



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

Gambar 4.3

Peta Administrasi Kecamatan Cikalongkulon



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

a. Gambaran Umum Kecamatan Cikalongkulon

Kecamatan Cikalongkulon merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur bagian Utara, mempunyai batas wilayah untuk bagian utara berbatasan dengan kabupaten Bogor, Selatan berbatasan dengan kecamatan Mande, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan bagian barat berbatasan dengan kecamatan Sukaresmi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Kecamatan Cikalongkulon pada semester 1 tahun 2021 mencapai 104.619 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 53,401 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 51.218 jiwa. Yang tersebar di tiap-tiap desa dengan fasilitas pendukung pemerintahan diantaranya terdapat Kantor kecamatan, kantor BKKBN, Kantor BPP Pertanian, Pasar Cikalongkulon, Puskesmas Cikalongkulon, Kantor Polsek, Kantor Koramil dll.

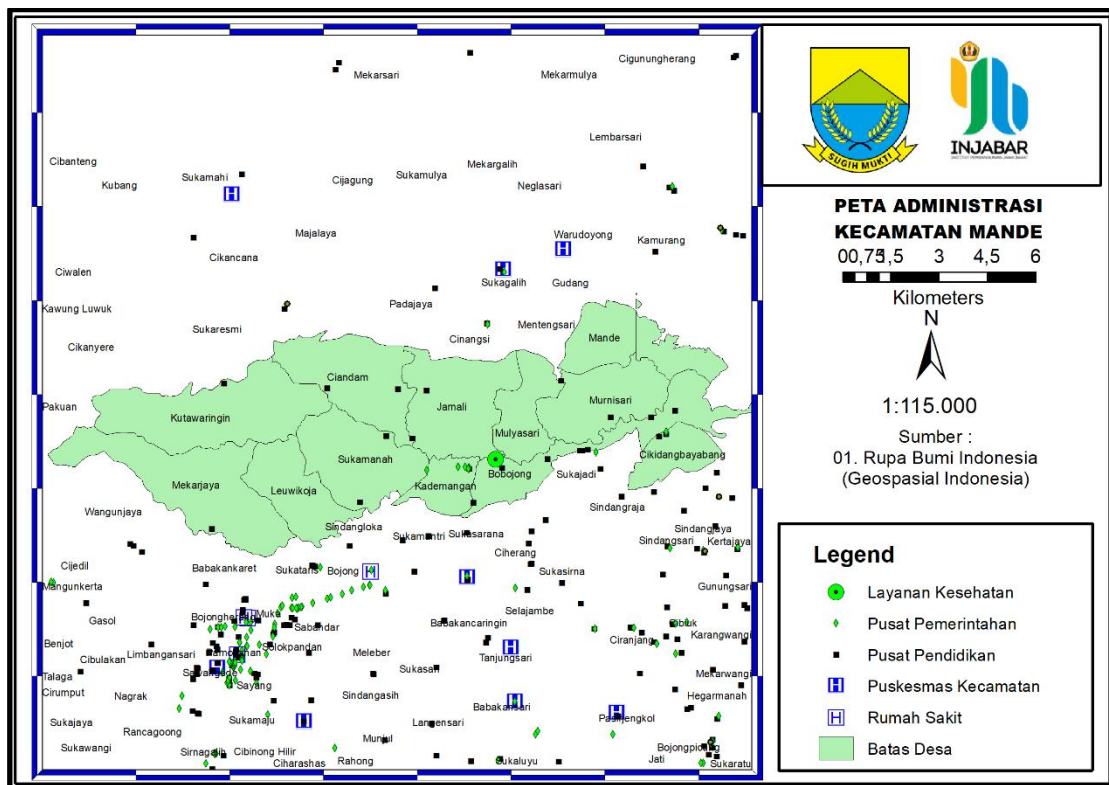
Kemudian Kecamatan Cikalongkulon memiliki luas wilayah 144.022,5 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 701.06 km²

yang tersebar di 18 Desa. Keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Cikalongkulon menjadi salah satu kecamatan yang perlu dilakukan penataan kecamatan.

b. Gambaran Umum Kecamatan Mande

Gambar 4.4

Peta Administrasi Kecamatan Mande



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

Kecamatan Mande merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur berbatasan dengan kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Sukaesmi untuk bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Sukaluyu dan Ciranjang, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Cugenang. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Kecamatan Mande pada semester 1 tahun 2021 mencapai 78.565 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 40.244 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 38.321 jiwa. Yang tersebar di tiap-tiap desa dengan fasilitas pendukung pemerintahan diantaranya terdapat Kantor kecamatan, pasar desa, Kantor Polsek, Kantor Koramil dll.

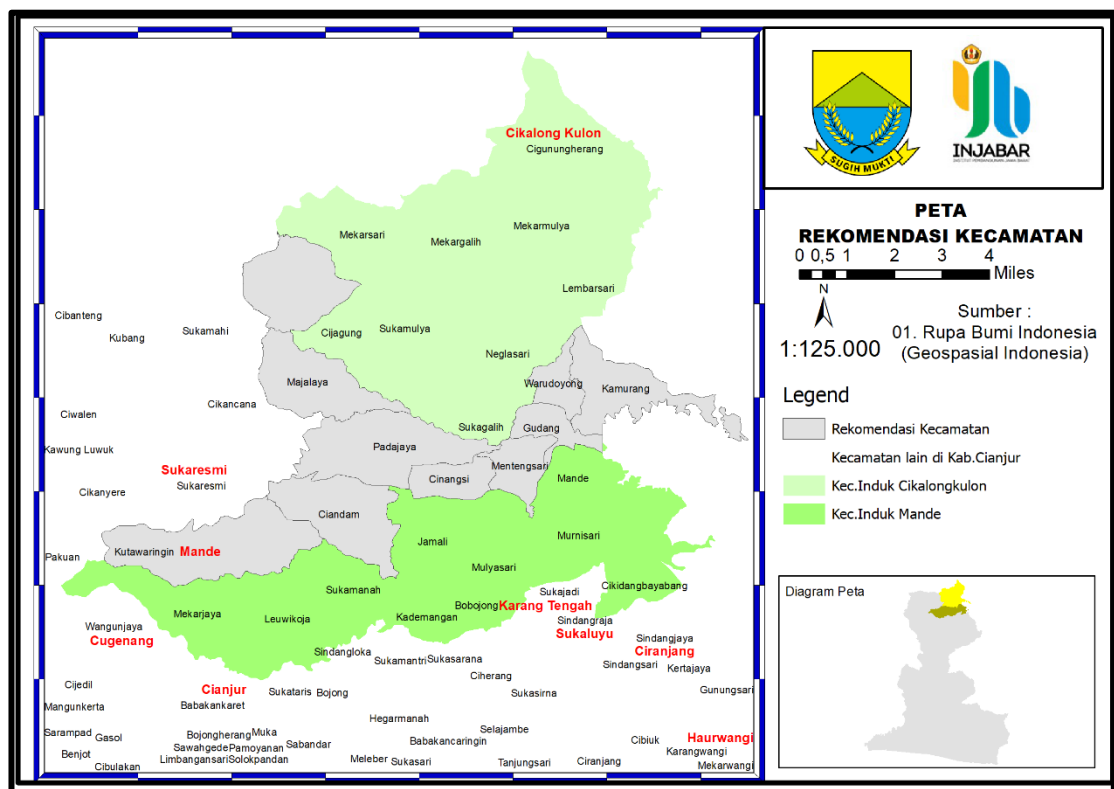
Kemudian Kecamatan Mande yang memiliki luas wilayah 78.794,7 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 775,04 km² yang tersebar di 12 Desa. Keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Mande menjadi salah satu kecamatan yang perlu dilakukan penataan kecamatan.

c. Rekomendasi Pembentukan Kecamatan

Pembentukan kecamatan baru yang direkomendasikan merupakan kecamatan yang berada di antara Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande. Rekomendasi tersebut muncul atas analisis AHP (*Analytical Hierarchy Proses*) dengan mempertimbangkan aspek jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah desa, luas wilayah dan aspek pendukung lainnya kemudian mempertimbangkan konsep penyesuaian kecamatan yang meliputi fasilitas pendukung seperti sarana prasarana yang berada di dalam kecamatan. Berikut peta administratif rekomendasi kecamatan antara Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande.

Gambar 4.5

Peta Skenario 1 Rekomendasi Kecamatan



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

Rekomendasi kecamatan terdiri dari berbagai desa yang berpotensi untuk masuk ke dalam kecamatan baru. Desa- desa yang terkatagori masuk ke dalam kecamatan rekomendasi merupakan desa yang telah dianalisis dan dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti aspek penduduk, kwilayahan dan fasilitas pendukung. Berikut di bawah ini nama desa yang tergabung dalam kecamatan baru yang direkomendasikan.

Tabel 4.13

Daftar Desa pada Skenario 1 Rekomendasi Kecamatan

No	Kecamatan	Desa	Koordinat Desa	
			Koordinat Bujur	Koordinat Lintang
1.	Cikalongkulon	Gudang	107,224,945	-6,732,918
2.	Cikalongkulon	Cinangsi	107,187,183	-6,729,888
3.	Cikalongkulon	Majalaya	107,171,375	-6,712,672
4.	Cikalongkulon	Kamurang	107,291,481	-6,729,273
5.	Cikalongkulon	Warudoyong	107,235,794	-6,718,251
6.	Cikalongkulon	Mekarjaya	107,162,155	-6,683,657
7.	Cikalongkulon	Padajaya	107,174,267	-6,730,809
8.	Cikalongkulon	Mentengsari	107,125,732	6,433,334
9.	Mande	Ciandam	107.182524	-6.7468
10.	Mande	Kutawaringin	107,740"E	-6,452"S

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Rekomendasi kecamatan yang dilakukan diantara Kecamatan Mande dan Kecamatan Cikalongkulon terdapat 10 desa. Penentuan jumlah desa sebanyak 10 desa merupakan salah satu syarat minimal dilakukannya pembentukan kecamatan baru. 10 desa tersebut terdiri dari 8 desa diambil dari kecamatan Cikalongkulon, dan 2 desa diambil dari kecamatan Mande. Sehingga jumlah tersebut berdasarkan indikator jumlah desa telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Adapun aspek lain yang menjadi indikator pembentukan

kecamatan adalah jumlah penduduk. Berikut di bawah ini tabel jumlah penduduk desa di kecamatan rekomendasi.

Tabel 4.14
Daftar Desa pada Skenario 1 Rekomendasi
Kecamatan berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Desa	Jumlah		Jumlah Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Cikalongkulon	Gudang	4,783	4,554	9,337
2.	Cikalongkulon	Cinangsi	3,566	3,522	7,088
3.	Cikalongkulon	Majalaya	4,058	3,851	7,909
4.	Cikalongkulon	Kamurang	1,446	1,293	2,739
5.	Cikalongkulon	Warudoyong	2,813	2,705	5,518
6.	Cikalongkulon	Mekarjaya	3,073	2,902	5,975
7.	Cikalongkulon	Padajaya	3236	3,099	6,335
8.	Cikalongkulon	Mentengsari	3372	3,228	6,600
9.	Mande	Ciandam	2988	2,895	5,883
10.	Mande	Kutawaringin	2003	1,773	3,776
Jumlah			31,338	29,822	61,160

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan jumlah penduduk, rekomendasi kecamatan pada skenario satu memiliki jumlah penduduk sebanyak 61.160 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 31.338 jiwa dan perempuan sebanyak 29.822 jiwa. Kemudian Desa dengan penduduk terbanyak adalah Desa Gudang dengan jumlah penduduk sebesar 9.337 jiwa dan Desa dengan penduduk terendah adalah Desa Kamurang dengan jumlah penduduk sebanyak 2.739 jiwa. Keadaan tersebut kemudian disesuaikan dengan salah satu syarat pembentukan kecamatan dari indikator jumlah penduduk minimal berdasarkan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu untuk kecamatan baru, jumlah minimal penduduk untuk setiap desa adalah 6.000 jiwa atau 1.200 KK. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam rekomendasi kecamatan pada skenario 1, ada beberapa desa yang tidak memiliki

penduduk lebih dari 6.000 jiwa, seperti Desa Kamurang, Desa Warudoyong, Desa Mekarjaya, Desa Ciandam dan Desa Kutawaringin.

Selain dari aspek jumlah penduduk, indikator lain untuk mendukung pembentukan kecamatan baru adalah luas wilayah yang tersedia di Kecamatan yang direkomendasikan. Berikut luas wilayah tiap desa dari kecamatan yang direkomendasikan.

Tabel 4.15
Daftar Desa pada Skenario 1 Rekomendasi
Kecamatan berdasarkan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (ha)
1.	Cikalongkulon	Gudang	425,23
2.	Cikalongkulon	Cinangsi	451,31
3.	Cikalongkulon	Majalaya	911,62
4.	Cikalongkulon	Kamurang	1.389,40
5.	Cikalongkulon	Warudoyong	347,29
6.	Cikalongkulon	Mekarjaya	1.054,25
7.	Cikalongkulon	Padajaya	859,00
8.	Cikalongkulon	Mentengsari	426,35
9.	Mande	Ciandam	839,22
10.	Mande	Kutawaringin	1.131,79
Jumlah			7.835,45
			78.354,5 km ²

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.

Cianjur, 2021

Luas wilayah pada skenario satu rekomendasi kecamatan memiliki luas wilayah 7.835,45 ha atau 78.354,5 km². Luas wilayah tersebut terdiri dari luas setiap desa yang berada di dalam cakupan kecamatan yang direkomendasikan, yang mana desa terluas terdapat di Desa Kamurang dengan luas 1.389,40 ha dan desa dengan luas terkecil terdapat di desa warudoyong sebesar 347,29 km². Keadaan tersebut kemudian disesuaikan dengan salah satu syarat pembentukan kecamatan dari indikator luas wilayah minimal

cakupan kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu untuk kecamatan baru, jumlah minimal luas wilayah adalah 7,5 km². Memperhatikan hal tersebut, maka dalam rekomendasi kecamatan pada skenario 1, luas wilayah cakupan rekomendasi kecamatan pada skenario 1 telah telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Kemudian aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan kecamatan adalah fasilitas pendukung di kecamatan yang direkomendasikan. Berikut di bawah ini aspek- aspek pendukung tiap-tiap desa di kecamatan yang masuk kedalam rekomendasi atau skenario satu. Aspek tersebut terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, pusat pelayanan pemerintahan, pusat ekonomi, pusat keamanan seperti polsek dan koramil.

Tabel 4.16
Fasilitas Pendukung pada Kecamatan yang
direkomendasikan

No	Kecamatan	Desa	Pendidikan			Sarana Publik
			SD	SLTP	SLTA	
1.	Cikalongkulon	Gudang	4	2	1	Kantor PSDAP
2.	Cikalongkulon	Cinangsi	3	0	2	- Kantor Polsek - UPTD PUPR
3.	Cikalongkulon	Majalaya	5	2		-
4.	Cikalongkulon	Kamurang	2	3	2	-
5.	Cikalongkulon	Warudoyong	4	1	-	-
6.	Cikalongkulon	Mekarjaya	4	2	1	-
7.	Cikalongkulon	Padajaya	5	2	1	-
8.	Cikalongkulon	Mentengsari	3	2	1	-
9.	Mande	Ciandam	4	-	-	-

No	Kecamatan	Desa	Pendidikan			Sarana Publik
			SD	SLTP	SLTA	
10.	Mande	Kutawaringin	2	-	-	-
Jumlah			36	12	8	

Sumber : : Bappeda Kab. Cianjur, 2021

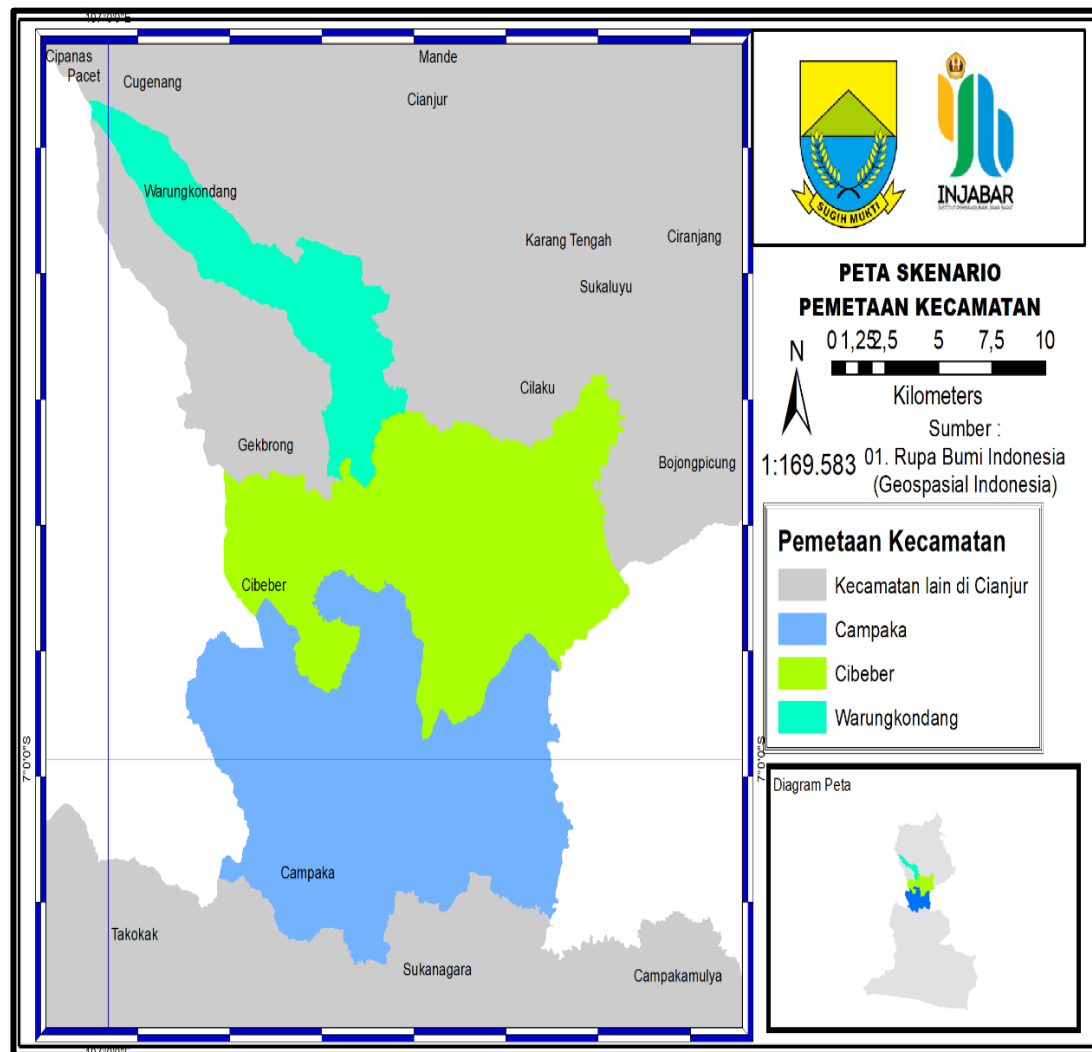
Fasilitas pendukung yang terdapat di kecamatan pada skenario satu rekomendasi kecamatan terdiri dari beberapa aspek, dari aspek Pendidikan terdapat 36 Sekolah Dasar, sebanyak 12 Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan terdapat 8 untuk Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Adapun sarana publik yang termasuk ke dalam kantor pelayanan publik yaitu kantor Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan di Desa Gudang, Kantor Polsek dan Kantor UPTD PUPR Cikalongkulon terdapat di Desa Cinangsi. Aspek pendukung tersebut merupakan salah satu syarat dalam pembentukan kecamatan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

4.3.2 Skenario 2 Rekomendasi Kecamatan (Warungkondang – Cibeber - Campaka)

Berdasarkan hasil analisis AHP (*Analytical Hierarchy Proses*) kemudian di sesuaikan dengan konsep penyesuaian kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka didapat kecamatan yang berpotensi melakukan pembentukan kecamatan baru diantara kecamatan Warungkondang , Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka. Hasil analisis perhitungan AHP, Kecamatan Warungkondang mendapatkan skor 2,21 menempati urutan ke sepuluh dari kecamatan di kabupaten Cianjur yang masuk rekomendasi dilakukan penataan, kemudian kecamatan Cibeber mendapatkan skor 8,24 menempati posisi pertama dan kecamatan Campaka mendapat skor 3,39 menempati urutan ke enam dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur. Penentuan selanjutnya berdasarkan konsep Penyesuaian Kecamatan, Kecamatan Warungkondang, Cibeber dan Campaka merupakan kecamatan yang berdampingan dan memenuhi indikator dari

penataan kecamatan. Sehingga kecamatan tersebut dapat direkomendasikan dalam penataan kecamatan. Berikut peta kecamatan Warungkondang, Cibeber dan Campaka.

Gambar 4.5
Peta Penataan Kecamatan Warungkondang,
Cibeber dan Campaka

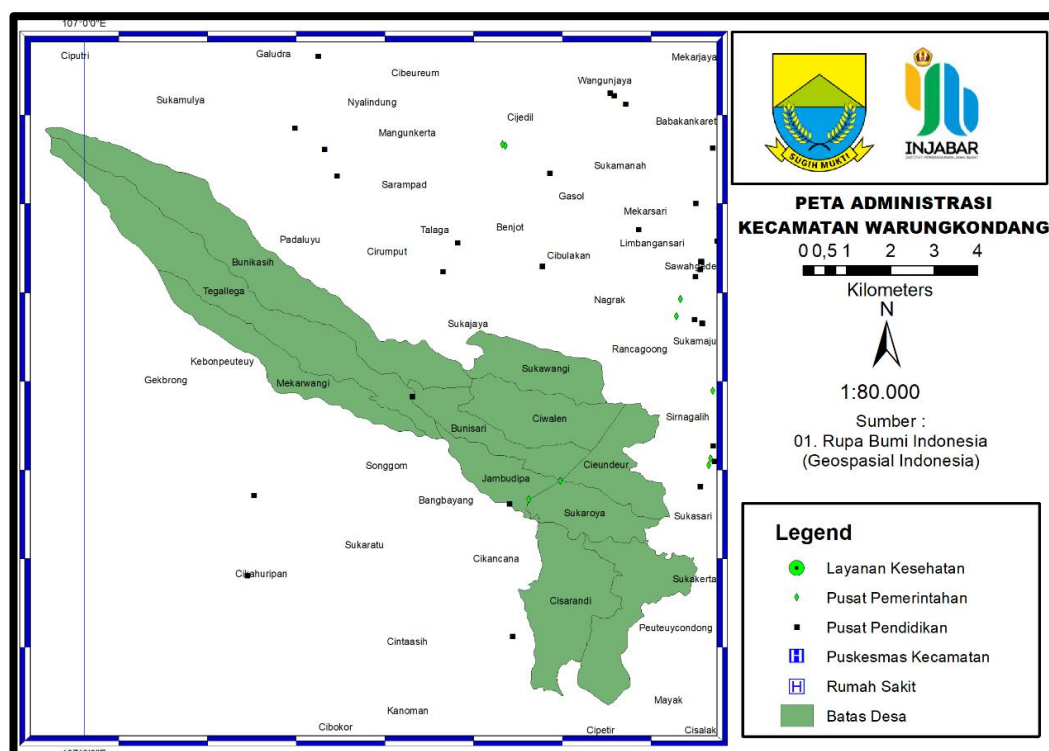


Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

a. Gambaran Umum Kecamatan Warungkondang

Gambar 4.6

Peta Administrasi Kecamatan Warungkondang



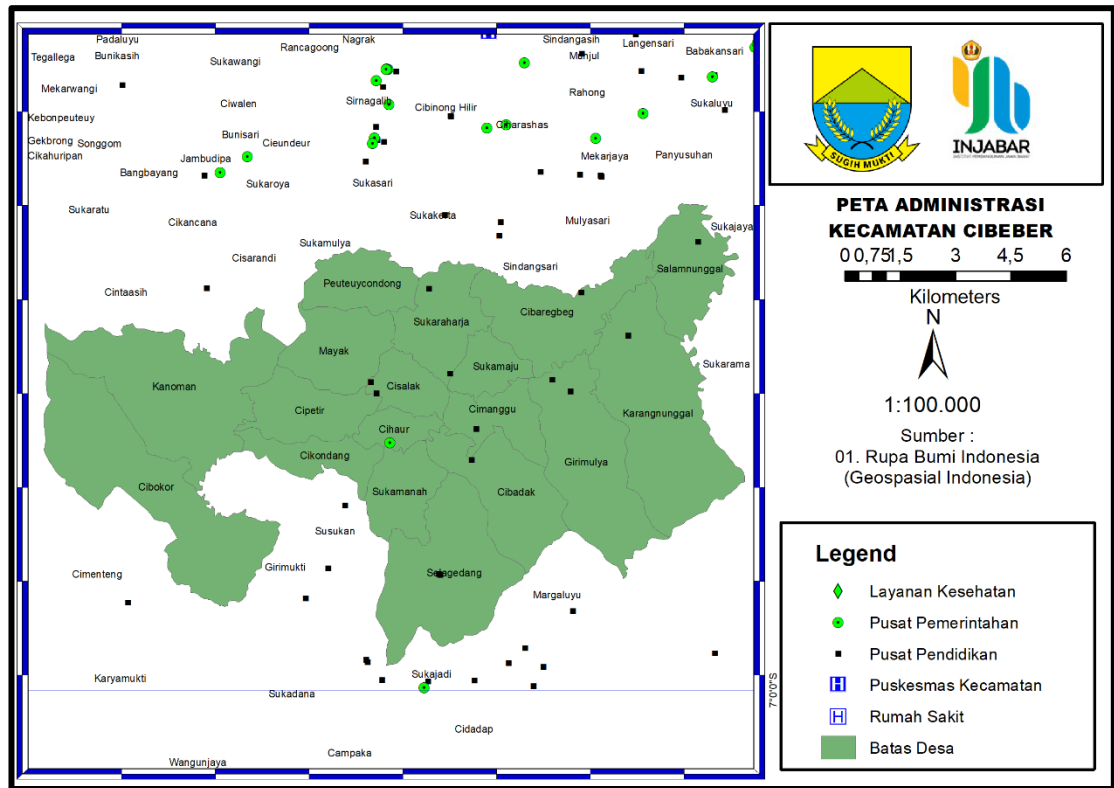
Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

Kecamatan Warungkondang merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur, mempunyai batas wilayah untuk bagian utara berbatasan dengan kecamatan Cugenang, Selatan berbatasan dengan kecamatan Gekbrong dan Cibeber, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Ciluku dan Cianjur dan bagian barat berbatasan dengan kecamatan Gekbrong. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Kecamatan Warungkondang pada semester 1 tahun 2021 mencapai 76.165 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 38.831 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 37.334 jiwa. Kemudian Kecamatan Warungkondang memiliki luas wilayah 45.157,5 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 1.604,16 jiwa/km² yang tersebar di 11 Desa. Keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Warungkondang menjadi salah satu kecamatan yang perlu dilakukan penataan kecamatan.

b. Gambaran Umum Kecamatan Cibeber

Gambar 4.7

Peta Administrasi Kecamatan Cibeber



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

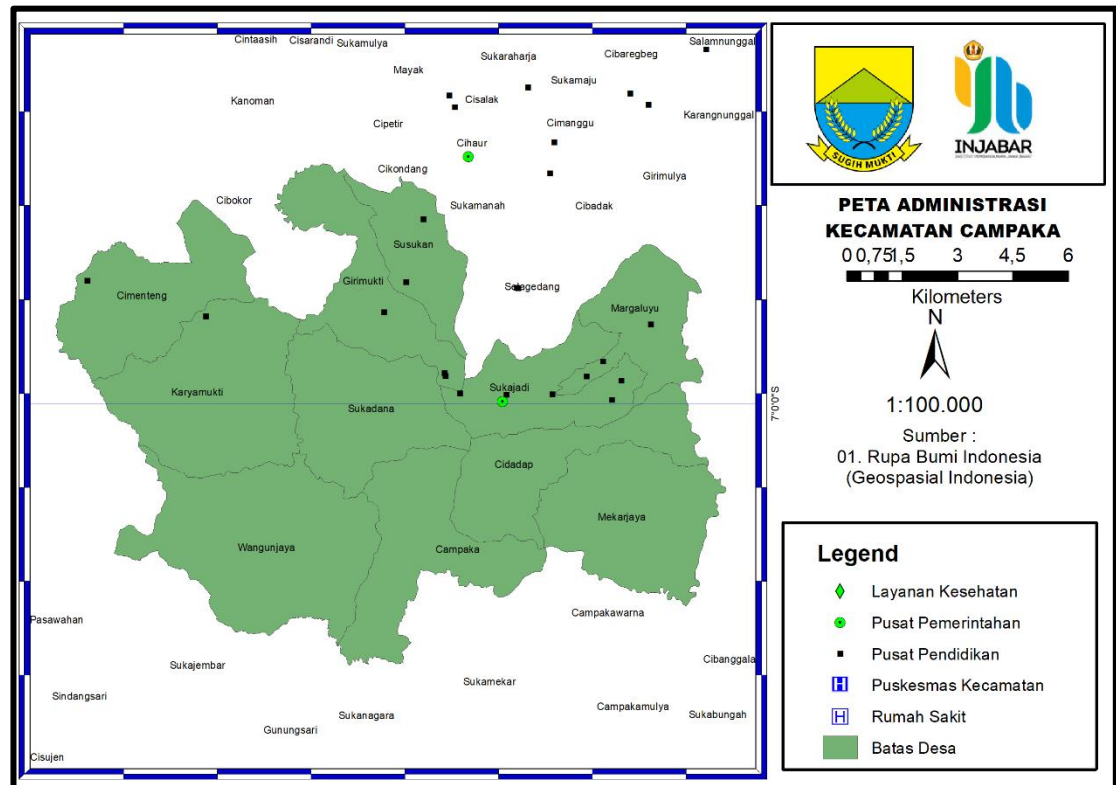
Kecamatan Cibeber merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur berbatasan dengan kecamatan Cilaku dan Kecamatan Warungkondang untuk bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Campaka, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Kecamatan Cibeber pada semester 1 tahun 2021 mencapai 129.362 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 65.937 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 63.425 jiwa. Yang tersebar di tiap-tiap desa dengan fasilitas pendukung pemerintahan diantaranya terdapat Kantor kecamatan, Kantor desa, Balai Pertanian, Kantor Kordik KUA Kecamatan, PLKB PUPR dll. Kemudian Kecamatan Cibeber yang memiliki luas wilayah 124.729,6 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 986,22 km²

yang tersebar di 18 Desa. Keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Cibeber menjadi salah satu kecamatan yang perlu dilakukan penataan kecamatan dengan menempati urutan pertama yang perlu dilakukan penataan kecamatan.

c. Gambaran Umum Kecamatan Campaka

Gambar 4.8

Peta Administrasi Kecamatan Campaka



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

Kecamatan Campaka merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur berbatasan dengan kecamatan Cibeber untuk bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukanagara dan Campakamulya, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Kecamatan Campaka pada semester 1 tahun 2021 mencapai 67.630 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 34.804 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 32.826 jiwa. Yang tersebar di tiap-tiap desa dengan fasilitas pendukung

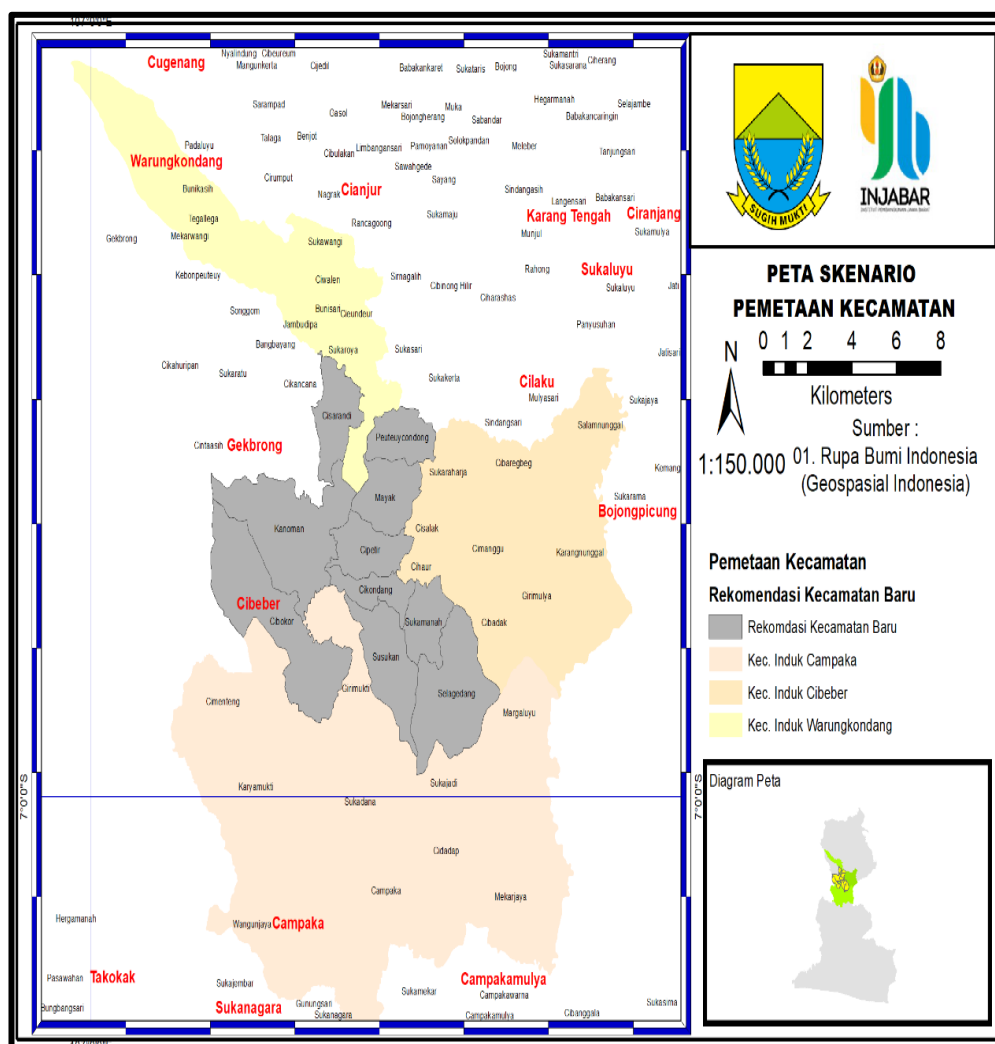
pemerintahan diantaranya terdapat Kantor kecamatan, Kantor desa, Pasar Kecamatan, Puskesmas, Polsek, Koramil, Balai Pertanian, dll. Kemudian Kecamatan Campaka yang memiliki luas wilayah 143.747,6 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 448,57 km² yang tersebar di 11 Desa. Keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Campaka menjadi salah satu kecamatan yang perlu dilakukan penataan kecamatan dengan menempati urutan ke enam yang perlu dilakukan penataan kecamatan.

d. Rekomendasi Pembentukan Kecamatan

Pembentukan kecamatan baru yang direkomendasikan merupakan kecamatan yang berada di antara Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka. Rekomendasi tersebut muncul atas analisis AHP (*Analytical Hierarchy Proses*) dengan mempertimbangkan aspek jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah desa, luas wilayah dan aspek pendukung lainnya kemudian mempertimbangkan konsep penyesuaian kecamatan yang meliputi fasilitas pendukung seperti sarana prasarana yang berada di dalam kecamatan. Berikut peta administratif rekomendasi kecamatan antara Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campak.

Gambar 4.9

Peta Skenario 2 Rekomendasi Kecamatan



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

Rekomendasi kecamatan terdiri dari berbagai desa yang berpotensi untuk masuk ke dalam kecamatan baru. Desa- desa yang terkatagori masuk ke dalam kecamatan rekomendasi merupakan desa yang telah dianalisis dan dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti aspek penduduk, kwilayahan dan fasilitas pendukung. Berikut di bawah ini nama desa yang tergabung dalam kecamatan baru yang direkomendasikan.

Tabel 4.17**Daftar Desa pada Skenario 2 Rekomendasi Kecamatan**

No	Kecamatan	Desa	Koordinat Desa	
			Koordinat Bujur	Koordinat Lintang
1.	Warungkondang	Cisarandi	107°05'09.05"	06°51'57.61"
2.	Cibeber	Cipetir	107.12,24,15	-6.92,83,89
3.	Cibeber	Peuteuycondong	107°07'24.50	6°53'45.55"
4.	Cibeber	Mayak	107°07'20.26"	06°55'00.33"
5.	Cibeber	Cikondang	107°07'25.00"	06°56'17.00"
6.	Cibeber	Cibokor	107°7'30"	06°95'33"
7.	Cibeber	Selagedang	107°08'41.40"	06°58'17.62"
8.	Cibeber	Kanoman	107°09'17"	06°92'77"
9.	Cibeber	Sukamanah	107°07'53.00"	06°56'51.00"
10.	Campaka	Susunan	107,117,595	-6,976,945

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Rekomendasi kecamatan yang dilakukan diantara Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campak. terdapat 10 desa. Penentuan jumlah desa sebanyak 10 desa merupakan salah satu syarat minimal dilakukannya pembentukan kecamatan baru. 10 desa tersebut terdiri dari 8 desa diambil dari kecamatan Cibeber, 1 desa diambil dari kecamatan Warungkondang dan 1 desa diambil dari Kecamatan Campaka. Sehingga jumlah tersebut berdasarkan indikator jumlah desa telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Adapun aspek lain yang menjadi indikator pembentukan kecamatan adalah jumlah penduduk. Berikut di bawah ini tabel jumlah penduduk desa di kecamatan rekomendasi.

Tabel 4.18
Daftar Desa pada Skenario 2 Rekomendasi
Kecamatan berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Kecamatan	Desa	Jumlah		Jumlah Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Warungkondang	Cisarandi	3,224	3,016	6,240
2.	Cibeber	Cipetir	3,835	3,719	7,554
3.	Cibeber	Peuteuycondong	5,433	5,301	10,734
4.	Cibeber	Mayak	3,701	3,689	7,390
5.	Cibeber	Cikondang	2,856	2,752	5,608
6.	Cibeber	Cibokor	5,453	5,165	10,618
7.	Cibeber	Selagedang	3,841	3,553	7,394
8.	Cibeber	Kanoman	4,362	4,234	8,596
9.	Cibeber	Sukamanah	3,181	3,079	6,260
10.	Campaka	Susunan	4,144	4,078	8,222
Jumlah			40,030	38,586	78,616

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan jumlah penduduk, rekomendasi kecamatan pada skenario 2 memiliki jumlah penduduk sebanyak 78.616 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 40.030 jiwa dan perempuan sebanyak 38.586 jiwa. Kemudian desa dengan penduduk terbanyak adalah desa Peuteuycondong dengan jumlah penduduk sebesar 10.734 jiwa dan desa dengan penduduk terendah adalah Desa Cikondang dengan jumlah penduduk sebanyak 5.608 jiwa. Keadaan tersebut kemudian disesuaikan dengan salah satu syarat pembentukan kecamatan dari indikator jumlah penduduk minimal berdasarkan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu untuk kecamatan baru, jumlah minimal penduduk untuk setiap desa adalah 6.000 jiwa atau 1.200 KK. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam rekomendasi kecamatan pada skenario 2, terdapat desa yang tidak memiliki penduduk lebih dari 6.000 jiwa, seperti Desa Cikondang.

Selain dari aspek jumlah penduduk, indikator lain untuk mendukung pembentukan kecamatan baru adalah luas wilayah yang tersedia di Kecamatan yang direkomendasikan. Berikut luas wilayah tiap desa dari kecamatan yang direkomendasikan.

Tabel 4.19
Daftar Desa pada Skenario 2 Rekomendasi
Kecamatan berdasarkan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (ha)
1.	Warungkondang	Cisarandi	507,57
2.	Cibeber	Cipetir	478,58
3.	Cibeber	Peuteuycondong	566,57
4.	Cibeber	Mayak	391,56
5.	Cibeber	Cikondang	279,24
6.	Cibeber	Cibokor	1.486,49
7.	Cibeber	Selagedang	951,21
8.	Cibeber	Kanoman	1.424,09
9.	Cibeber	Sukamanah	498,66
10.	Campaka	Susunan	688,64
Jumlah			6.765,04
			67.650,4 km ²

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.
Cianjur, 2021

Luas wilayah pada skenario 2 rekomendasi kecamatan memiliki luas wilayah 6.765,04ha atau 67.650,4 km². Luas wilayah tersebut terdiri dari luas setiap desa yang berada di dalam cakupan kecamatan yang direkomendasikan, yang mana desa terluas terdapat di Desa Cibokor dengan luas 1.486,49 ha dan desa dengan luas terkecil terdapat di desa Mayak sebesar 391,56 km². Keadaan tersebut kemudian disesuaikan dengan salah satu syarat pembentukan kecamatan dari indikator luas wilayah minimal cakupan kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu untuk kecamatan baru, jumlah minimal luas

wilayah adalah 7,5 km². Memperhatikan hal tersebut, maka dalam rekomendasi kecamatan pada skenario 2, luas wilayah cakupan rekomendasi kecamatan pada skenario 2 telah telah memenuhi kriteria berdasarkan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Kemudian aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan kecamatan adalah fasilitas pendukung di kecamatan yang direkomendasikan. Berikut di bawah ini aspek- aspek pendukung tiap-tiap desa di kecamatan yang masuk kedalam rekomendasi atau skenario 2. Aspek tersebut terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, pusat pelayanan pemerintahan, pusat ekonomi, pusat keamanan seperti polsek dan koramil.

Tabel 4.20
Fasilitas Pendukung pada Kecamatan yang
direkomendasikan

No	Kecamatan	Desa	Pendidikan			Sarana Publik
			SD	SLTP	SLTA	
1.	Warungkondang	Cisarandi	3	1	1	
2.	Cibeber	Cipetir	2	2	-	Balai Pertanian
3.	Cibeber	Peuteuycondong	4	2	-	
4.	Cibeber	Mayak	1	-	2	
5.	Cibeber	Cikondang	3	2	-	
6.	Cibeber	Cibokor	3	2	-	
7.	Cibeber	Selagedang	4	1	-	
8.	Cibeber	Kanoman	5	1	-	
9.	Cibeber	Sukamanah	1	-	-	
10.	Campaka	Susukan	5	1	1	
Jumlah			31	12	4	

Sumber : : Bappeda Kab. Cianjur, 2021

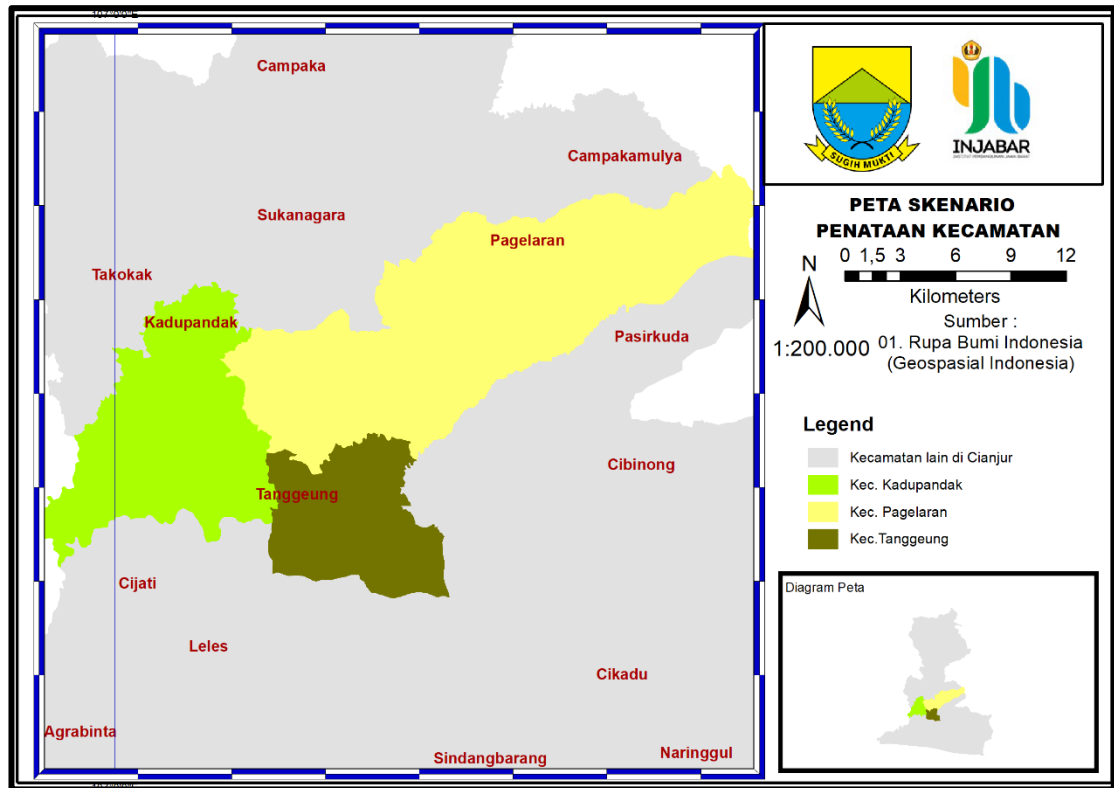
Fasilitas pendukung yang terdapat di kecamatan pada skenario 2 rekomendasi kecamatan terdiri dari beberapa aspek, dari aspek Pendidikan terdapat 31 Sekolah Dasar, sebanyak 12 Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan terdapat 4 untuk Sekolah Menengah Atas/

sederajat. Adapun sarana publik yang termasuk ke dalam kantor pelayanan publik yaitu kantor kantor desa dari setiap desa, dan kantor balai pertanian di Desa Cipetir. Aspek pendukung tersebut merupakan salah satu syarat dalam pembentukan kecamatan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

4.3.3 Skenario 3 Rekomendasi Kecamatan (Kadupandak-Pagelaran- Tanggeung)

Berdasarkan hasil analisis AHP (*Analytical Hierarchy Proses*) kemudian di sesuaikan dengan konsep penyesuaian kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka didapat kecamatan yang berpotensi melakukan pembentukan kecamatan baru diantara kecamatan Kadupandak, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Tanggeung. Hasil analisis perhitungan AHP, Kecamatan kadupandak mendapatkan skor 2,42 menempati urutan ke sembilan, kemudian kecamatan Pagelaran mendapatkan skor 2,75 menempati posisi ke tujuh dan kecamatan tanggeung mendapat skor 1,52 menempati urutan ke tiga belas dari seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur. Penentuan selanjutnya berdasarkan konsep Penyesuaian Kecamatan, Kecamatan Kadupandak, Pagelaran dan Tanggeung merupakan kecamatan yang berdampingan dan memenuhi indikator dari penataan kecamatan. Sehingga kecamatan tersebut dapat direkomendasikan dalam penataan kecamatan. Berikut peta kecamatan Kadupandak, Pagelaran dan Tanggeung.

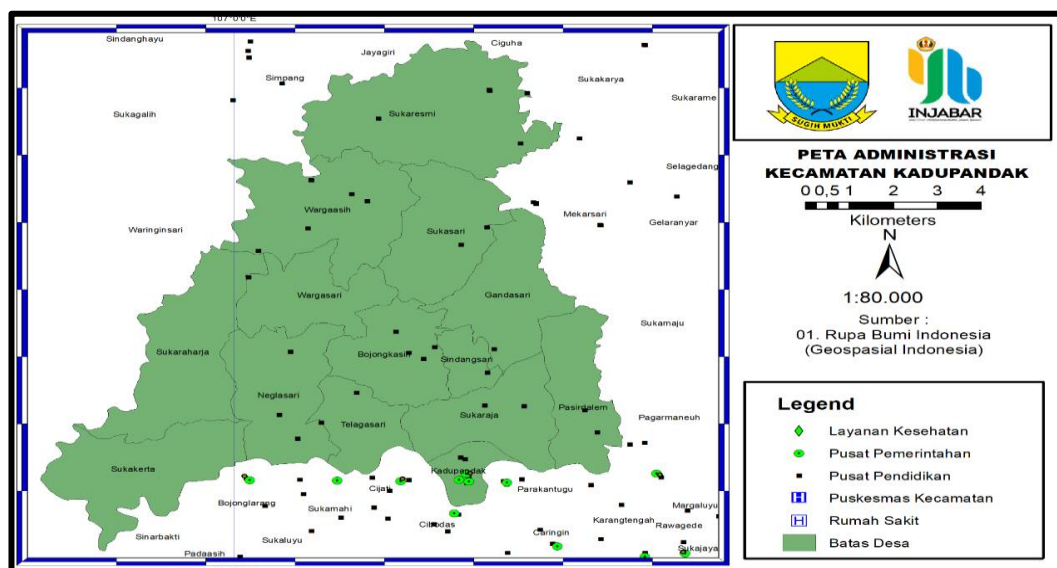
Gambar 4.10
Peta Penataan Kecamatan Kadupandak,
Pagelaran dan Tanggeung



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

a. Gambaran Umum Kecamatan Kadupandak

Gambar 4.11
Peta Administrasi Kecamatan Kadupandak



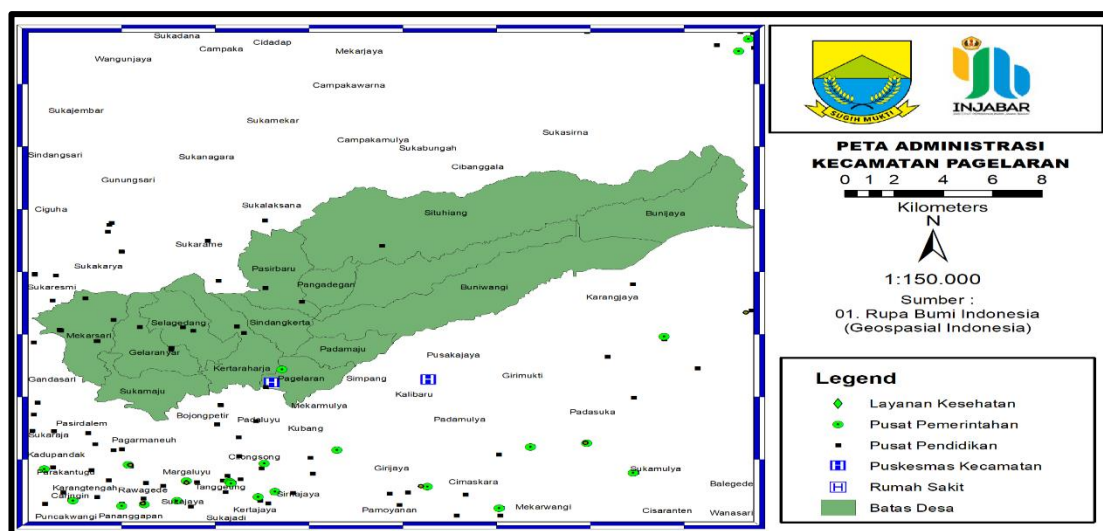
Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

Kecamatan Kadupandak merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur berbatasan dengan kecamatan Sukanagara untuk bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Cijati, bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Tanggeung dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Kecamatan Kadupandak pada semester 1 tahun 2021 mencapai 50.855 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 26.070 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 24.785 jiwa. Yang tersebar di tiap-tiap desa dengan fasilitas pendukung pemerintahan diantaranya terdapat Kantor kecamatan, Kantor desa, Balai Pertanian, Kantot UPTD KB dll. Kemudian Kecamatan Kadupandak yang memiliki luas wilayah 104.407,8 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 461,92 km² yang tersebar di 14 Desa. Keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Kadupandak menjadi salah satu kecamatan yang perlu dilakukan penataan kecamatan dengan menempati urutan kesembilan yang perlu dilakukan penataan kecamatan.

b. Gambaran Umum Kecamatan Pagelaran

Gambar 4.12

Peta Administrasi Kecamatan Pagelaran



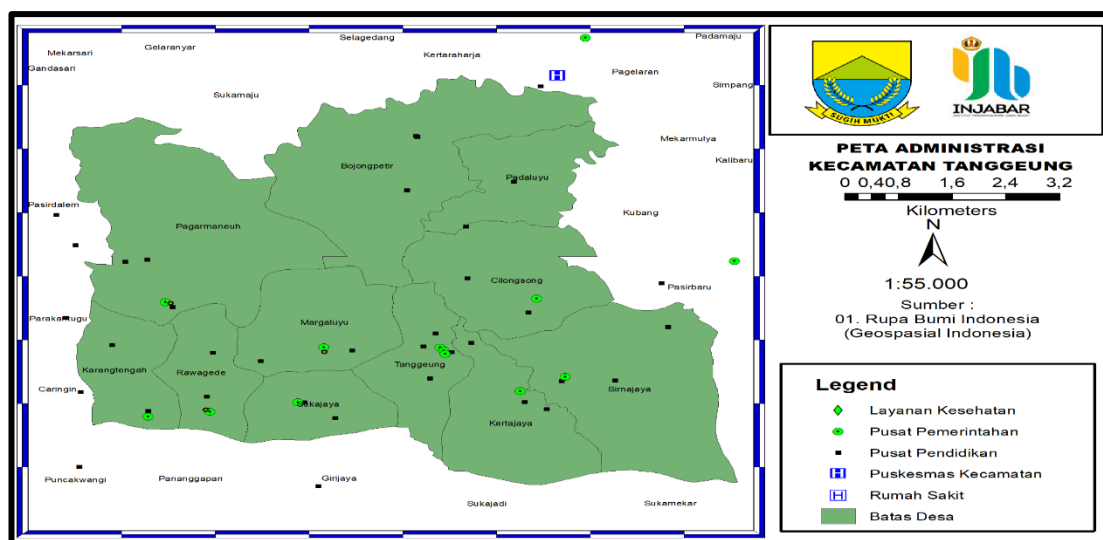
Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

Kecamatan Pagelaran merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur berbatasan dengan kecamatan Sukanagara, Campakamulya dan Kab.Bandung Barat untuk bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan pasirkuda dan tanggeung, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kadupandak. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Kecamatan Pagelaran pada semester 1 tahun 2021 mencapai 73.146 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 37.407 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 35.739 jiwa. Yang tersebar di tiap-tiap desa dengan fasilitas pendukung pemerintahan diantaranya terdapat Kantor kecamatan, Kantor desa, Balai Pertanian, Puskesmas, Pasar Kecamatan, Polsek, Kantor UPTD Pertanian dll. Kemudian Kecamatan Pagelaran yang memiliki luas wilayah 199.436.6 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 354,03 km² yang tersebar di 14 Desa. Keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Pagelaran menjadi salah satu kecamatan yang perlu dilakukan penataan kecamatan dengan menempati urutan ketujuh yang perlu dilakukan penataan kecamatan.

c. Gambaran Umum Kecamatan Tanggeung

Gambar 4.13

Peta Administrasi Kecamatan Tanggeung



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

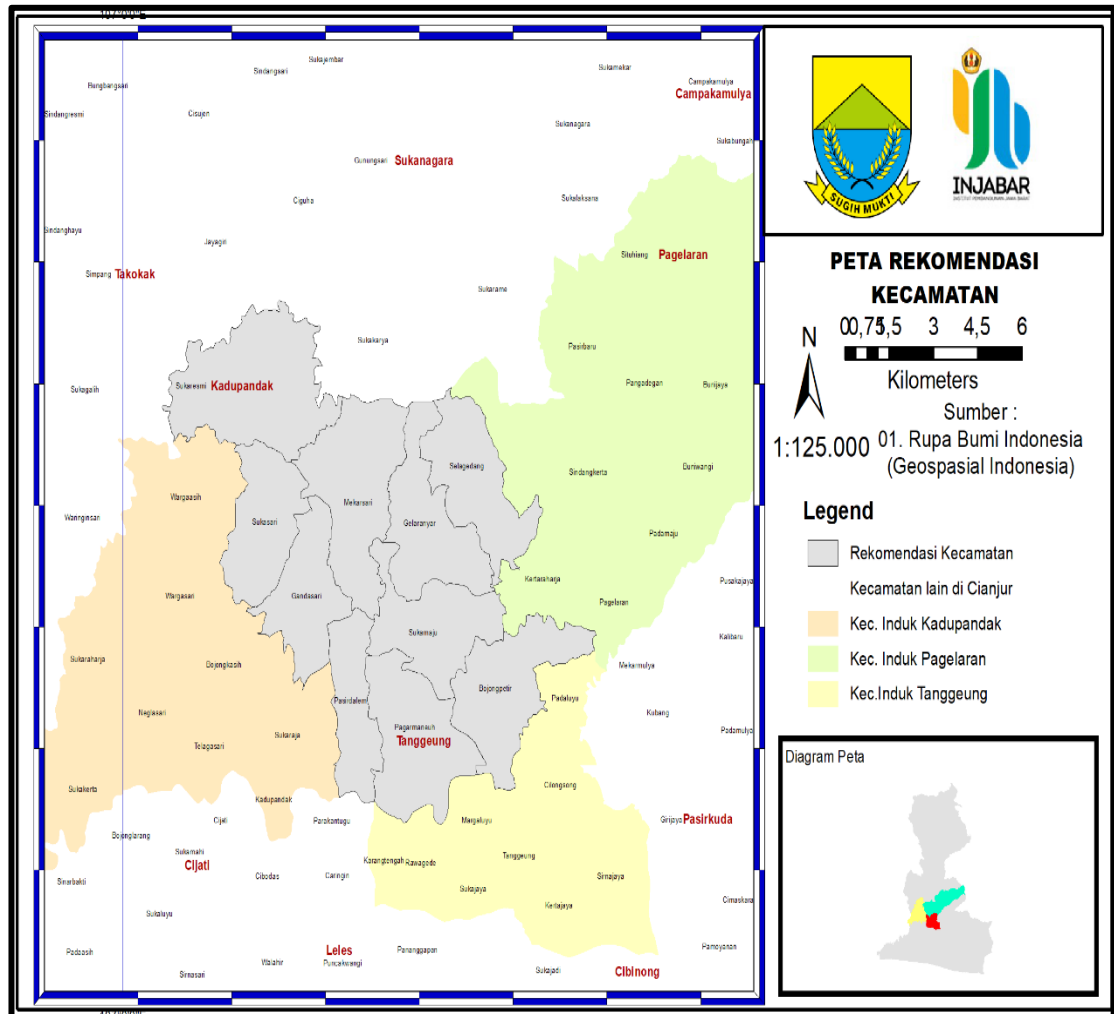
Kecamatan Tanggeung merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur berbatasan dengan kecamatan Pagelaran untuk bagian utara, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong , bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Pasirkuda dan bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Kadupandak dan Kecamatan Cijati. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Kabupaten Cianjur, jumlah penduduk Kecamatan Tanggeung pada semester 1 tahun 2021 mencapai 48.753 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 24.770 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 23.983 jiwa. Yang tersebar di tiap-tiap desa dengan fasilitas pendukung pemerintahan diantaranya terdapat Kantor kecamatan, Kantor desa, BPP Pertanian, Distarkim, Kantor BKKBN, Polsek, Pasar Kecamatan, Kordik Kecamatan, Puskesmas, KUA, Sekretariat PGRI dll. Kemudian Kecamatan Tanggeung yang memiliki luas wilayah 59.801,1 km² dengan kepadatan penduduk mencapai 785,885 km² yang tersebar di 12 Desa. Keadaan tersebut menjadikan Kecamatan Tanggeung menjadi salah satu kecamatan yang perlu dilakukan penataan kecamatan dengan menempati urutan ke tiga belas yang perlu dilakukan penataan kecamatan.

e. Rekomendasi Pembentukan Kecamatan

Pembentukan kecamatan baru yang direkomendasikan merupakan kecamatan yang berada di antara Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Tanggeung. Rekomendasi tersebut muncul atas analisis AHP (*Analytical Hierarchy Proces*) dengan mempertimbangkan aspek jumlah penduduk, kepadatan penduduk, jumlah desa, luas wilayah dan aspek pendukung lainnya kemudian mempertimbangkan konsep penyesuaian kecamatan yang meliputi fasilitas pendukung seperti sarana prasarana yang berada di dalam kecamatan. Berikut peta administrasi rekomendasi kecamatan antara Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Tanggeung.

Gambar 4.14

Peta Skenario 3 Rekomendasi Kecamatan



Sumber : Diolah Peneliti dari Geospasial Indonesia, 2021

Rekomendasi kecamatan terdiri dari berbagai desa yang berpotensi untuk masuk ke dalam kecamatan baru. Desa- desa yang terkatagori masuk ke dalam kecamatan rekomendasi merupakan desa yang telah dianalisis dan dipertimbangkan dari berbagai aspek, seperti aspek penduduk, kwilayahan dan fasilitas pendukung. Berikut di bawah ini nama desa yang tergabung dalam kecamatan baru yang direkomendasikan.

Tabel 4.21**Daftar Desa pada Skenario 3 Rekomendasi Kecamatan**

No	Kecamatan	Desa	Koordinat Desa	
			Koordinat Bujur	Koordinat Lintang
1.	Kadupandak	Sukasari	107,051,895	-7,192,303
2.	Kadupandak	Pasirdalem	107°04'17.77"	7,142,649
3.	Kadupandak	Sukaresmi	107°03'06.6"	7°09'15.6"
4.	Kadupandak	Gandasari	107,0511471	-7,203,030
5.	Pagelaran	Gelaranyar	107°06'07.90"	07°11'44.20"
6.	Pagelaran	Mekarsari	107,102,400	-7,195,640
7.	Pagelaran	Selagedang	107,480,000	-7,112,600
8.	Pagelaran	Sukamaju	107,111,177	-7,186,738
9.	Tanggeung	Pagermaneuh	107,086,852	7,259,005
10.	Tanggeung	Bojongpetir	107°07'11.21"	07°13'34.76"

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Rekomendasi kecamatan yang dilakukan diantara Kecamatan Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Tanggeung terdapat 10 desa. Penentuan jumlah desa sebanyak 10 desa merupakan salah satu syarat minimal dilakukannya pembentukan kecamatan baru. 10 desa tersebut terdiri dari 4 desa diambil dari kecamatan kadupandak dan Pagelaran dan 2 desa diambil dari Kecamatan Tanggeung. Sehingga jumlah tersebut berdasarkan indikator jumlah desa telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Adapun aspek lain yang menjadi indikator pembentukan kecamatan adalah jumlah penduduk. Berikut di bawah ini tabel jumlah penduduk desa di kecamatan rekomendasi.

Tabel 4.22

**Daftar Desa pada Skenario 3 Rekomendasi
Kecamatan berdasarkan Jumlah Penduduk**

No	Kecamatan	Desa	Jumlah		Jumlah Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	
1.	Kadupandak	Sukasari	1.421	1.389	2.810
2.	Kadupandak	Pasirdalem	1.975	2.023	3.998
3.	Kadupandak	Sukaresmi	1.969	1.788	3.757
4.	Kadupandak	Gandasari	1.404	1.374	2.778
5.	Pagelaran	Gelaranyar	1.550	1.438	2.988
6.	Pagelaran	Mekarsari	2.377	2.333	4.710
7.	Pagelaran	Selagedang	2.469	2.335	4.804
8.	Pagelaran	Sukamaju	1.074	1.041	2.115
9.	Tanggeung	Pagermaneuh	1.865	1.728	3.593
10.	Tanggeung	Bojongpetir	3.053	2.989	6.042
Jumlah			19.157	18.438	37.595

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021

Berdasarkan jumlah penduduk, rekomendasi kecamatan pada skenario 3 memiliki jumlah penduduk sebanyak 37.595 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 19.157 jiwa dan perempuan sebanyak 18.438 jiwa. Kemudian desa dengan penduduk terbanyak adalah desa Bojongpetir dengan jumlah penduduk sebesar 6.042 jiwa dan desa dengan penduduk terendah adalah Desa Sukamaju dengan jumlah penduduk sebanyak 2.115 jiwa. Keadaan tersebut kemudian disesuaikan dengan salah satu syarat pembentukan kecamatan dari indikator jumlah penduduk minimal berdasarkan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu untuk kecamatan baru, jumlah minimal penduduk untuk setiap desa adalah 6.000 jiwa atau 1.200 KK. Memperhatikan hal tersebut, maka dalam rekomendasi kecamatan pada skenario 3, semua desa memiliki jumlah penduduk

kurang dari 6.000 kecuali desa Bojongpetir, sehingga skenario ke 3 perlu di pertimbangkan kembali untuk dibentuknya Kecamatan baru.

Selain dari aspek jumlah penduduk, indikator lain untuk mendukung pembentukan kecamatan baru adalah luas wilayah yang tersedia di Kecamatan yang direkomendasikan. Berikut luas wilayah tiap desa dari kecamatan yang direkomendasikan.

Tabel 4.23
Daftar Desa pada Skenario 3 Rekomendasi
Kecamatan berdasarkan Luas Wilayah

No	Kecamatan	Desa	Luas Wilayah (ha)
1.	Kadupandak	Sukasari	722,17
2.	Kadupandak	Pasirdalem	677,15
3.	Kadupandak	Sukaresmi	1.536,95
4.	Kadupandak	Gandasari	955,85
5.	Pagelaran	Gelaranyar	908,42
6.	Pagelaran	Mekarsari	1.146,65
7.	Pagelaran	Selagedang	856,45
8.	Pagelaran	Sukamaju	1.048,19
9.	Tanggeung	Pagermaneuh	1.117,87
10.	Tanggeung	Bojongpetir	982,42
Jumlah			9.952,12
			99.521,2 km²

Sumber : : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab.

Cianjur, 2021

Luas wilayah pada skenario 3 rekomendasi kecamatan memiliki luas wilayah 9.952,12 ha atau 99.521,2 km². Luas wilayah tersebut terdiri dari luas setiap desa yang berada di dalam cakupan kecamatan yang direkomendasikan, yang mana desa terluas terdapat di Desa Sukaresmi dengan luas 1.536,95 ha dan desa dengan luas terkecil terdapat di desa Pasirdalem sebesar 677,15 ha. Keadaan tersebut kemudian disesuaikan dengan salah satu syarat pembentukan kecamatan dari indikator luas wilayah minimal cakupan kecamatan

berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu untuk kecamatan baru, jumlah minimal luas wilayah adalah 7,5 km². Memperhatikan hal tersebut, maka dalam rekomendasi kecamatan pada skenario 3, luas wilayah cakupan rekomendasi kecamatan pada skenario 3 telah telah memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Kemudian aspek yang perlu diperhatikan dalam penataan kecamatan adalah fasilitas pendukung di kecamatan yang direkomendasikan. Berikut di bawah ini aspek- aspek pendukung tiap-tiap desa di kecamatan yang masuk kedalam rekomendasi atau skenario dua. Aspek tersebut terdiri dari sarana pendidikan, sarana kesehatan, pusat pelayanan pemerintahan, pusat ekonomi, pusat keamanan seperti polsek dan koramil.

Tabel 4.24
Fasilitas Pendukung pada Kecamatan yang
direkomendasikan

No	Kecamatan	Desa	Pendidikan			Sarana Publik
			SD	SLTP	SLTA	
1.	Kadupandak	Sukasari	1	1	-	Puskesmas
2.	Kadupandak	Pasirdalem	3	1	-	-
3.	Kadupandak	Sukaesmi	3	1	-	-
4.	Kadupandak	Gandasari	3	-	-	UPTD KB
5.	Pagelaran	Gelaranyar	3	-	-	-
6.	Pagelaran	Mekarsari	4	1	1	-
7.	Pagelaran	Selagedang	4	1	1	-
8.	Pagelaran	Sukamaju	1	1	-	-
9.	Tanggeung	Pagermaneuh	3	1	1	-
10.	Tanggeung	Bojongpetir	3	1	1	-
Jumlah			28	8	4	

Sumber : : Bappeda Kab. Cianjur, 2021

Fasilitas pendukung yang terdapat di kecamatan pada skenario 3 rekomendasi kecamatan terdiri dari beberapa aspek, dari aspek

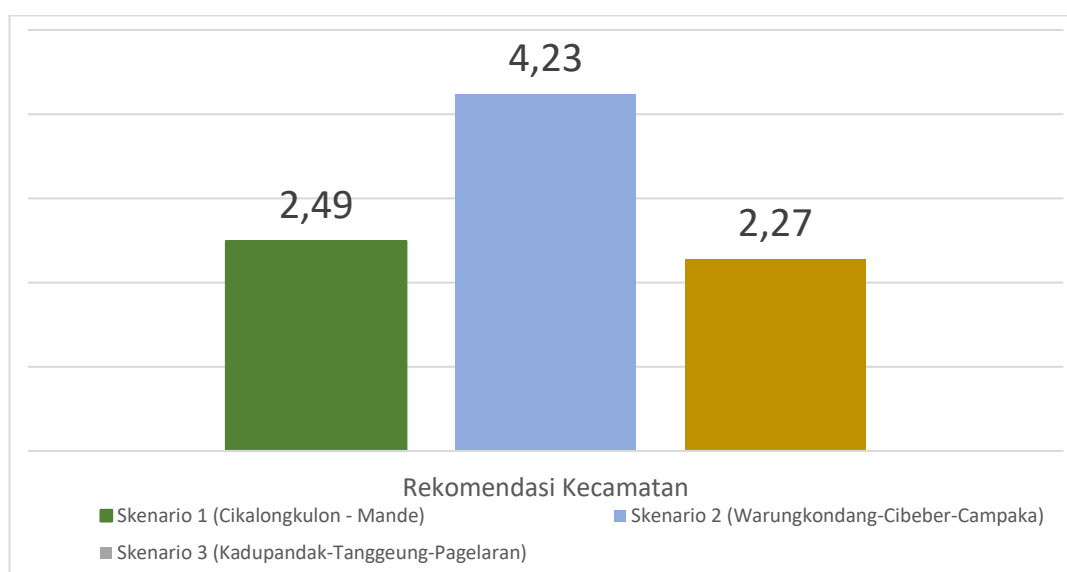
Pendidikan terdapat 28 Sekolah Dasar, sebanyak 8 Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan terdapat 4 untuk Sekolah Menengah Atas/ sederajat di wilayah cakupan rekomendasi kecamatan. Adapun sarana publik yang termasuk ke dalam kantor pelayanan publik dan kesehatan yaitu kantor kantor desa dari setiap desa, kantor UPTD KB dan Puskesmas di Desa Sukasari. Aspek pendukung tersebut merupakan salah satu syarat dalam pembentukan kecamatan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

4.3.4 Alternatif Urutan Rekomendasi Kecamatan berdasarkan AHP

Tabel 4.25
Perangkingan Rekomendasikan
Kecamatan berdasarkan AHP

Skenario	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	Skor AHP
Skenario 1	10	61,160	7,835.45	2.49
Skenario 2	10	78,616	6,765.04	4.23
Skenario 3	10	37,595	9,952.12	2.27

Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2021



4.4 Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa penataan kecamatan perlu memperhatikan aspek kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah tersebut merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka melalui data yang diperoleh dari BPKAD Kabupaten Cianjur, diketahui Data Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Gambar 4.15
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

No	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA - RATA PERTUMBUHAN 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN DAERAH	3.241.659.038.317,00	3.764.267.630.006,53	4.017.389.955.771,68	3.995.406.433.639,81	3.840.501.992.318,66	4,33
01:01	PENDAPATAN ASLI DAERAH	455.156.876.756,00	535.232.527.171,53	569.844.590.575,68	628.558.761.863,81	576.986.585.199,66	6,11
1.1.1	Pajak Daerah	131.691.899.621,00	170.746.314.804,00	192.762.034.684,00	195.831.346.090,00	161.490.626.173,00	5,23
1.1.2	Retribusi Daerah	18.482.440.865,00	20.911.694.013,00	28.261.491.600,00	34.470.835.983,00	19.823.951.893,00	1,77
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.886.050.296,00	9.543.500.665,00	9.248.233.428,00	9.167.729.168,00	10.152.779.924,00	3,39
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	296.096.485.974,00	334.031.017.689,53	339.572.830.863,68	389.088.850.622,81	385.519.227.209,66	6,82
01:02	DANA PERIMBANGAN	2.155.469.458.260,00	2.201.273.702.768,00	2.246.193.466.963,00	2.261.839.365.877,00	2.090.623.584.647,00	-0,76
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bkn Pajak	83.205.571.937,00	82.142.872.402,00	80.685.347.741,00	70.647.888.909,00	97.129.519.539,00	3,94
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.569.946.984.000,00	1.542.820.697.000,00	1.548.376.287.000,00	1.627.020.432.000,00	1.472.420.591.000,00	-1,59
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	502.316.902.323,00	576.310.133.366,00	617.131.832.222,00	564.171.044.968,00	521.073.474.108,00	0,92
01:03	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	631.032.703.301,00	1.027.761.400.067,00	1.201.351.898.233,00	1.105.008.305.899,00	1.172.891.822.472,00	16,76
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.035.687.100,00	265.519.864.544,00	258.213.120.000,00	284.939.800.000,00	300.875.860.000,00	119,19
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Prov	189.559.717.701,00	203.622.611.723,00	219.388.945.337,00	238.044.199.580,00	228.737.033.353,00	4,81
1.3.3	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	147.619.195.500,00	243.822.875.800,00	351.546.962.496,00	158.628.362.719,00	219.343.844.119,00	10,41
1.3.5	Dana Desa	240.412.941.000,00	307.296.048.000,00	346.452.870.400,00	412.324.560.600,00	423.935.085.000,00	15,24
1.3.6	Dana Insentif Daerah	40.405.162.000,00	7.500.000.000,00	25.750.000.000,00	11.071.383.000,00	0,00	-100,00
1.3.7	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Sumber: BPKAD Kabupaten Cianjur Tahun 2021

Berdasarkan data diatas yang bersumber dari BPKAD Kabupaten Cianjur pada tahun 2021, bahwa pendapatan daerah kabupaten Cianjur pada tahun 2020 mencapai Rp. 3.840.501.992.318. jumlah tersebut merupakan pendapatan yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah. Kemudian, selain dari pendapatan daerah, untuk menghitung kemampuan keuangan daerah dianalisis juga berdasarkan belanja daerah Kabupaten Cianjur. Berikut data yang memperlihatkan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

Gambar 4.16
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)					RATA - RATA PERTUMBUHAN % 2016-2020
		2016	2017	2018	2019	2020	
2	BELANJA	3.379.491.095.958,00	3.664.119.182.170,00	4.000.993.750.351,00	3.935.268.663.062,12	3.907.918.683.308,74	6,39
02:01	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.956.893.018.368,00	1.960.221.217.251,00	2.014.010.303.660,00	2.094.980.890.110,00	2.295.936.779.938,00	5,52
02:01:01	Belanja Pegawai	1.417.944.254.189,00	1.320.186.192.950,00	1.311.153.861.359,00	1.361.467.046.620,00	1.288.847.686.328,00	-1,09
02:01:02	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:01:03	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02:01:04	Belanja Hibah	55.447.451.018,00	48.728.962.064,00	63.135.944.641,00	70.743.361.454,00	187.383.031.000,00	7,67
02:01:05	Belanja Bantuan Sosial	2.395.000.000,00	216.500.000,00	1.426.000.000,00	2.436.500.000,00	6.220.000.000,00	6,57
02:01:06	Belanja bagi hasil kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.571.579.218,00	3.650.158.466,00	5.315.584.700,00	4.463.423.200,00	13.147.153.500,00	56,36
02:01:07	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	477.000.385.943,00	586.107.390.771,00	631.201.565.020,00	651.139.080.336,00	688.175.934.000,00	17,65
02:01:08	Belanja Tidak Terduga	534.348.000,00	1.332.013.000,00	1.777.347.940,00	4.731.478.500,00	112.162.975.110,00	666,96
02:02	BELANJA LANGSUNG	1.422.598.077.590,00	1.703.897.964.919,00	1.986.983.446.691,00	1.840.287.772.952,12	1.611.981.903.370,74	7,70
02:02:01	Belanja Pegawai	59.826.889.498,00	121.675.030.665,00	107.941.213.228,00	123.429.297.191,00	202.636.728.018,00	38,04
02:02:02	Belanja Barang dan Jasa	746.526.677.271,00	759.008.233.620,00	950.431.925.225,00	1.026.204.882.190,12	1.024.433.248.423,74	16,25
02:02:03	Belanja Modal	616.244.510.821,00	823.214.700.634,00	928.610.308.238,00	690.653.593.571,00	384.911.926.929,00	-9,79

Sumber : BPKAD Kab. Cianjur Tahun 2021

Gambar diatas merupakan data yang memperlihatkan realisasi belanja daerah kabupaten Cianjur dari tahun 2016 – 2020. Berdasarkan data tersebut, bahwa belanja daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 mencapai Rp. 3.907.918.683.308. Jumlah tersebut merupakan jumlah belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kemudian untuk jumlah belanja pegawai, Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 merealisasikan sebesar Rp. 1.288.847.686.328.

Untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai berikut:

$$a. \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Anggaran Pendapatan}} = < 50\%$$

$$b. \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Daerah}} = < 50\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat di hitung rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{a. } & \frac{1.288.847.686.328}{3.840.501.992.318} = 0,34 \text{ (34\%)} \\ \text{b. } & \frac{1.288.847.686.328}{3.907.918.683.308} = 0,33 \text{ (33\%)} \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil rasio belanja pegawai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahwa Kabupaten Cianjur memiliki rasio yang kurang dari 50%. Artinya, dari aspek kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Cianjur dapat melakukan penataan kecamatan setelah pemenuhan persyaratan dasar dilakukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Proses*) diperoleh beberapa rekomendasi pembentukan kecamatan di Kabupaten Cianjur melalui konsep penataan kecamatan. Berikut rekomendasi pembentukan kecamatan berdasarkan urutan hasil *Analytical Hierarchy Proses* yaitu:

1. Rekomendasi Kecamatan Baru yang mencakup Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka dengan perolehan skor AHP adalah 4,23.
2. Rekomendasi Kecamatan Baru yang mencakup Kecamatan Cikalongkulon dan Kecamatan Mande dengan perolehan skor AHP adalah 2,49
3. Rekomendasi Kecamatan Baru yang mencakup Kecamatan Kadupandak, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Tanggeung dengan perolehan skor AHP adalah 2,27

Dengan demikian maka, penataan kecamatan yang perlu di prioritaskan di Kabupaten Cianjur adalah pembentukan kecamatan yang mencakup Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Campaka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian diatas, maka terdapat beberapa saran kajian, diantaranya:

1. Perlu adanya kajian pemilihan calon ibukota kecamatan dari rekomendasi pembentukan kecamatan setelah di tetapkan menjadi kecamatan baru.
2. Perlu adanya kajian penataan desa yang melingkupi pembentukan desa, penggabungan desa dan/ atau penyesuaian desa sebagai bentuk tolak ukur efisiensi pelayanan publik pemerintah kabupaten terhadap masyarakat desa.
3. Melakukan kajian aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan sebagai upaya peningkatan IPM kab. Cianjur
4. Melakukan kajian aksesibilitas infrastruktur (jalan, lahan pemerintahan, keterjangkauan layanan dan fasilitas lain) di cakupan kecamatan baru yang direkomendasikan.
5. Melakukan kajian penggalian potensi ekonomi, sosial dan kondisi geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewirahmadanirwati. (2018). Implementation of Regional Autonomy in Realizing Good Governance in the West Sumatera Region. *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, 2(3), 43–50.
- El Fitri, L. S. N. I. S. (2013). Pemekaran Kecamatan dalam Peningkatan Pelayanan Kependudukan (Studi pada Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(3), 115–124.
- Kabupaten Cianjur dalam Angka 2021
- Parhusip, J. (2019). Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Pada Desain Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Calon Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Teknologi Informasi Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*, 13(2), 18–29.
<https://doi.org/10.47111/jti.v13i2.251>
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penataan Kecamatan
- Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur 2021 - 2026
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2021
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Widanarto, A. (2017). Kajian Penyusunan Data Base Penataan. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 187–204.

LAMPIRAN

Matrik Perbandingan Berpasangan (Kriteria)										
	Jumlah Penduduk	Luas Kecamatan	Kepadatan	Jumlah Desa	Nilai Eigen				Jumlah	Rata-rata
Jumlah Penduduk	1	3	0,333	0,167	0,096774194	0,176470588	0,074074074	0,101449275	0,45	0,11
Luas Kecamatan	0,333	1	0,167	0,143	0,032258065	0,058823529	0,037037037	0,086956522	0,22	0,05
Kepadatan	3	6	1	0,333	0,290322581	0,352941176	0,222222222	0,202898551	1,07	0,27
Jumlah Desa	6	7	3	1	0,580645161	0,411764706	0,666666667	0,608695652	2,27	0,57
Jumlah	10,333	17	4,500	1,643					4,00	1,00

CI = (Lamda Max-n)/(n-1)

Lamda Max 4,2067261

CI= 0,0689087

CI= CI/IR 0,07656522

Matrik Perbandingan Berpasangan (Kriteria)

Jumlah Penduduk	Cianjur	Karangtengah	Cibeber	Cugenang	Cikalongkulon	Sukaresmi	Bojongpicung	Mande	Warungkondang	Pagelaran	Campaka	Cidaun	Kadupandak	Tanggeung	Jumlah	Rata-rata
Cianjur	1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	7,000	8,000	2,73	0,19
Karangtengah	0,500	1,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	7,000	8,000	2,43	0,17
Cibeber	0,333	0,333	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	1,62	0,12
Cugenang	0,333	0,333	0,500	1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	5,000	6,000	1,35	0,10
Cikalongkulon	0,333	0,333	0,500	0,500	1,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	5,000	5,000	5,000	6,000	1,37	0,10
Sukaresmi	0,250	0,250	0,333	0,333	0,333	1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	5,000	6,000	0,97	0,07
Bojongpicung	0,250	0,250	0,333	0,333	0,333	0,500	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	4,000	5,000	0,73	0,05
Mande	0,200	0,200	0,250	0,333	0,250	0,333	0,500	1,000	2,000	2,000	3,000	3,000	4,000	5,000	0,63	0,04
Warungkondang	0,200	0,200	0,250	0,333	0,250	0,333	0,500	0,500	1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	5,000	0,56	0,04
Pagelaran	0,200	0,200	0,200	0,333	0,250	0,333	0,500	0,500	0,500	1,000	3,000	3,000	3,000	4,000	0,49	0,04
Campaka	0,167	0,167	0,200	0,250	0,200	0,250	0,333	0,333	0,333	0,333	1,000	4,000	4,000	4,000	0,42	0,03
Cidaun	0,167	0,167	0,200	0,250	0,200	0,250	0,333	0,333	0,333	0,333	0,250	1,000	3,000	3,000	0,31	0,02
Kadupandak	0,143	0,143	0,200	0,200	0,200	0,200	0,250	0,250	0,333	0,333	0,250	0,333	1,000	3,000	0,23	0,02
Tanggeung	0,125	0,125	0,167	0,167	0,167	0,167	0,200	0,200	0,333	0,250	0,250	0,333	0,333	1,000	0,17	0,01
JUMLAH	4,201	5,701	10,133	12,033	13,183	20,367	22,617	29,117	30,833	32,250	43,750	47,667	56,333	70,000		

$$CI = (\text{Lamda Max-n}) / (n-1)$$

15,837319
 Lamda Max 15
 0,1413322
 CI = 43
 0,0900205
 37

Luas Wilayah	Cianjur	Karangtengah	Cibeber	Cugenang	Cikalongkulon	Sukaresmi	Bojongpicung	Mande	Warungkon dang	Pagelaran	Campa ka	Cida un	Kadupan dak	Tangge ung	Juml ah	Rat a-rat a
Cianjur	1,000	0,500	0,250	0,333	0,200	0,333	0,333	0,333	1,000	0,167	0,200	0,111	0,333	0,500	0,24	0,02
Karangtengah	2,000	1,000	0,333	0,500	0,250	0,333	0,500	0,333	1,000	0,200	0,250	0,125	0,333	1,000	0,31	0,02
Cibeber	4,000	3,000	1,000	3,000	1,000	2,000	2,000	2,000	3,000	0,333	1,000	0,167	2,000	3,000	1,02	0,07
Cugenang	3,000	2,000	0,333	1,000	0,333	1,000	1,000	0,500	2,000	0,200	0,333	0,143	0,500	1,000	0,48	0,03
Cikalongkulon	5,000	4,000	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000	3,000	4,000	0,333	1,000	0,200	3,000	4,000	1,29	0,09
Sukaresmi	3,000	3,000	0,500	1,000	0,333	1,000	1,000	1,000	4,000	0,250	0,333	0,143	1,000	2,000	0,63	0,05
Bojongpicung	3,000	2,000	0,500	1,000	0,333	1,000	1,000	1,000	3,000	0,200	0,333	0,143	1,000	2,000	0,58	0,04
Mande	3,000	3,000	0,500	2,000	0,333	1,000	1,000	1,000	3,000	0,200	0,333	0,143	1,000	2,000	0,63	0,05
Warungkon dang	1,000	1,000	0,333	0,500	0,250	0,250	0,333	0,333	1,000	0,200	0,333	0,111	0,333	1,000	0,29	0,02
Pagelaran	6,000	5,000	3,000	5,000	3,000	4,000	5,000	5,000	5,000	1,000	3,000	0,250	4,000	5,000	2,20	0,16

Campaka	5,000	4,000	1,000	3,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0,333	1,000	0,200	2,000	3,000	1,20	0,09
Cidaun	9,000	8,000	6,000	7,000	5,000	7,000	7,000	7,000	9,000	4,000	5,000	1,000	7,000	8,000	4,08	0,29
Kadupanda k	3,000	3,000	0,500	2,000	0,333	1,000	1,000	1,000	3,000	0,250	0,500	0,143	1,000	4,000	0,71	0,05
Tanggeung	2,000	1,000	0,333	1,000	0,250	0,500	0,500	0,500	1,000	0,200	0,333	0,143	0,250	1,000	0,35	0,03
JUMLAH	50,000	40,500	15,583	30,333	13,617	25,417	26,667	26,000	43,000	7,867	13,950	3,021	23,750	37,500		

CI = (Lamda Max-n)/(n-1)

Lamda 14,91801

Max 975

0,070616

CI = 904

0,044978

919

Kepadatan Penduduk	Cianjur	Karangte ngah	Cibe ber	Cugena ng	Cikalongku lon	Sukare smi	Bojongpic ung	Man de	Warungkond ang	Pagelar an	Campa ka	Cida un	Kadupa ndak	Tangg eung	Jum lah	Ra ta- rat a
Cianjur	1,000	7,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	4,75	0,34
Karangtengah	0,143	1,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	6,000	6,000	6,000	7,000	5,000	2,31	0,17

Cibeber	0,111	0,200	1,00 0	0,333	2,000	2,000	2,000	2,00 0	0,333	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	0,74	0,0 5
Cugenang	0,111	0,200	3,00 0	1,000	3,000	3,000	3,000	3,00 0	0,500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,05	0,0 8
Cikalongkulon	0,111	0,200	0,50 0	0,333	1,000	0,500	0,500	0,50 0	0,333	2,000	2,000	3,000	2,000	0,500	0,43	0,0 3
Sukaesmi	0,111	0,200	0,50 0	0,333	2,000	1,000	0,500	2,00 0	0,333	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	0,65	0,0 5
Bojongpicung	0,111	0,200	0,50 0	0,333	2,000	2,000	1,000	2,00 0	0,333	3,000	3,000	3,000	3,000	2,000	0,71	0,0 5
Mande	0,111	0,200	0,50 0	0,333	2,000	0,500	0,500	1,00 0	0,333	3,000	2,000	3,000	3,000	0,500	0,53	0,0 4
Warungkondang	0,111	0,200	3,00 0	2,000	3,000	3,000	3,000	3,00 0	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,13	0,0 8
Pagelaran	0,111	0,167	0,33 3	0,333	0,500	0,333	0,333	0,33 3	0,333	1,000	0,500	2,000	0,500	0,333	0,26	0,0 2
Campaka	0,111	0,167	0,33 3	0,333	0,500	0,333	0,333	0,50 0	0,333	2,000	1,000	2,000	0,500	2,000	0,36	0,0 3
Cidaun	0,111	0,167	0,33 3	0,333	0,333	0,333	0,333	0,33 3	0,333	0,500	0,500	1,000	0,500	0,333	0,22	0,0 2
Kadupandak	0,111	0,143	0,50 0	0,333	0,500	0,333	0,333	0,33 3	0,333	2,000	2,000	2,000	1,000	0,500	0,35	0,0 2
Tanggeung	0,111	0,200	0,50 0	0,333	2,000	0,500	0,500	2,00 0	0,333	3,000	0,500	3,000	2,000	1,000	0,51	0,0 4
JUMLAH	2,476	10,243	25,0 00	20,333	32,833	27,833	26,333	31,0 00	18,833	43,500	38,500	46,00 0	39,500	31,167		

CI = (Lamda Max-n)/(n-1)

16,34756

Lamda Max

63

0,180582
 CI = 023
 0,115020
 397

Jumlah Desa	Cianjur	Karangtengah	Cibeb er	Cugena ng	Cikalongkulon	Sukaresmi	Bojongpicung	Man de	Warungkon dang	Pagelar an	Campa ka	Cida un	Kadupan dak	Tangge ung	Juml ah	Rat a-rata
Cianjur	1,000	0,200	0,143	0,200	0,143	1,000	1,000	0,333	1,000	0,333	1,000	0,333	0,333	0,500	0,29	0,02
Karangtengah	5,000	1,000	0,333	1,000	0,333	5,000	5,000	3,000	5,000	3,000	5,000	3,000	3,000	5,000	1,59	0,11
Cibeber	7,000	3,000	1,000	3,000	1,000	7,000	7,000	5,000	7,000	5,000	7,000	4,000	5,000	7,000	2,87	0,20
Cugenang	5,000	1,000	0,333	1,000	0,333	5,000	5,000	5,000	5,000	3,000	5,000	3,000	3,000	5,000	1,66	0,12
Cikalongkulon	7,000	3,000	1,000	3,000	1,000	7,000	7,000	5,000	7,000	5,000	7,000	5,000	5,000	7,000	2,92	0,21
Sukaresmi	1,000	0,200	0,143	0,200	0,143	1,000	1,000	0,333	1,000	0,333	1,000	0,333	0,333	0,500	0,29	0,02
Bojongpicung	1,000	0,200	0,143	0,200	0,143	1,000	1,000	0,333	1,000	0,333	1,000	0,333	0,333	0,500	0,29	0,02
Mande	3,000	0,333	0,200	0,200	0,200	3,000	3,000	1,000	3,000	0,500	3,000	0,500	0,500	2,000	0,65	0,05
Warungkon dang	1,000	0,200	0,143	0,333	0,143	1,000	1,000	0,333	1,000	0,333	1,000	0,333	0,333	0,500	0,31	0,02
Pagelaran	3,000	0,333	0,200	0,200	0,200	3,000	3,000	2,000	3,000	1,000	3,000	1,000	1,000	3,000	0,78	0,06
Campaka	1,000	0,200	0,143	0,333	0,143	1,000	1,000	0,333	1,000	0,333	1,000	0,333	0,333	0,500	0,31	0,02

Cidaun	3,000	0,333	0,250	0,333	0,200	3,000	3,000	2,00 0	3,000	1,000	3,000	1,00 0	1,000	3,000	0,81	0,0 6
Kadupanda k	3,000	0,333	0,200	0,333	0,200	3,000	3,000	2,00 0	3,000	1,000	3,000	1,00 0	1,000	3,000	0,80	0,0 6
Tanggeung	2,000	0,200	0,143	0,200	0,143	2,000	2,000	0,50 0	2,000	0,333	2,000	0,33 3	0,333	1,000	0,43	0,0 3
JUMLAH	43,000	10,533	4,374	10,533	4,324	43,000	43,000	27,1 67	43,000	21,500	43,000	20,5 00	21,500	38,500		

CI = (Lamda Max-n)/(n-1)

Lamda 14,87010

Max 243

0,066930

CI = 956

0,042631

IR 182

PERENGKINGAN	Rata-rata	Jumlah
Cianjur	0,13	7,01
Karangtengah	0,13	7,23
Cibeber	0,15	8,24
Cugenang	0,10	5,61
Cikalongkulon	0,14	7,97
Sukaresmi	0,03	1,93
Bojongpicung	0,03	1,87
Mande	0,04	2,46
Warungkondang	0,04	2,21
Pagelaran	0,05	2,75
Campaka	0,03	1,52
Cidaun	0,06	3,09
Kadupandak	0,04	2,44
Tanggeung	0,03	1,67

	Desa	Penduduk	Luas					
Desa	1,000	0,200	0,333	0,1111	0,1379	0,0625	0,3115	0,1038
Penduduk	5,000	1,000	4,000	0,5556	0,6897	0,7500	1,9952	0,6651

Luas	3,000	0,250	1,000	0,3333	0,1724	0,1875	0,6932	0,2311
	9,000	1,450	5,333					1

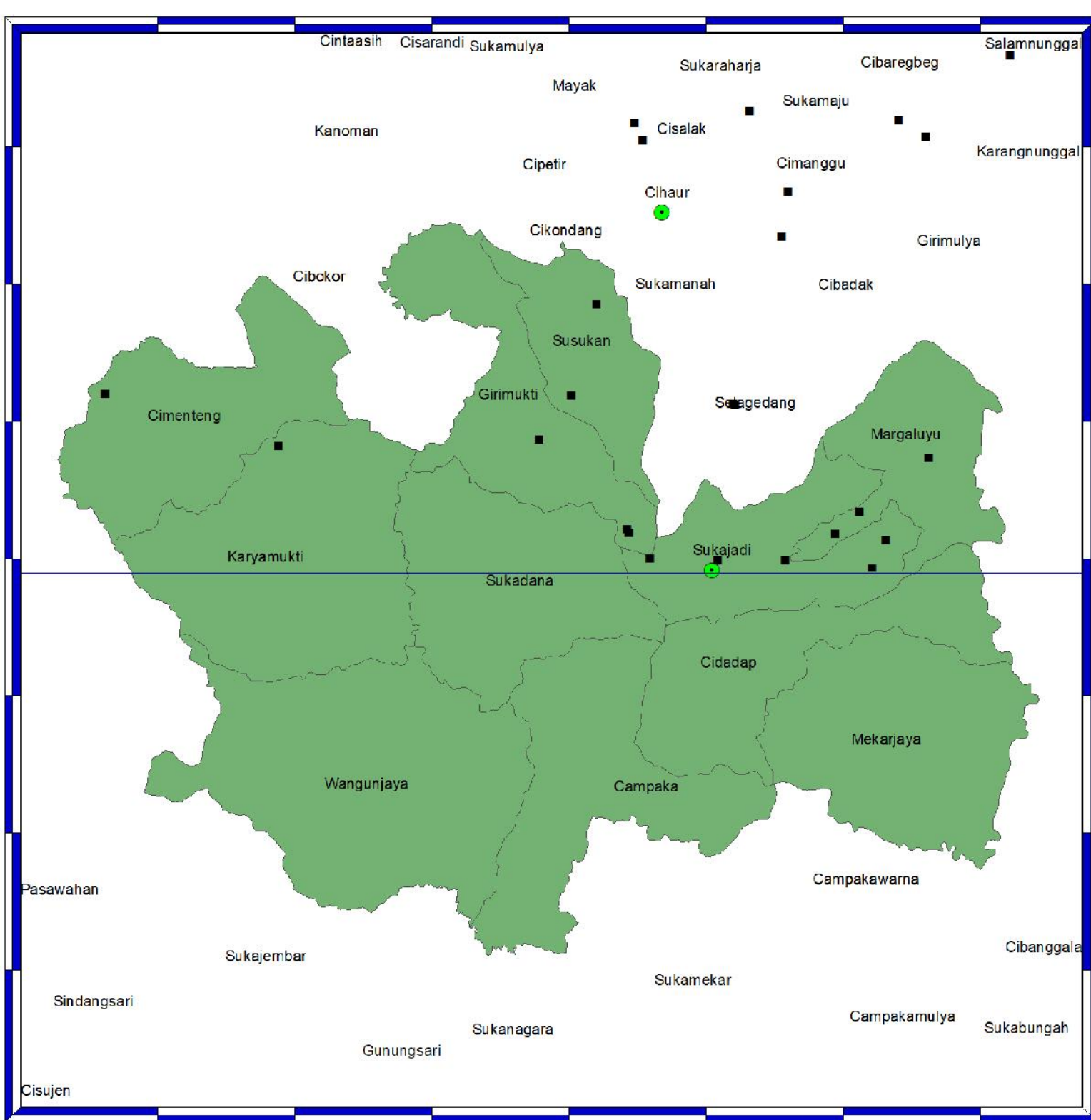
Jumlah Desa	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3	Eigen			Jumlah	
Skenario 1	1	1	1	0,333333333	0,333333333	0,333333333	1,0000000	0,333333
Skenario 2	1	1	1	0,333333333	0,333333333	0,333333333	1,0000000	0,333333
Skenario 3	1	1	1	0,333333333	0,333333333	0,333333333	1,0000000	0,333333
	3	3	3					1

Jumlah Penduduk	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3					
Skenario 1	1,000	0,333	4,000	0,235294118	0,217391304	0,400000	0,852685422	0,284228
Skenario 2	3,000	1,000	5,000	0,705882353	0,652173913	0,500000	1,858056266	0,619352
Skenario 3	0,250	0,200	1,000	0,058823529	0,130434783	0,100000	0,289258312	0,096419
	4,250	1,533	10,000					1

Luas Wilayah	Skenario 1	Skenario 2	Skenario 3					
--------------	------------	------------	------------	--	--	--	--	--

Skenario 1	1,000	3,000	0,250	0,1875	0,333333333	0,172414	0,693247126	0,231082
Skenario 2	0,333	1,000	0,200	0,0625	0,111111111	0,137931	0,311542146	0,103847
Skenario 3	4,000	5,000	1,000	0,75	0,555555556	0,689655	1,995210728	0,66507
	5,333	9,000	1,450					1

Perengkingan	Jumlah	AHP
Skenario 1	2,49	0,277046758
Skenario 2	4,23	0,470525738
Skenario 3	2,27	0,252427504



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN CAMPAKA

0 0,75 1,5 3 4,5 6



Kilometers

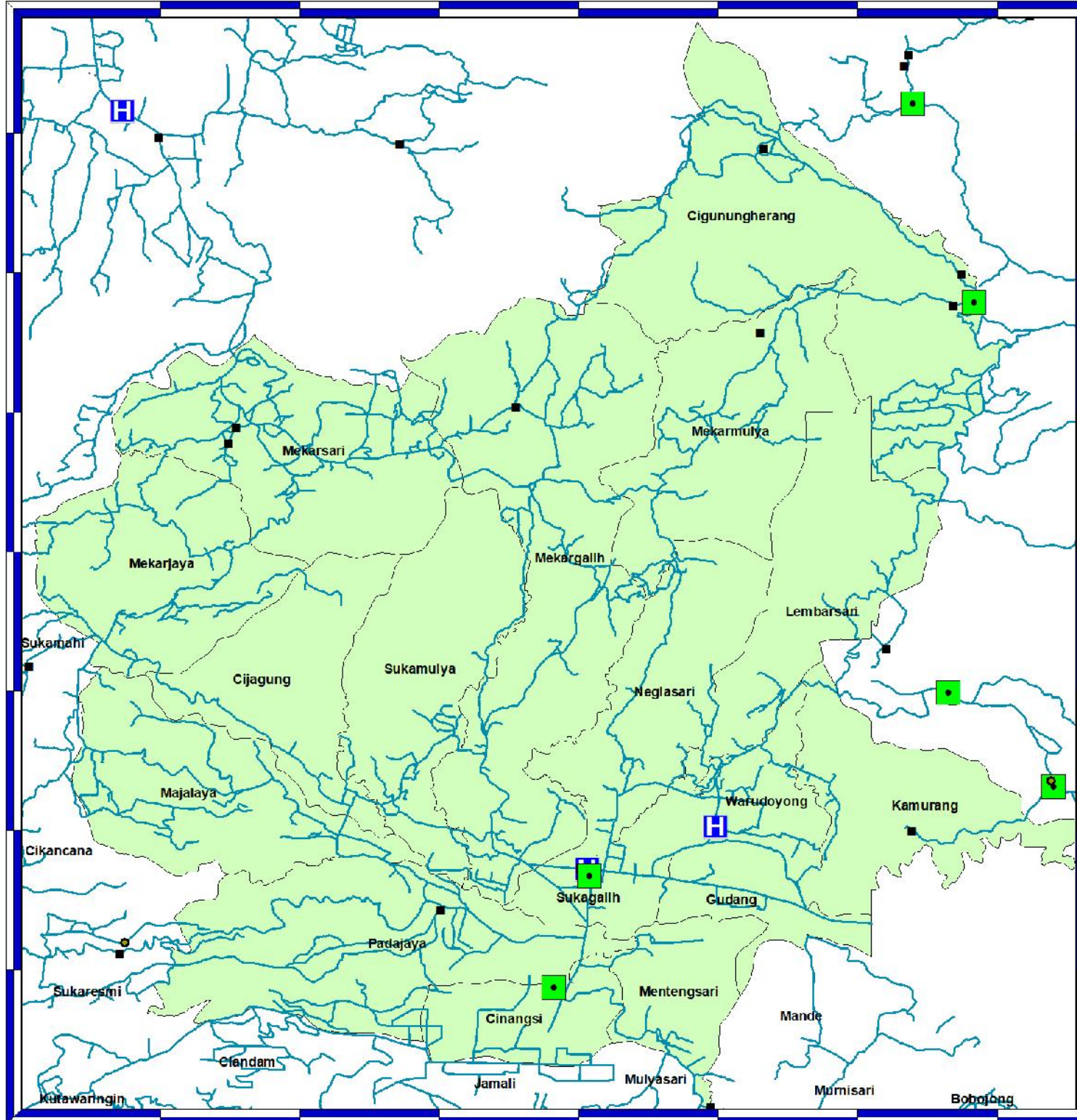


1:100.000

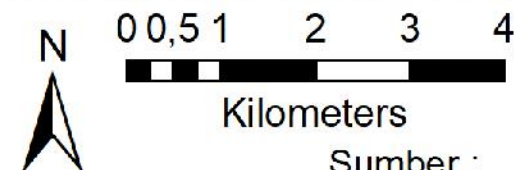
Sumber :
01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Legend

- Layanan Kesehatan
- Pusat Pemerintahan
- Pusat Pendidikan
- Puskesmas Kecamatan
- Rumah Sakit
- Batas Desa



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN CIKALONGKULON



1:80.000

Sumber :
01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Legend

- Layanan Kesehatan
- Pusat Pemerintahan
- Pusat Pendidikan
- Puskesmas Kecamatan
- Rumah Sakit
- Batas Desa

107°00"E

Sindanghayu

Jayagiri

Ciguha

Simpang

Sukakarya

Sukarame

Sukagalih

Sukaresmi



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN KADUPANDAK

0 0,5 1 2 3 4



Kilometers



1:80.000

Sumber :

01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Legend

- Layanan Kesehatan
- Pusat Pemerintahan
- Pusat Pendidikan
- Puskesmas Kecamatan
- Rumah Sakit
- Batas Desa

Waringinsari

Wargaasih

Sukasari

Mekarsari

Gelaranyar

Wargasari

Gandasari

Sukamaju

Sukaraharja

Bojongkasi

Sindangsari

Neglasari

Telagasari

Sukaraja

Pasirdalem

Pagarmaneuh

Sukakerta

Kadupandak

Bojonglarang

Sukamahi

Cijati

Parakantugu

Margaluyu

Sinarbakti

Sukaluyu

Cibodas

Caringin

Karangtengah

Rawagede

Sukajaya

Padaasih

107°00"E



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN MANDE

00,75,5 3 4,5 6



Kilometers

N



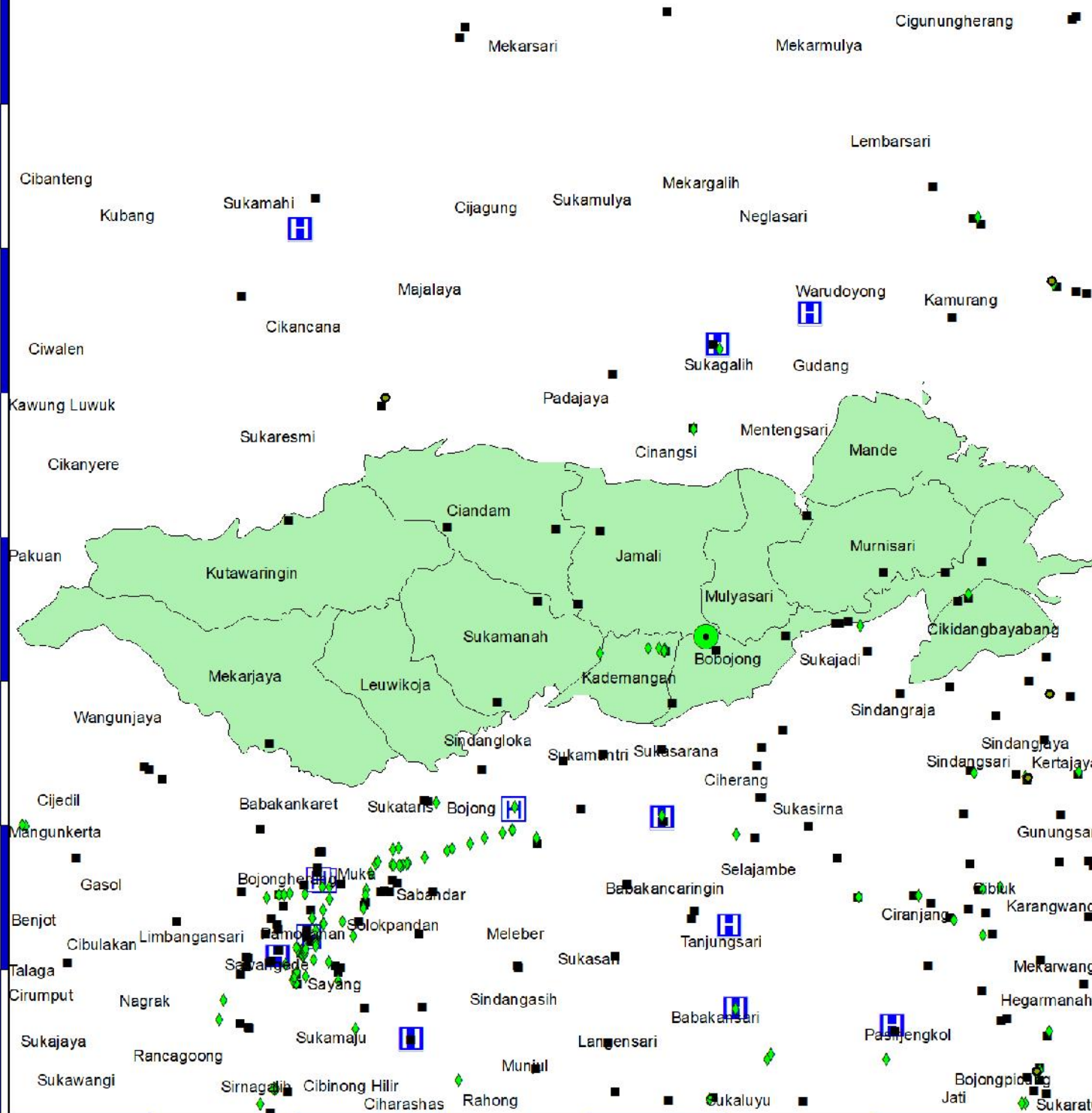
1:115.000

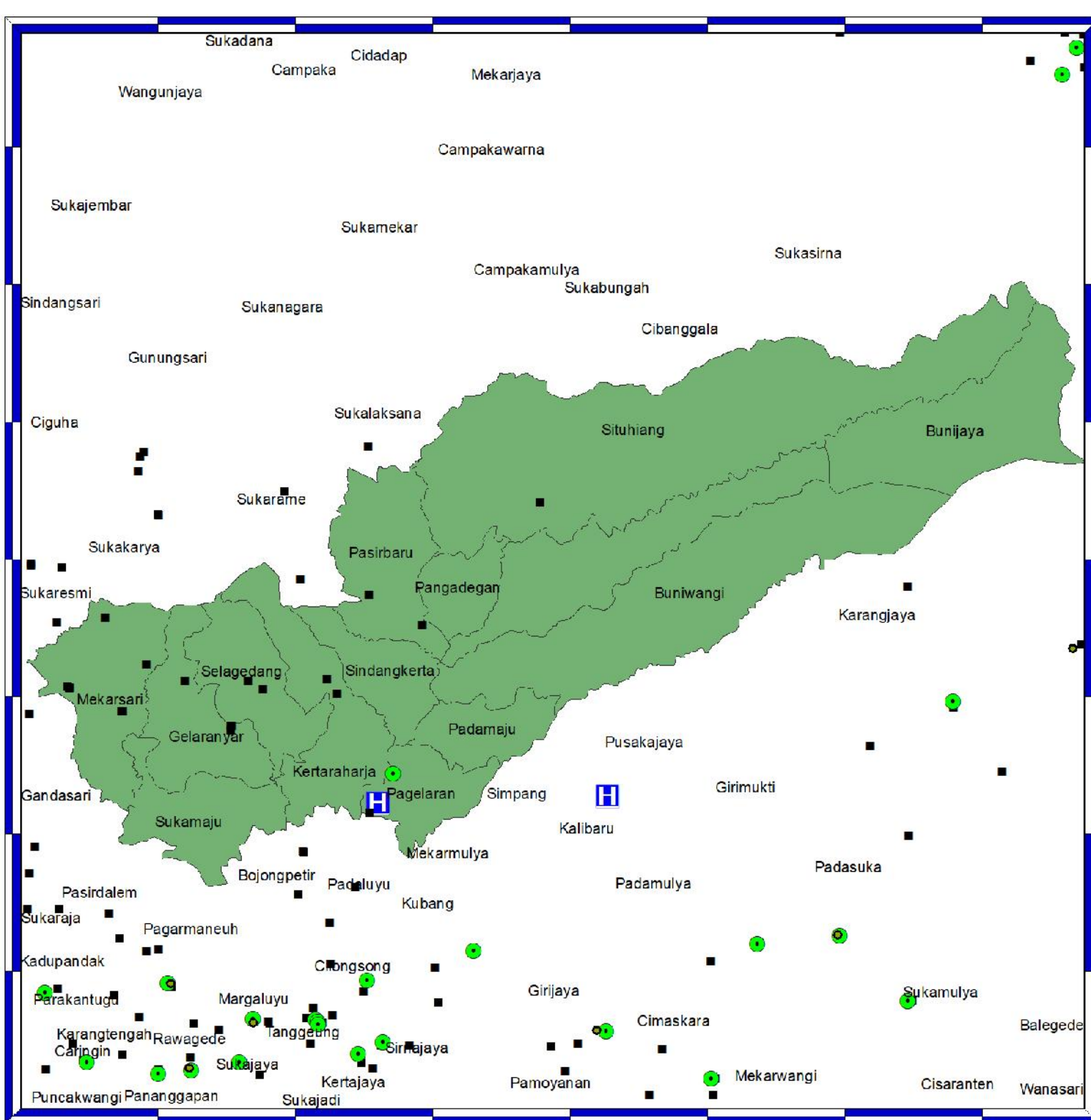
Sumber :

01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Legend

- Layanan Kesehatan
- Pusat Pemerintahan
- Pusat Pendidikan
- Puskesmas Kecamatan
- Rumah Sakit
- Batas Desa





PETA ADMINISTRASI KECAMATAN PAGELARAN

0 1 2 4 6 8



Kilometers

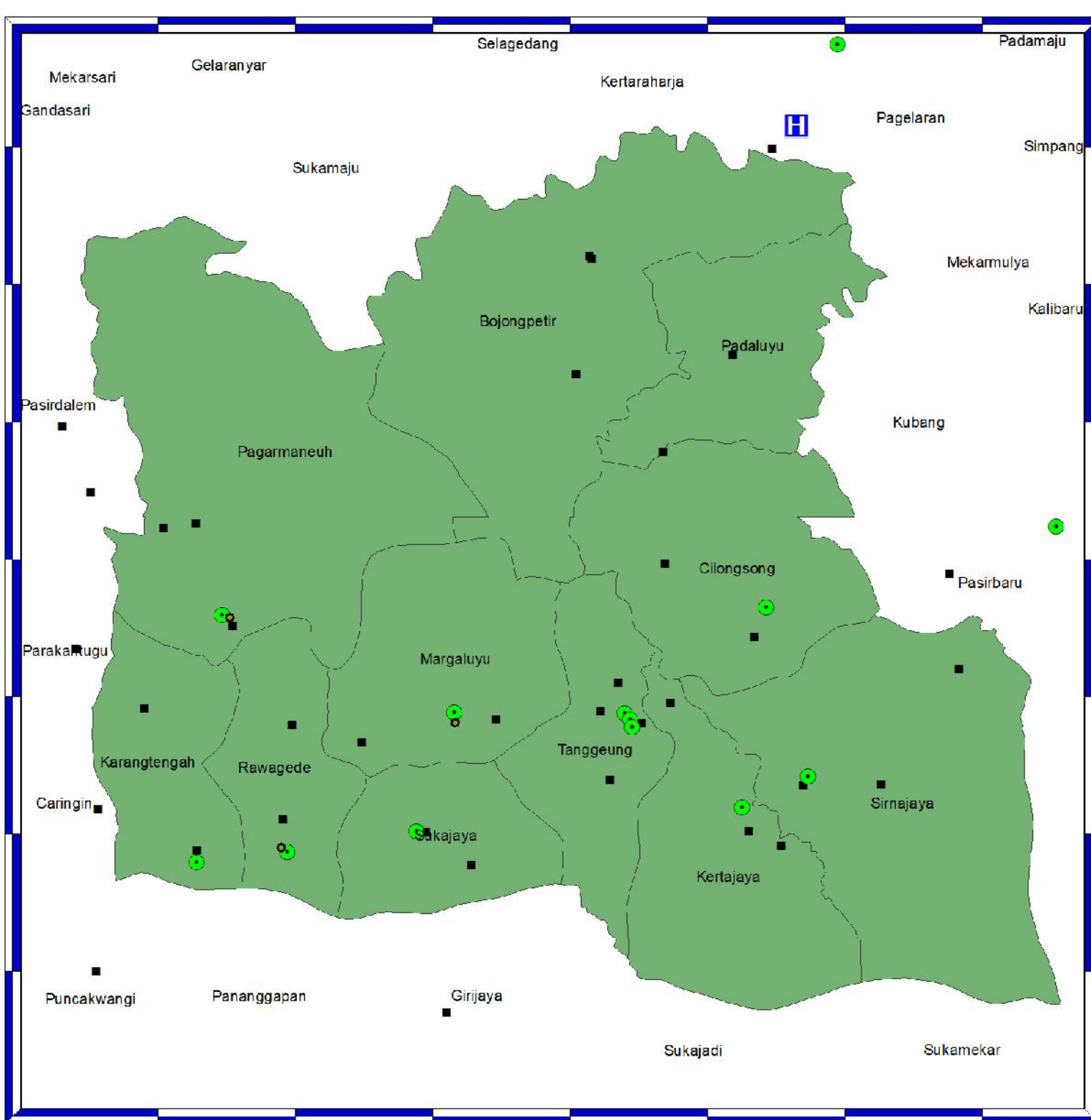


1:150.000

Sumber :
01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Legend

- ◆ Layanan Kesehatan
- Pusat Pemerintahan
- Pusat Pendidikan
- H Puskesmas Kecamatan
- H Rumah Sakit
- Batas Desa



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN TANGGEUNG

0 0,40,8 1,6 2,4 3,2



Kilometers

N



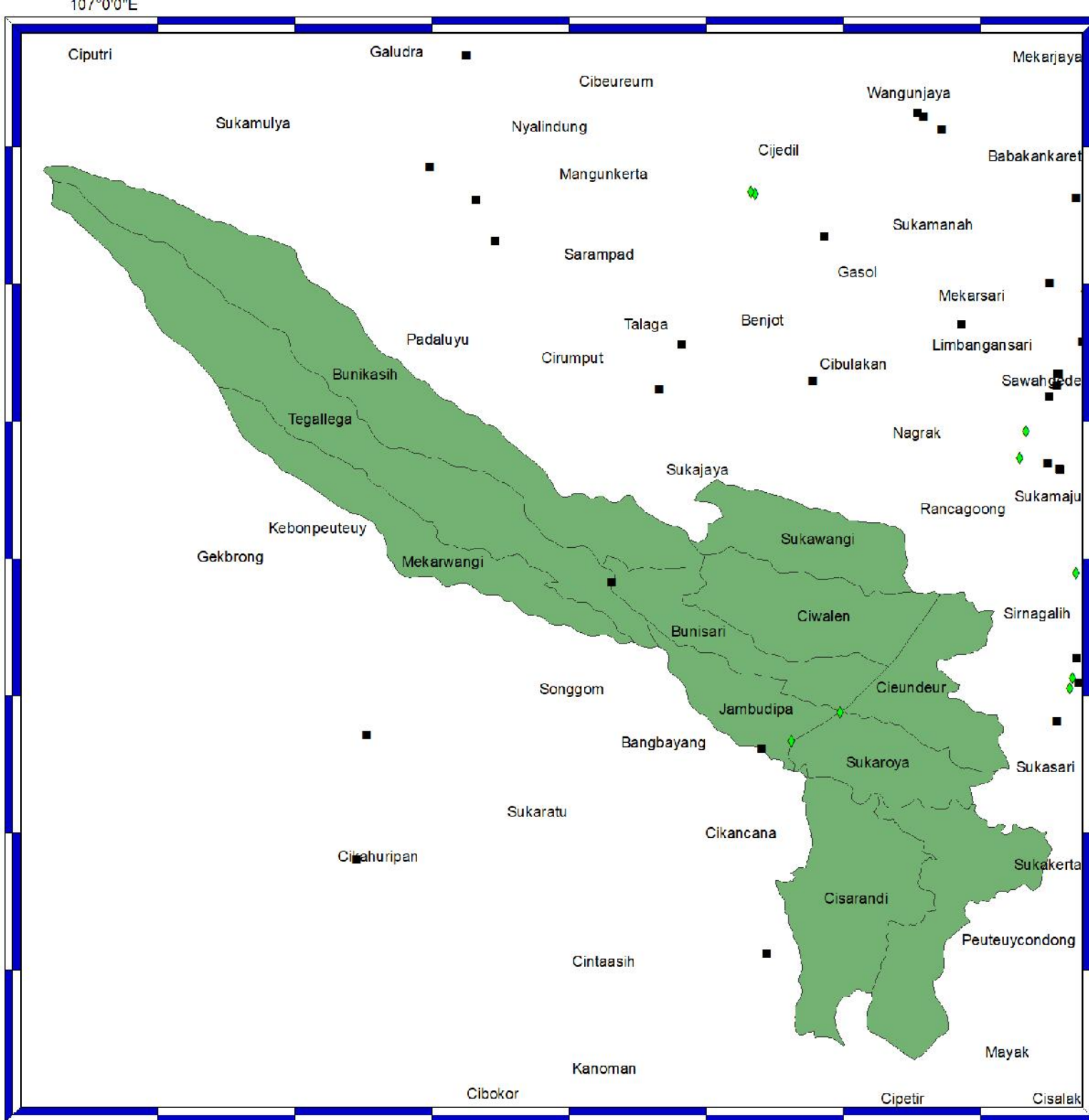
1:55.000

Sumber :

01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Legend

- Layanan Kesehatan
- Pusat Pemerintahan
- Pusat Pendidikan
- Puskesmas Kecamatan
- Rumah Sakit
- Batas Desa



PETA ADMINISTRASI KECAMATAN WARUNGKONDANG

0 0,5 1 2 3 4



Kilometers

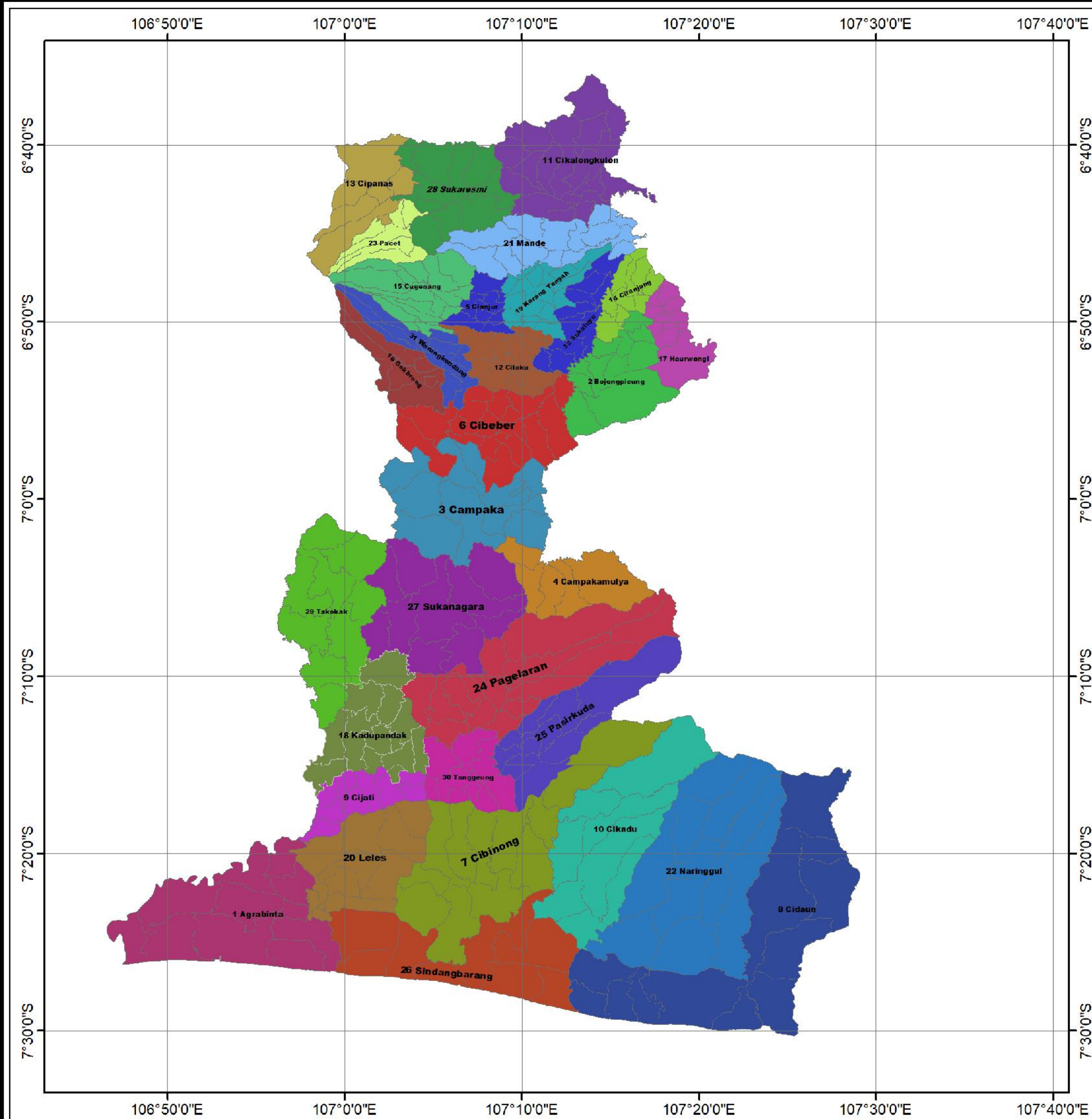


1:80.000

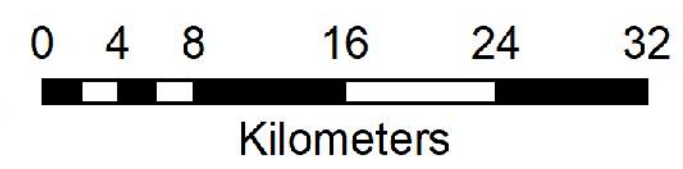
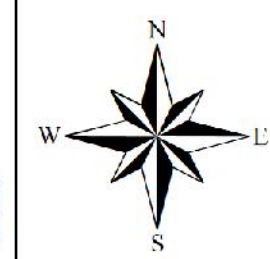
Sumber :
01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Legend

- Layanan Kesehatan
- Pusat Pemerintahan
- Pusat Pendidikan
- Puskesmas Kecamatan
- Rumah Sakit
- Batas Desa



PETA ADMINISTRASI KABUPATEN CIANJUR



1:400.000

Sumber :
01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

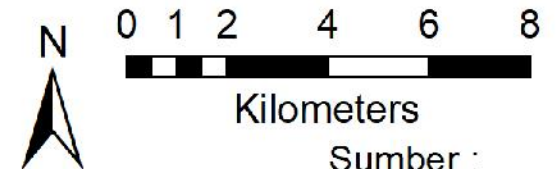
LEGEND

DAFTAR KECAMATAN DI KAB.CIANJUR

- | | |
|------------------|------------------|
| 1 Agrabinta | 17 Haurwangi |
| 2 Bojongpicung | 18 Kadupandak |
| 3 Campaka | 19 Karang Tengah |
| 4 Campakamulya | 20 Leles |
| 5 Cianjur | 21 Mande |
| 6 Cibeber | 22 Naringgul |
| 7 Cibinong | 23 Pacet |
| 8 Cidaun | 24 Pagelaran |
| 9 Cijati | 25 Pasirkuda |
| 10 Cikadu | 26 Sindangbarang |
| 11 Cikalongkulon | 32 Sukaluyu |
| 12 Cilaku | 27 Sukanagara |
| 13 Cipanas | 28 Sukaresmi |
| 14 Ciranjang | 29 Takokak |
| 15 Cugenang | 30 Tanggeung |
| 16 Gekbrong | 31 Warungkondang |



PETA SKENARIO PEMETAAN KECAMATAN

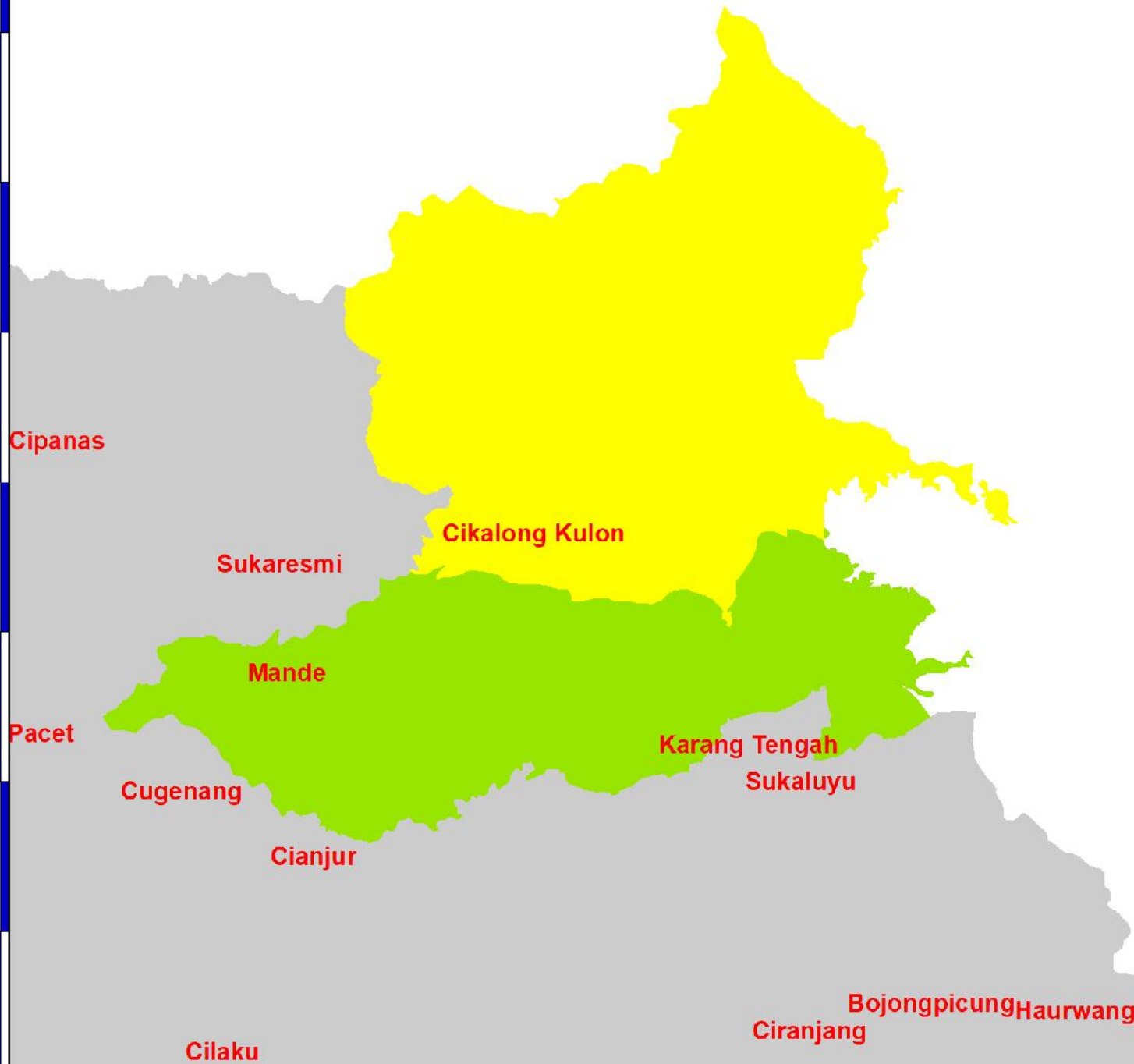


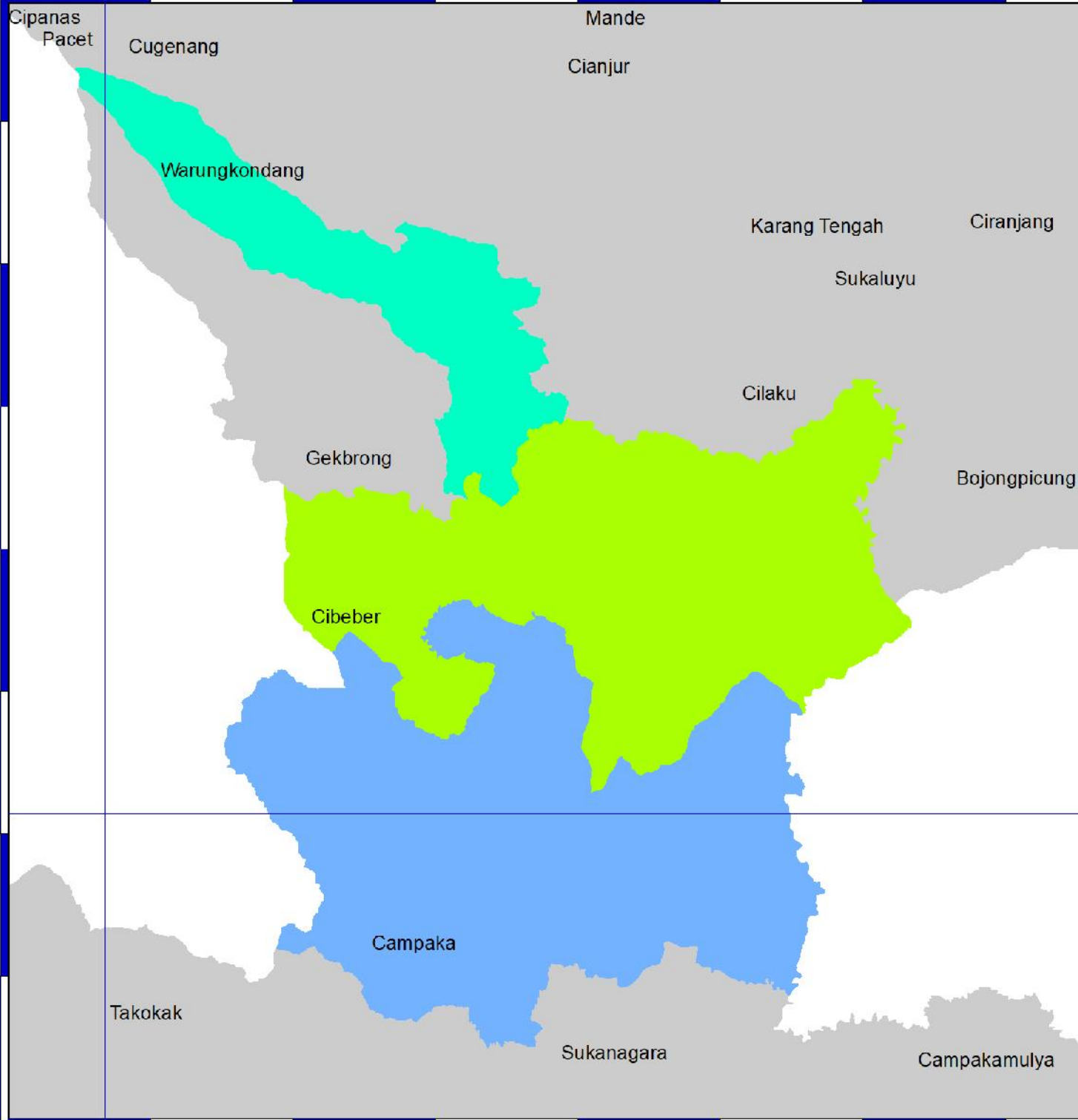
Sumber :
1:150.000 01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Pemetaan Kecamatan

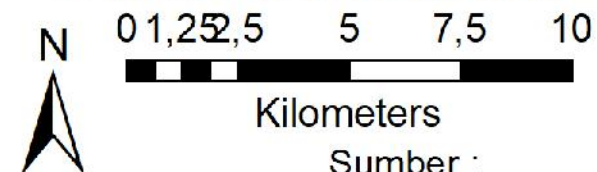
- Kecamatan di Kab.Cianjur
- Cikalong Kulon, Cianjur
- Mande, Cianjur

Diagram Peta





PETA SKENARIO PEMETAAN KECAMATAN

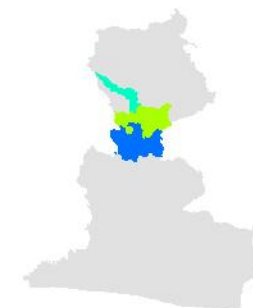


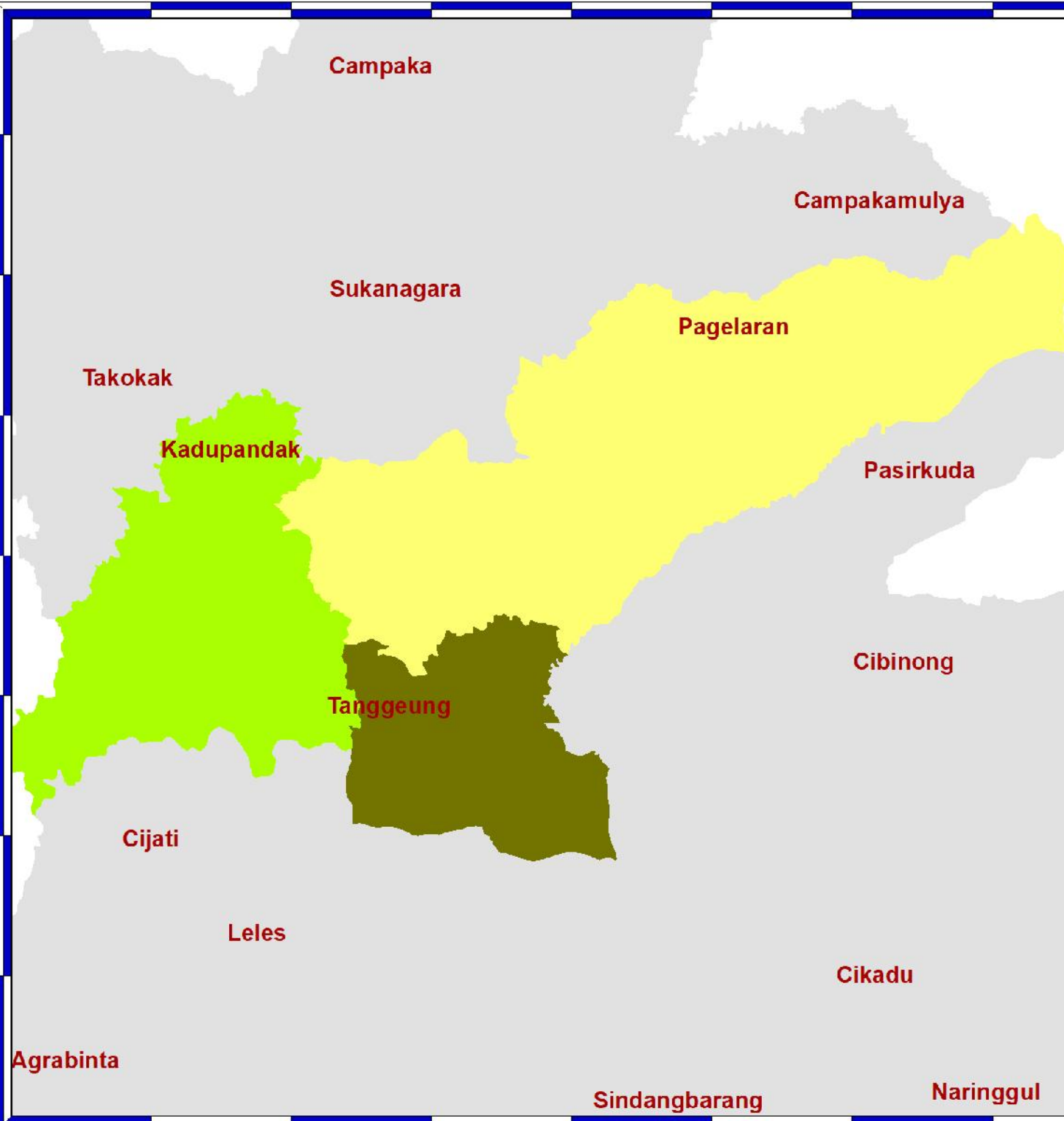
Sumber :
1:169.583 01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Pemetaan Kecamatan

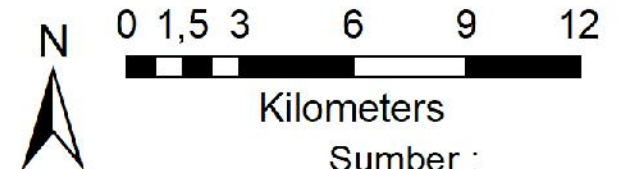
- Kecamatan lain di Cianjur
- Campaka
- Cibeer
- Warungkondang

Diagram Peta





PETA SKENARIO PENATAAN KECAMATAN

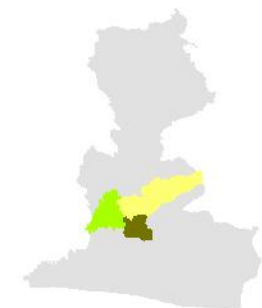


Sumber :
1:200.000 01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Legend

- Kecamatan lain di Cianjur
- Kec. Kadupandak
- Kec. Pagelaran
- Kec. Tanggeung

Diagram Peta





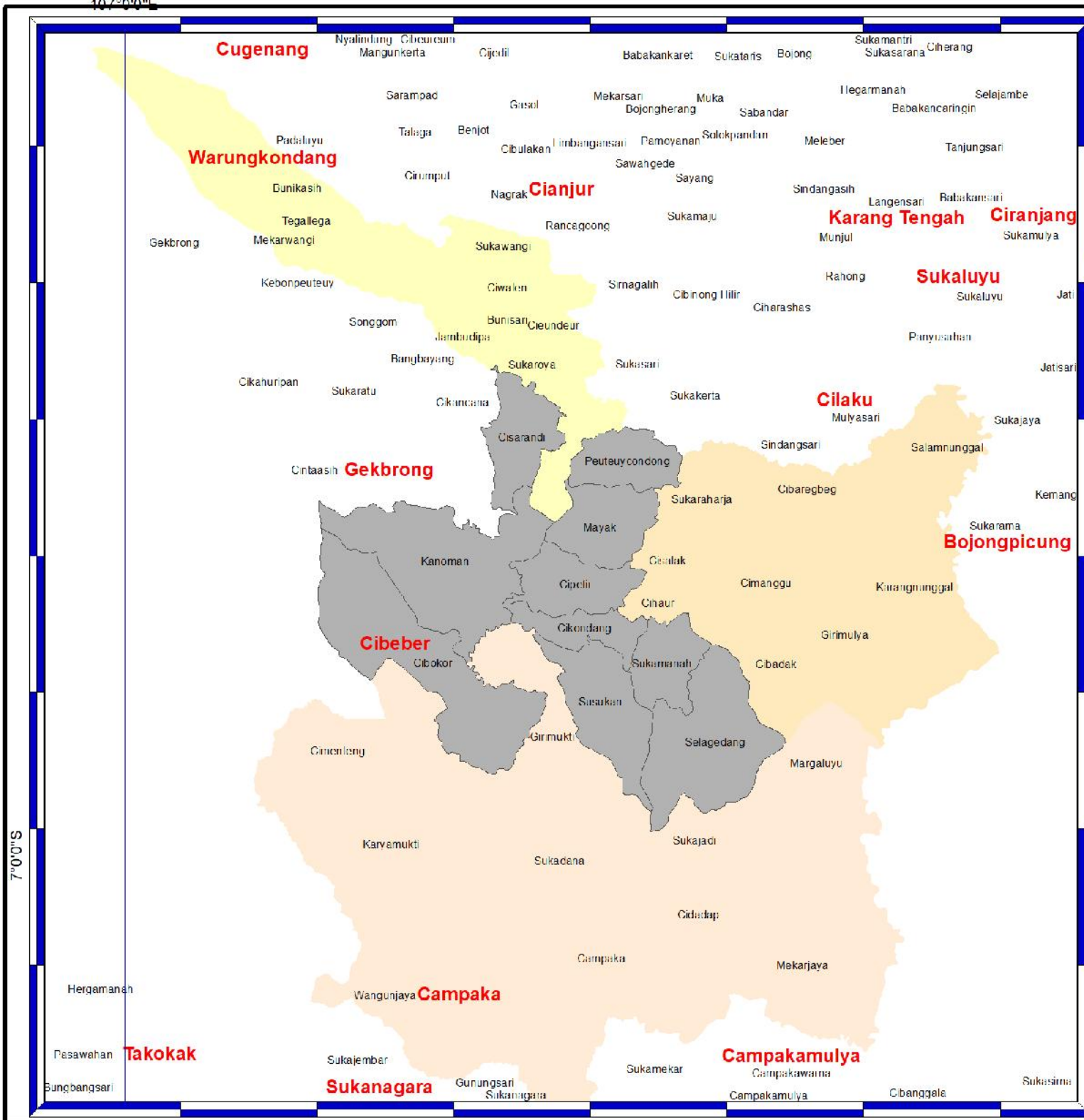
REKOMENDASI KECAMATAN

1:125.000 01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

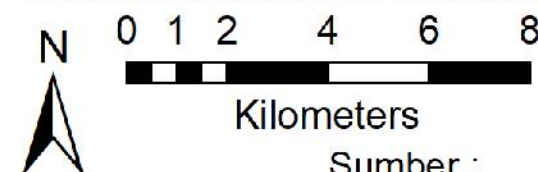
Rekomendasi Kecamatan
Kecamatan lain di Kab.Cianjur

Kec.Induk Cikalongkulon

Kec.Induk Mande



PETA REKOMENDASI KECAMATAN

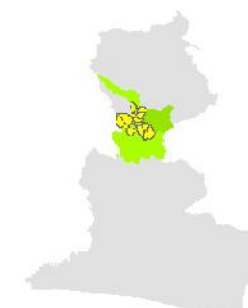


Sumber :
1:150.000 01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Pemetaan Kecamatan Rekomendasi Kecamatan Baru

- Rekomendasi Kecamatan Baru
- Kec. Induk Campaka
- Kec. Induk Cibeber
- Kec. Induk Warungkondang

Diagram Peta





PETA REKOMENDASI KECAMATAN




Sumber :

Sumber :
1:125.000 01. Rupa Bumi Indonesia
(Geospasial Indonesia)

Legend

-  Rekomendasi Kecamatan
 Kecamatan lain di Cianjur
 Kec. Induk Kadupandak
 Kec. Induk Pagelaran
 Kec.Induk Tanggeung

Diagram Peta